

Revisi



# Laporan Kinerja

Perwakilan Badan Kependudukan  
dan Keluarga Berencana Nasional  
Provinsi D.I. Yogyakarta

# 2022

Berencana Itu Keren



## Sambutan



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2022 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Juli 2023

Kepala



Dra. Andi Ritamariani, M.Pd

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN*



# LKIP

*(Laporan Kinerja Instansi Pemerintah)*

**Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta**

**Tahun Anggaran 2022**

# DAFTAR ISI

Sambutan.....	
Executive Summary.....	v
BAB I .....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI .....	1
C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS .....	3
D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI .....	4
E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG .....	4
F. ISU STRATEGIS.....	7
BAB II .....	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.....	8
B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2022 .....	17
C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2023 .....	22
D. Perjanjian Kinerja .....	27
E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program .....	28
BAB III .....	31
A. CAPAIAN KINERJA BKKBN.....	31
B. REALISASI ANGGARAN .....	50
C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA .....	53
D. EVALUASI KINERJA .....	66
E. PERBAIKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2023 .....	73
BAB IV .....	75
LAMPIRAN.....	79



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2020-2022 .....	vi
Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022 .....	17
Tabel 2.2 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022.....	19
Tabel 2.3 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023.....	22
Tabel 2.4 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023.....	24
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	28
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja.....	31
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	31
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dari Tahun 2020 sampai 2022 .....	43
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY dengan capaian nasional	43
Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2022 dengan Jangka Menengah 2024 .....	49
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2022 .....	52
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2022 per program .....	52
Tabel 3.8 PK DIY 2022.....	58
Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2021 .....	68
Tabel 3.10 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY.....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY.....	3
Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR.....	38
Gambar 3.2 Grafik Perkembangan mCPR .....	39
Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Unmet Need.....	41
Gambar 3.4 Grafik fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK .....	44
Gambar 3.5 Grafik BKR dan PIK Remaja.....	45
Gambar 3.6 Grafik Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) .....	48
Gambar 3.7 Tampilan Web Survey Kepuasan Masyarakat dan Hasilnya .....	62
Gambar 3.8 Tangkapan Layar Aplikasi Digital Office .....	64
Gambar 3.9 Tampilan Learning Management System .....	65

# Executive Summary

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 - 2024.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong”**, dengan misi :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 6 sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- d. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
- e. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
- f. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 ini terdapat 49 (empat puluh sembilan) indikator, di antaranya terdapat indikator Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sebanyak 7 (tujuh) indikator. Dari 49 (empat puluh sembilan) indikator pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut 14 (empat belas) di antaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 33 (tiga puluh tiga) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian di kisaran 82,96% s.d. 100%. Untuk sasaran Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) persentase capaian berada di kisaran 100% s.d. 114,04%.

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya disajikan dalam tabel berikut :

*Tabel 1.1 Trend pencapaian indikator kinerja 2020-2022*

NO	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1.92	1.81	105.73%	1.90	1.91	99.47%	1.82	1.93	93.96%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	62.01	57.1	92.08%	62.40	55.60	89.10%	57.18	57.10	99.86%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5.74	9.04	42.51%	5.62	19.80	-152.31%	14.50	19.30	66.90%
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	17	14	117.65%	16.00	9.10	143.13%	14.00	9.60	131.43%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61.43	68.48	111.48%	63.07	57.41	91.03%	65.36	59.42	90.91%
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23	22	95.65%	23.00	22.90	99.57%	23.00	23.20	100.87%

Anggaran yang diterima oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2022 telah terserap sebesar 96,6%. Realisasi anggaran tersebut sebesar Rp 60.815.289.879 dari total pagu anggaran Rp 62.974.194.195.

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut:

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;

2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarkan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Perwakilan BKKBN DIY berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai misi dan tujuan organisasi.

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, BKKBN berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN) pada RPJMN IV 2020 – 2024, yaitu untuk “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” dan mendukung “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan”. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat untuk mendukung agenda prioritas tersebut.

### **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

#### **TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 82 Tahun 2011 (pasal 2), Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi sebagai berikut :

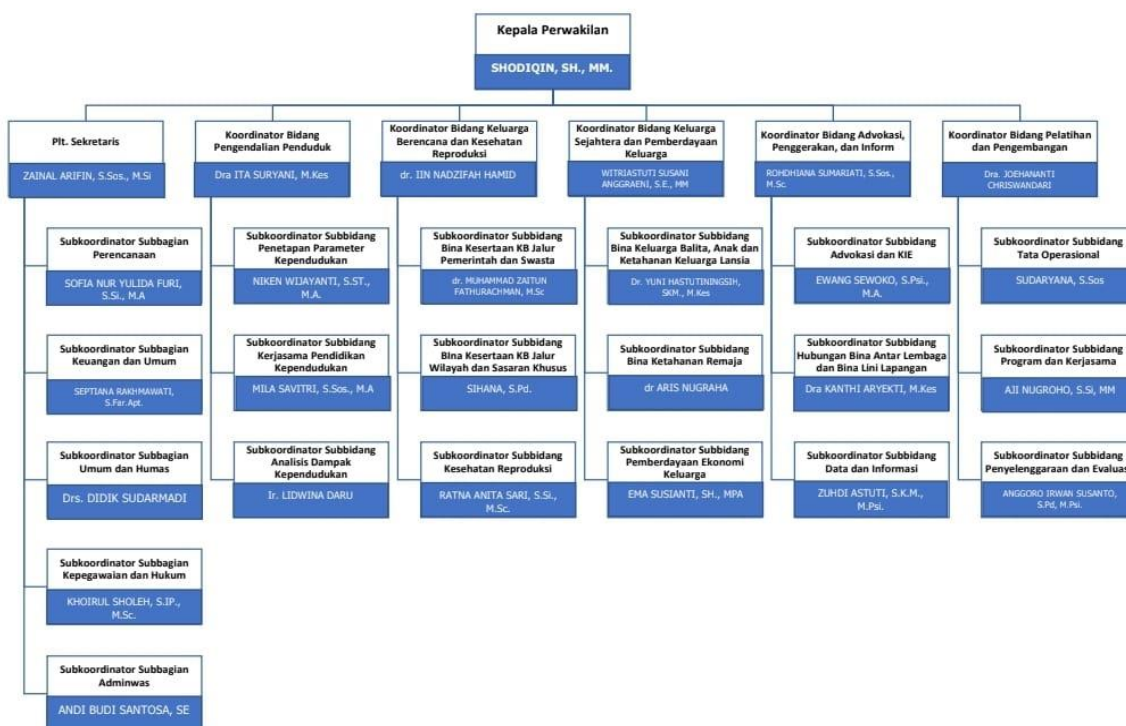
- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi, penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

## **STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 82 Tahun 2011, Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY termasuk dalam tipologi Perwakilan BKKBN Provinsi tipe A yang dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan dan membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 5 (lima) bidang serta rumpun jabatan fungsional tertentu. Adapun struktur organisasi Perwakilan BKKBN digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN DIY



### C. MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

Sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024 BKKBN diberi mandat untuk berkontribusi langsung terhadap 2 (dua) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan/Prioritas Nasional (PN). Dalam Prioritas Nasional “Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkualitas dan Berdaya Saing” BKKBN berperan dalam Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan, Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial, serta Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan.

Sedangkan pada Prioritas Nasional “Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan” BKKBN memiliki peran pada Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern dan Berkarakter. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unit pelaksana BKKBN di daerah diberi mandat untuk melaksanakan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) yang terkait dengan Prioritas Nasional tersebut yang ada di Daerah istimewa Yogyakarta.

## **D. PROGRAM REFORMASI BIROKRASI**

Reformasi Birokrasi merupakan upaya dalam rangka memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan bersih dan baik sebagai prasyarat utama pembangunan nasional. Road Map RB-BKKBN terbagi dalam 3 (tiga) periode yaitu Periode 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Dalam Road Map RB BKKBN 2020 – 2024 terdapat 3 (tiga) Sasaran, yaitu Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang kapabel serta Pelayanan publik yang prima.

Penyusunan Road Map ini didasarkan pada Keputusan Kepala BKKBN; Nomor: 129/KEP/B4/2020 tertanggal 25 Juni 2020 tentang Tim Penyusun Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024. Selaras dengan Kemenpan RB; Road Map Reformasi Birokrasi BKKBN 2020-2024 memiliki delapan area perubahan yang meliputi: Manajemen Perubahan, Deregulasi kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Asas yang akan dikedepankan pada Road Map RB BKKBN, Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya Reformasi Birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan. Prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.

## **E. PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG**

### **1) PERMASALAHAN**

Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

- a) Masih tingginya angka kebutuhan ber-KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terpenuhi (*unmet need*). Berdasarkan data Pemutakhiran PK-22 *unmet need* DIY tahun 2022 sebesar 17,20%.

- b) Prevalensi balita *stunted* (tinggi badan menurut umur) di DIY sebesar 16,4 yaitu urutan kelima provinsi terendah *stunted* setelah provinsi Bali, DKI Jakarta, Lampung dan Kepulauan Riau (SSGI 2022).
- c) Kesertaan KB Pasca Persalinan di DIY masih rendah yaitu 20.25% (New SIGA 2022).
- d) Proses pengolahan data verifikasi dan validasi keluarga berisiko stunting yang bersumber dari data PK21 belum selesai sehingga belum diperoleh data yang akurat.
- e) Terbitnya Inpres Nomor 3 tahun 2023 tentang tentang Optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas menjadi dasar capaian Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting pada bulan Mei 2022 dengan target capaian kinerja yang cukup besar.

## 2) TANTANGAN

Tantangan yang dihadapi Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a) Capaian TFR DIY berdasarkan data Pemutakhiran PK-22 sebesar 1,93. Capaian TFR DIY ini adalah terendah secara nasional. Di satu sisi, DIY telah berhasil melampaui capaian TFR nasional sebesar 2,24 akan tetapi hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang ada adalah bagaimana kita dapat menjaga TFR ini pada kisaran ideal tanpa membiarkan angka TFR ini turun terlalu rendah. TFR yang terlalu rendah jika dibiarkan maka akan mencapai *point of no return*, dimana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan didominasi oleh lansia dan pralansia, serta kekurangan generasi muda dan usia produktif.
- b) Berdasarkan UU Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan PP Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, mengamanatkan kepada BKKBN untuk melaksanakan kerjasama pendidikan kependudukan dalam upaya menyelenggarakan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana.

- c) Era digital seperti sekarang ini menuntut kita untuk berinovasi menyesuaikan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat agar semua kalangan dapat terjangkau dengan informasi program bangga kencana dan stunting.

### **3) PELUANG**

Peluang yang dimiliki Perwakilan BKKBN DIY dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana di DIY antara lain :

- a) Adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga menjadi landasan komitmen sinergi dalam mewujudkan ketahanan keluarga di DIY.
- b) Ketersediaan Penyuluh KB, kelompok kegiatan dan tenaga lini lapangan yang mampu bertugas kolaboratif dengan melakukan adaptasi sesuai protokol kesehatan.
- c) Adanya dukungan mitra kerja dan komitmen lintas sektor (pemerintah daerah, swasta, lembaga non pemerintah, masyarakat) dalam mensukseskan Program Bangga Kencana.
- d) Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, BKKBN menyiapkan hasil pendataan keluarga untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrem termasuk penurunan stunting
- e) Surat Edaran Gubernur Nomor: 11/SE/VII/2022 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KB PP) di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai regulasi dari Pemerintah Daerah DIY untuk mendukung tercapainya peningkatan pelayanan KB PP di seluruh Faskes di DIY dan mCPR.
- f) Tersedianya Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada daerah tertentu untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana.

## F. ISU STRATEGIS

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah:

- a. Kesertaan ber-KB dengan cara modern masih rendah (57,10%) (Pemutakhiran PK-2022), hal ini karena adanya peningkatan metode KB tradisional dari 10,3% menjadi 18,6% (laporan SDKI 2017).
- b. Masih rendahnya indeks pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR) yaitu 48,5% (Laporan SKAP 2019).
- c. Kampung keluarga Berkualitas ruang lingkungannya menjadi tingkat desa yang tadinya sasarannya wilayah yang mempunyai kondisi minus di berbagai program Bangga Kencana misalnya kesertaan ber-Kb-nya rendah, tingkat kesejahteraannya rendah, kondisi lingkungan yang tidak sehat, serta sarana prasarana wilayah terbatas.
- d. Pelayanan KB Pasca Persalinan dan Intensifikasi Pelayanan KB di Fasyankes untuk mendukung program percepatan penurunan stunting, serta pelaksanaan Audit Kasus Stunting sebagai bagian dari Program Percepatan Penurunan Stunting.
- e. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)
  - 1) Pesan Kunci Advokasi dan KIE perlu penajaman, terdapat Kesenjangan Mendapatkan Informasi
  - 2) Peran mitra kerja dalam operasional program Bangga Kencana perlu ditingkatkan
  - 3) Dukungan tenaga penggerak lini lapangan perlu ditingkatkan
  - 4) Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Keluarga perlu dioptimalkan.

## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA**

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat.

### **A. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024**

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta berisi tentang sasaran, strategi, kebijakan program serta kegiatan-kegiatan dalam penguatan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013, perubahan ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pada satuan kerja disusun pohon kinerja untuk membantu penjabaran kinerja dan indikator kinerja. Untuk Perwakilan BKKBN DIY pohon kinerja terdapat di Lampiran.

#### **A.1. Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator**

Visi BKKBN adalah **“terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang guna mendukung tercapainya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong.”** Visi BKKBN mengandung pengertian :

- a. Keluarga berkualitas, yaitu tentram, mandiri dan bahagia. Untuk mencapai keluarga berkualitas angka kelahiran total (TFR) diturunkan menjadi 2,26 pada tahun 2020 sampai dengan 2,1 pada tahun 2024.



- b. Kebijakan pengendalian penduduk dilaksanakan untuk mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan menghasilkan Bonus Demografi. Pengendalian penduduk berkontribusi pada pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Pengaturan kelahiran melalui berbagai kegiatan prioritas Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KB KR) yang komprehensif dan pendewasaan usia perkawinan (PUP) yang merupakan salah satu upaya pokok dalam menurunkan TFR. Bidang KB KR meningkatkan kesehatan ibu dan anak guna membangun manusia berkualitas dan berdaya saing.
- d. Pembangunan keluarga yang holistic integratif sesuai siklus hidup sebagai salah satu upaya meningkatkan kualitas keluarga yang berketahanan dan berkarakter.

BKKBN mempunyai misi untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu :

- a. Mengendalikan pertumbuhan penduduk dalam rangka menjaga kualitas dan struktur penduduk seimbang
- b. Menyelenggarakan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi secara komprehensif
- c. Menyelenggarakan pembangunan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup
- d. Membangun kemitraan, jejaring kerja, peran serta masyarakat dan kerjasama global
- e. Memperkuat inovasi, teknologi, informasi dan komunikasi
- f. Membangun kelembagaan, meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan SDM aparatur

Tujuan BKKBN dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yaitu :

- a. Mewujudkan keluarga berkualitas, yaitu keluarga yang tentram, mandiri dan bahagia
- b. Mengendalikan struktur penduduk menuju Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga terwujud bonus demografi yang bermanfaat bagi pembangunan.

Sasaran strategis tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (mCPR)
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*)
4. Menurunnya Angka Kelahiran remaja
5. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
6. Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)

Sasaran Program Tahun 2020-2024 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

1. Terwujudnya sinergitas kebijakan dan kelembagaan pengendalian penduduk
2. Meningkatnya kesertaan keluarga dalam keluarga berencana dan kesehatan reproduksi
3. Tercapainya sasaran program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana melalui peningkatan peran serta masyarakat, penggerakan, penguatan jejaring kemitraan dan pengelolaan sistem informasi yang berkualitas
4. Meningkatnya presentase PKB/PLKB yang lulus diklat dengan kategori sangat baik
5. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai Proyek Prioritas Nasional (PRO PN) sebagai berikut :

1. Tersedianya alokon di Fasilitas Kesehatan
  - Pemenuhan ketersediaan alokon di faskes
2. Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 HPK
  - Keluarga yang memiliki baduta terpapar 1000 HPK
3. Meningkatnya pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia

- Bina keluarga lansia yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang
4. Meningkatnya pengetahuan remaja putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan gizi melalui peran pusat informasi konseling (PIK) remaja dan bina ketahanan remaja (BKR)
- Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai sasaran kegiatan sebagai berikut :

1. Pengelolaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
  - Kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan
  - Pembinaan pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah
  - Penggerakan stakeholder mitra kerja serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT dalam program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
  - Layanan dukungan manajemen eselon I
  - Layanan sarana dan prasarana internal
  - Layanan perkantoran
  - Layanan audit internal
  - Layanan pendidikan dan pelatihan
  - Layanan penelitian dan pengembangan
  
2. Proyek Prioritas Nasional
  - Pemenuhan ketersediaan alokon di Faskes
  - Keluarga yang memiliki Baduta terpapar 1000 HPK

- Peningkatan pelayanan ramah lansia melalui 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
- Penguatan peran PIK remaja dan BKR dalam edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai indikator sasaran program sebagai berikut :

#### Bidang KSPK Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
- Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe
- Jumlah Kelompok BKL Yang Melaksanakan 7 (Tujuh) Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia
- Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS
- Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga

#### Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah
- Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB
- Persentase Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
- Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
- Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
- Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan

#### Bidang KBKR Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
- Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*)
- Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
- Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
- Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan

#### Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase *stakeholders*/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
- Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
- Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
- Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
- Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota

#### Bidang Lalitbang Perwakilan BKKBN DIY

- Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik
- Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi

#### Indikator Sasaran program DKM :

- Tingkat kepuasan layanan dukungan manajemen program bangga kencana
- Jumlah unit kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi
- Jumlah unit kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih dan melayani

## **A.2. Arah Kebijakan dan Strategi**

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada arah kebijakan BKKBN yang tertuang dalam Renstra BKKBN 2020-2024. Lima arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga melalui strategi:
  - Penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga.
  - Optimalisasi pola asuh dan pendampingan balita dan anak, serta pembentukan dan penguatan karakter sejak dini melalui keluarga.
  - Peningkatan pola asuh dan pendampingan remaja, peningkatan kualitas dan karakter remaja, serta penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
  - Peningkatan kemandirian ekonomi bagi keluarga, dengan sasaran khusus keluarga-keluarga akseptor KB lestari, keluarga peserta MKJP khususnya MOP dan MOW, serta peserta KB mandiri di wilayah Kampung KB.
  - Peningkatan ketahanan dan kemandirian keluarga rentan.
  - Penguatan pelayanan ramah lansia melalui tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia
  - Peningkatan kemitraan pembangunan keluarga.
- b. Memperkuat pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui strategi:
  - Pengembangan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).
  - Penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk.
  - Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan.
  - Peningkatan sinkronisasi dan pemanfaatan data/informasi kependudukan.



- c. Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran melalui strategi:
- Penguatan kapasitas faksas dan jaringan/jejaring yang melayani KBKR.
  - Penguatan kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan KBKR.
  - Peningkatan jangkauan pelayanan KBKR di wilayah dan sasaran khusus.
  - Peningkatan KB pria.
  - Penguatan promosi dan konseling kesehatan reproduksi berdasarkan siklus hidup, pencegahan Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD), dan peningkatan pelayanan KB Pasca Persalinan (KB PP).
  - Peningkatan kemandirian PUS dalam ber-KB.
- d. Meningkatkan advokasi dan penggerakan Program Bangga Kencana sesuai karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran, yang dapat diwujudkan melalui strategi:
- Peningkatan penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi sasaran dan wilayah.
  - Peningkatan kinerja tenaga Penyuluh KB/PLKB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBD/Sub-PPKBD.
- e. Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi, dengan strategi:
- Peningkatan kualitas dan pemanfaatan data/informasi Program Bangga Kencana berbasis teknologi informasi di seluruh tingkatan wilayah.
  - Pengembangan *smart technology/smart program* untuk memperkuat pengelolaan Program Bangga Kencana.

Agar operasionalisasi Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik, perlu mendapatkan dukungan dari :

- a. Aspek Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Program Bangga Kencana Bidang Pelatihan dan Pengembangan bertugas untuk meningkatkan kualitas SDM, memanfaatkan hasil penelitian, dan pengembangan inovasi, yang dapat diwujudkan melalui strategi:

- Peningkatan kualitas SDM Program Bangga Kencana melalui pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi berbasis teknologi informasi.
- Peningkatan kualitas, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan inovasi Program Bangga Kencana sebagai input/masukan bagi rumusan kebijakan.

b. Aspek Dukungan Manajemen

Sekretariat memberikan dukungan manajemen terhadap Program Bangga Kencana melalui strategi:

- Sosialisasi landasan hukum kependudukan dan KB, serta pengelolaan organisasi dan tatalaksana.
- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan BMN.
- Penguatan perencanaan program dan anggaran.
- Peningkatan kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM aparatur.
- Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran dan kerumahtanggaan yang berkualitas.

c. Aspek Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan Program Bangga Kencana guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui strategi:

- Pembinaan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efektif, dan efisien.
- Pembinaan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) secara efektif dan efisien di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Monitoring terhadap kebijakan Kepala BKKBN dan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta agar dilaksanakan secara konsisten.
- Pemantauan pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien.

## B. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2022

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2022		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.056	Keluarga
	2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	292 151	PIK Remaja BKR
	3	Jumlah kelompok BKL yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	143	Kelompok BKL
	4	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	926	Keluarga
	5	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80	Persen
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov 5 Kab/Kota	Pemerintah daerah
	2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	65	Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
	3	Persentase Kelompok Kerja Bangga Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemda Provinsi Kab/Kota
	4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	Jalur (formal, nonformal dan informal)
	5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemerintah Daerah
	6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	157,0	Kampung KB
	Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	71,93	Persen

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2022		
	2	Indeks informasi metode KB ( <i>Method Information Index/ MII</i> )	74,7	Indeks
	3	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	57,17	Persen peserta KB
	4	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	23,3	Persen
	5	Persentase pelayanan KB pascapersalinan	24,4	Persen
	Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase <i>stakeholders/</i> pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	39,4	<i>stakeholders/</i> mitra
	2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65	Persen
	3	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	75,0	Persen
	4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	Kab/Kota
	5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan system Teknologi dan Informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100	Persen Wilayah Prov dan kab/kota
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	65	Persen
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan kebijakan Program Bangga Kencana di provinsi	1	Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Dukungan manajemen di provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan/002)	12	Bulan
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Indeks ZI WBK	79,0	Indeks

## B.2. Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2022

Tabel 2.2 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2022		
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak	4	Kab/Kota
	2	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	51.768	Keluarga
	3	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	4	Kab/Kota
	4	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	292 151	PIK Remaja BKR
	5	Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	4	Kab/Kota
	6	PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan	1	PPKS
	7	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	4	Kab/Kota
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
	1	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	1 5	Prov Kab/kota
	2	Cakupan koordinasi integrasi indikator program Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan daerah	1 5	Prov Kab/kota
	3	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	86	Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi
	4	Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	77	Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2022	
5	Cakupan fasilitasi pergerakan kelompok kerja Bangga Kencana Provinsi dan kab/kota	1	Prov
6	Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal	1 5	Prov Kab/kota
7	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 2	Prov Kab/kota
8	Presentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	1 4	Prov Kab/kota
9	Presentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	10	Presentase Mitra Kerja
Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase Rumah sakit yang pelayanan KB nya meningkat	30	Persen
2	Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	250	Tenaga kesehatan (kumulatif)
3	Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang kompeten	5	Provider
4	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus	4	Gerak
5	Persentase PUS dengan kehamilan resiko tinggi (4 terlalu)	47,60	Persen
6	Jumlah kab/kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB pascapersalinan	3	Kab/kota
7	Persentase Faskes teregister yang mendapatkan ketersediaan Alokasi MKJP	82,14	Persen
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			



NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2022
1	MoU/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di BKKBN	32 MoU/PKS (kumulatif)
2	Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas Utuh	41 Dinas utuh (non kumulatif)
3	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	3 Kab/Kota
4	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	4 Kab/kota
5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	4 Frekuensi
6	Presentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advokasi	50% Tim Persen Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & kab/kota)
7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Program Bangga Kencana di Wilayah Binaan	12 Frekuensi kegiatan
8	Cakupan pembinaan IMP dan mekanisme operasional lini lapangan dalam penguatan pelayanan Program Bangga Kencana bagi masyarakat	5 Kab/kota
9	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	70 Persen
10	Cakupan pengelolaan data dan informasi Program Bangga Kencana	5 Kab/Kota
11	Cakupan kualitas Layanan Jaringan STIK dan penyebarluasan informasi	5 Kab/Kota
Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Jumlah Tenaga Program yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	253 Orang
2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan	3 Dokumen
3	Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi	1 Orang

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2022	
4	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal nasional	1 Laporan	
5	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal internasional	1 Laporan	
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi		
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala)	12 Bulan
	2	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 Persen
	3	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	100 Persen
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"	100% TDP Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai" 80% TPS

### C. Program Prioritas dan Rencana Kerja Tahun 2023

Program prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023 sebagai berikut :

*Tabel 2.3 Program Prioritas Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun 2023*

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi	
	1	Persentase keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	304 PIK Remaja 161 BKR

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023	
3	Jumlah kelompok BKL yang melaksanakan 7 (tujuh) dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia	143	Kelompok BKL
4	Jumlah keluarga yang mengakses PPKS	942	Keluarga
5	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	90	Persen
Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov 5 Kab/Kota	Pemerintah daerah
2	Persentase Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	72	Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
3	Persentase Kelompok Kerja Bangga Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemda Provinsi Kab/Kota
4	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3	Jalur (formal, nonformal dan informal)
5	Persentase pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 Prov 2 Kab/Kota	Pemerintah Daerah
6	Persentase Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	158,0	Kampung KB
Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP	78,47	Persen
2	Indeks informasi metode KB ( <i>Method Information Index/ MII</i> )	76,5	Indeks
3	Persentase kesertaan KB di kabupaten/kota dengan kesertaan rendah	57,33	Persen peserta KB
4	Persentase kehamilan yang tidak diinginkan	22,8	Persen
5	Persentase pelayanan KB pascapersalinan	27,4	Persen
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi			
1	Persentase <i>stakeholders/</i> pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	41,8	<i>stakeholders/</i> mitra
2	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	70	Persen
3	Persentase penyuluh KB yang berkinerja baik	80,0	Persen
4	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5	Kab/Kota

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023	
	5	Persentase cakupan perangkat dan jaringan system Teknologi dan Informasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	100 Persen Wilayah Prov dan kab/kota
	Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Persentase peserta diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	75 Persen
	2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan kebijakan Program Bangga Kencana di provinsi	1 Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi		
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Dukungan manajemen di provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan/002)	12 Bulan
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Indeks ZI WBK	82,0 Indeks

c.2. Rencana Kerja Tahunan pada tahun 2023

Tabel 2.4 Rencana Kerja Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta Tahun 2023

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023	
22	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, kependudukan , dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi		
	Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan pengasuhan dalam rangka pembentukan karakter anak	4 Kab/Kota
	2	Jumlah keluarga yang memiliki baduta yang terpapar promosi 1000 HPK	51.768 Keluarga
	3	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	4 Kab/Kota
	4	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang melaksanakan edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu	304 PIK Remaja 161 BKR
	5	Kabupaten/kota yang mendapat pembinaan dalam pelaksanaan Bina Keluarga Lansia (BKL)	4 Kab/Kota
	6	PPKS yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga rentan	1 PPKS
	7	Kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan dalam pemberdayaan ekonomi keluarga	4 Kab/Kota
	Bidang Dalduk Perwakilan BKKBN Provinsi		

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023
1	Cakupan pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Penyusunan Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)	1 Prov 5 Kab/kota
2	Cakupan koordinasi integrasi indikator program Bangga Kencana dalam kebijakan pembangunan daerah	1 Prov 5 Kab/kota
3	Cakupan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah terbentuk dan diregistrasi	91 Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi
4	Cakupan fasilitasi pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	86 Persen Rumah Data Kependudukan di Kampung KB
5	Cakupan fasilitasi pergerakan kelompok kerja Bangga Kencana Provinsi dan kab/kota	1 Prov
6	Jumlah fasilitasi ke pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pengimplementasian kerjasama pendidikan kependudukan melalui 3 jalur pendidikan yaitu formal, nonformal dan informal	1 Prov 5 Kab/kota
7	Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan sistem peringatan dini pengendalian penduduk	1 Prov 2 Kab/kota
8	Presentase Pemerintah Daerah yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	1 Prov 4 Kab/kota
9	Presentase mitra kerja yang mendapatkan fasilitasi pembinaan penanganan terpadu isu kependudukan di Kampung KB bersama mitra kerja	13 Presentase Mitra Kerja
Bidang KB-KR Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Persentase Rumah sakit yang pelayanan KB nya meningkat	40 Persen
2	Jumlah Tenaga Pelayanan mendapatkan fasilitasi kompetensi (Kumulatif)	281 Tenaga kesehatan (kumulatif)
3	Peningkatan Jumlah Provider Vasektomi yang kompeten	6 Provider
4	Jumlah Pelayanan KB dan KR Bergerak/Bakti Sosial di wilayah dan sasaran khusus	5 Gerak
5	Persentase PUS dengan kehamilan resiko tinggi (4 terlalu)	45,60 Persen

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET 2023
6	Jumlah kab/kota dengan PKB/PLKB yang puskesmas di wilayahnya melayani KB pascapersalinan	4 Kab/kota
7	Persentase Faskes teregister yang mendapatkan ketersediaan Alokasi MKJP	85,41 Persen
Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	MoU/PKS yang ditindaklanjuti unit kerja di BKKBN	34 MoU/PKS (kumulatif)
2	Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kab/Kota yang berbentuk Dinas Utuh	43 Dinas utuh (non kumulatif)
3	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana sesuai segmentasi, sasaran dan wilayah	3 Kab/Kota
4	Penyebarluasan materi KIE Program Bangga Kencana dalam rangka penurunan <i>unmet need</i>	4 Kab/kota
5	Jumlah pemanfaatan sarana dan media KIE Program Bangga Kencana	4 Frekuensi
6	Persentase Tim Advokasi Terpadu Lintas Sektor Program Bangga Kencana yang melakukan advokasi	60% Tim Advokasi Provinsi dan Kab/Kota (3 Tim dari 6 Provinsi & kab/kota)
7	Frekuensi pembinaan Kinerja Penyuluh KB dalam pelaksanaan tupoksi dalam mengelola Program Bangga Kencana di Wilayah Binaan	12 Frekuensi kegiatan
8	Cakupan pembinaan IMP dan mekanisme operasional lini lapangan dalam penguatan pelayanan Program Bangga Kencana bagi masyarakat	5 Kab/kota
9	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pembinaan kesertaan ber-KB dalam upaya menurunkan DO	75 Persen
10	Cakupan pengelolaan data dan informasi Program Bangga Kencana	5 Kab/Kota
11	Cakupan kualitas Layanan Jaringan STIK dan penyebarluasan informasi	5 Kab/Kota
Bidang Latbang Perwakilan BKKBN Provinsi		
1	Jumlah Tenaga Program yang mengikuti Pendidikan/Pelatihan	253 Orang
2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Program Bangga Kencana yang dilaksanakan	3 Dokumen
3	Jumlah pemakalah di pertemuan ilmiah eksternal instansi	1 Orang


NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)		TARGET 2023
	4	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal nasional	1 Laporan
	5	Jumlah publikasi karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana pada jurnal internasional	1 Laporan
31	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi		
	Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum dan Ortala)	12 Bulan
	2	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan	100 Persen
	3	Realisasi penyediaan layanan operasional dan pemeliharaan kantor	100 Persen
	Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi		
	1	Temuan eksternal dan internal yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"	100% TDP 85% TPS Temuan yang ditindaklanjuti dan dinyatakan "selesai"

#### D. Perjanjian Kinerja

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN No 104/KEP/B1/2019 tentang Perjanjian Kinerja Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2022.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 memuat sasaran kinerja, indikator kinerja dan target indikator kinerja dengan rincian terlampir pada laporan ini.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

REVISI				
 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA				
NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82 Rata-rata anak per Wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	57,18 %
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,50 %
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,36 (Skala 0-100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23 Tahun
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.056 Keluarga
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	292 PIK Remaja & 151 BKR
		3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	926 Keluarga
		4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80 %
		5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota
		6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	65 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB

## E. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Sasaran Program

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program Bangga Kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin.

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta melakukan monitoring dan evaluasi kinerja melalui :

### a. RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program)

Kegiatan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan setiap bulan sekali dengan penyesuaian bentuk kegiatan karena pandemi covid-19. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program dilaksanakan dengan tatap muka dan virtual meeting serta dilakukan secara bergiliran ke kabupaten kota serta di kantor Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta. Peserta kegiatan



Rapat Pengendalian Program adalah seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta, perwakilan dari OPD KB kabupaten kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB.

Pada kegiatan rapat pengendalian program dilaporkan hasil pelaksanaan kinerja, baik tentang capaian program maupun keuangan, setiap bulan sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku. Sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan dalam melaporkan capaian program adalah Sub Sistem Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) serta Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon). Sedangkan untuk laporan keuangan menggunakan data dari F/II/Keu dan F/V/KB untuk persediaan alat kontrasepsi.

Melalui kegiatan rapat pengendalian program ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota sehingga dapat diketahui hambatan yang dialami di setiap wilayah untuk kemudian dapat menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

#### b. RAKORDA (Rapat Koordinasi Daerah)

Rapat Koordinasi Daerah diadakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mewujudkan penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama dalam penentuan sasaran program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

#### c. Review / Telaah Program Bangga Kencana

Review / Telaah merupakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap semester. Forum ini melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam

pertemuan ini diketahui perkembangan capaian kinerja sampai dengan semester I dan juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja tersebut. Dalam forum ini selain evaluasi capaian Program juga untuk menggalang komitmen dari pelaksana Program KKBPK dan mitra kerja berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja/ capaian Program sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

d. Evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Pada kegiatan Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta yang mendukung pencapaian indikator kinerja dan sasaran strategis program Bangga Kencana terdapat target kinerja bulanan yang disusun untuk mengontrol pencapaian target kinerja dalam satu tahun. Dengan penetapan target bulanan maka Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta dapat membuat strategi pelaksanaan program supaya apa yang menjadi target kinerja dapat tercapai. Monitoring bulanan perlu dilakukan supaya apabila terdapat permasalahan atau kendala di tengah jalan maka segera bisa dicarikan pemecahan masalahnya. Monitoring dan evaluasi tersebut dapat dilihat di <https://yogya.bkkbn.go.id/rapk/>

e. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program Bangga Kencana melalui e-monev Bappenas dan SMART Kemenkeu

e-monev adalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Bappenas. Aplikasi ini mempermudah pemantauan dan evaluasi serta melaporkan hasil capaian dari kegiatan Program Bangga Kencana yang telah dilakukan. Output/capaian diinput ke aplikasi ini sebulan sekali. Melalui aplikasi ini, Bappenas juga dapat ikut memantau pencapaian Program Bangga Kencana terutama kegiatan proyek Pro PN. Hal ini diperlukan agar Bappenas dapat mengikuti perkembangan pelaksanaan proyek Pro PN dan juga mengambil langkah-langkah apabila terjadi keterlambatan/kendala.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA BKKBN

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Pada bab ini akan dibahas hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2022.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan skala pengukuran kinerja sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan melalui Surat Sekretaris Utama omor 458/RC.06/B1/2019 sebagai berikut :

*Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja*

No	Nilai Capaian (Persen)	Skala Pengukuran	Status Capaian
1	≥ 90	Sangat Baik	Hijau 
2	80 – 89	Baik	Biru 
3	70 – 79	Cukup	Kuning 
4	< 70	Kurang	Merah 

#### 1) Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Program/Kegiatan Unit Kerja

*Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022*

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1.82	1.93	93.96%	PEMUTAKHIRAN PK 22

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSentase CAPAIAN	SUMBER DATA
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	57.18	57.10	99.86%	PEMUTAKHIRAN PK 22
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (Unmet Need)	14.50	17.20	81.38%	PEMUTAKHIRAN PK 22
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14.00	9.60	131.43%	PEMUTAKHIRAN PK 22
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65.36	59.42	90.91%	PEMUTAKHIRAN PK 22
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23.00	23.20	100.87%	PEMUTAKHIRAN PK 22
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di seluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45,056	40,580	90.07%	SIGA
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	292 & 151	292 & 151	100.00%	SIGA
		3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	926	1,804	194.82%	SIGA
		4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80.00	100.00	125.00%	SIGA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSentase CAPAIAN	SUMBER DATA
		5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 & 5	1 & 5	100.00%	e-Monev
		6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	65.00	75.00	115.38%	e-Monev
		7	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 & 2	1 & 5	200.00%	e-Monev
		8	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3.00	3.00	100.00%	e-Monev
		9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 & 2	1 & 5	200.00%	Siperindu
		10	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	157.00	158.00	100.64%	e-Monev
		11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	71.93	99.15	137.84%	e-Monev
		12	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	74.69	54.94	73.56%	PEMUTAKHIRAN PK 22
		13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57.17	58.81	102.87%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSentase CAPAIAN	SUMBER DATA
		14	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	23.30	11.80	149.36%	PEMUTAKHIRAN PK 22
		15	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	24.41	20.25	82.96%	e-Monev
		16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	22.00	22.00	100.00%	e-Monev
		17	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65.00	65.00	100.00%	e-Monev
		18	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	75.00	75.00	100.00%	e-Monev
		19	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5.00	5.00	100.00%	SIGA
		20	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.00	84.62	84.62%	e-Monev
		21	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.	1 & 2	1 & 5	200.00%	e-Monev
		22	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	56.722	56.722	100.00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSentase CAPAIAN	SUMBER DATA
		23	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	443	443	100.00%	e-Monev
		24	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143	143	100.00%	e-Monev
		25	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	15	15	100.00%	e-Monev
		26	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	62	62	100.00%	e-Monev
		27	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	5	5	100.00%	e-Monev
		28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi	377	377	100.00%	e-Monev
		29	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	5	5	100.00%	e-Monev
		30	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2	2	100.00%	e-Monev
		31	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi	5	5	100.00%	e-Monev

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSentase CAPAIAN	SUMBER DATA
			Intensifikasi pelayanan KB di faskes				
		32	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6	6	100.00%	e-Monev
		33	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	1	1	100.00%	e-Monev
		34	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	1	1	100.00%	e-Monev
		35	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1	1	100.00%	e-Monev
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	65	96.00	147.69%	e-Monev
		2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi	1	1.00	100.00%	e-Monev
		3	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5,559	5,559.00	100.00%	e-Monev



NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	CAPAIAN 2022	PERSENT ASE CAPAIAN	SUMBER DATA
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12	12.00	100.00%	e-Monev
		2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1	1.00	100.00%	e-Monev
		3	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1	1.00	100.00%	e-Monev
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK	79	84.52	106.99%	Sizuka
		2	Jumlah Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	1	1.00	100.00%	e-Monev

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

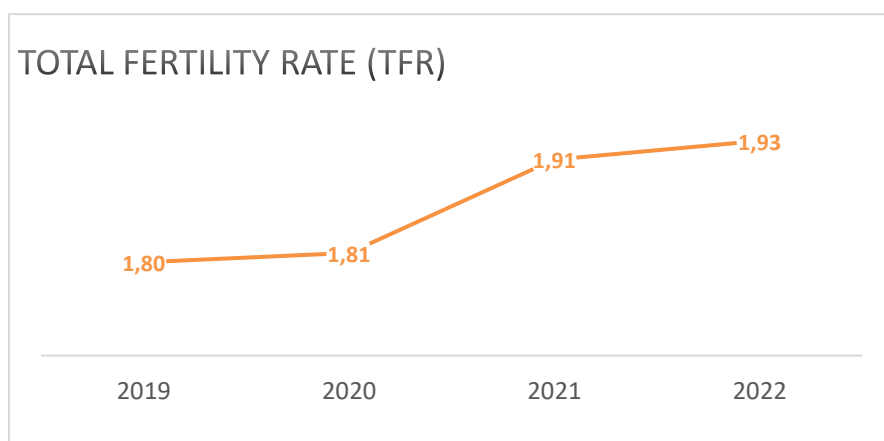
Pada indikator Angka Kelahiran Total (*TFR*) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 93,96% dari target *TFR* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebesar 1,82. Sesuai Data Pendataan Keluarga (PK) 2022, angka *TFR* tahun 2022 tercapai sebesar 1,93.

Menurut Buku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Keluarga Berencana Tahun 2017, nilai ambang batas *TFR* yang ditoleransi

adalah antara 1,8 sampai 2,2. Berdasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai TFR ideal sejak tahun 1991 (nilai TFR adalah 2,04) dan itu berjalan sampai sekarang di 2022 (nilai TFR adalah 1,93). Ini menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun kondisi TFR di DIY telah ideal. Hal ini menunjukkan program Banggakencana mampu diimplementasikan dengan baik di DIY sehingga TFR dapat dipertahankan dalam angka ideal, tetapi tetap perlu diwaspadai adanya trend kenaikan angka capaian TFR.

Capaian TFR DIY ini adalah terendah secara nasional. Di satu sisi DIY telah berhasil melampaui capaian TFR nasional di Tahun 2022 sebesar 2,14 akan tetapi hal ini juga bisa menjadi ancaman bagi keadaan penduduk tumbuh seimbang. Tantangan yang ada adalah bagaimana kita dapat menjaga TFR ini pada kisaran ideal tanpa membiarkan angka TFR ini turun terlalu rendah. TFR yang terlalu rendah jika dibiarkan maka akan mencapai *point of no return*, dimana TFR akan sangat sulit untuk dinaikkan kembali sehingga proporsi penduduk di masa depan akan didominasi oleh lansia dan pra lansia, serta kekurangan generasi muda dan usia produktif. Apabila dibandingkan dengan target Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2024, capaian kinerja untuk TFR sebesar 103,76%. Dengan melihat capaian TFR DIY dari tahun 2021 maka ada kecenderungan TFR mengalami kenaikan.

Gambar 3.1 Grafik Perkembangan TFR



Sejak tahun 2019 trend Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun) terlihat masih fluktuatif. Dimana TFR mengalami sedikit kenaikan walaupun tidak signifikan dan masih bisa dikatakan stabil. Angka TFR saat ini berkisar 1,91-1,8 masih dalam kondisi ideal, tetapi tetap harus diwaspadai terjadinya kenaikan kembali berdasarkan trend sebelumnya. Melihat kondisi tersebut perlu adanya upaya yang lebih untuk menjaga TFR tetap pada kondisi ideal. Diantaranya perlu mempertajam sasaran program terutama kepada PUS usia muda yang masih memiliki masa reproduksi panjang.

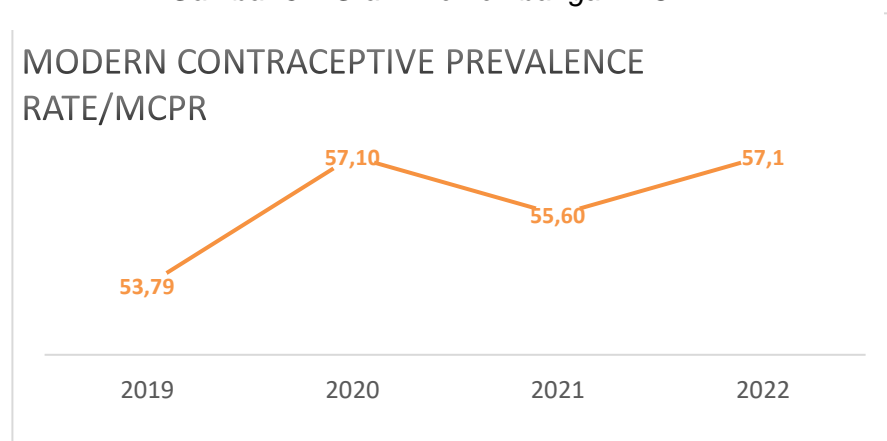
## 2. Persentase Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (*mCPR*)

Berdasarkan data Pendataan Keluarga (PK) 2022 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase *mCPR* sebesar 57,10% dari total PUS yang ada. Pencapaian *mCPR* ini belum dapat memenuhi target KKP yang ditetapkan sebesar 57,18%. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh masih banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional, karena secara umum CPR naik namun rendah pada *mCPR*.

Advokasi penggunaan alat kontrasepsi modern pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi harus ditingkatkan karena pada sasaran ini yang merupakan penyumbang besar pengguna kontrasepsi tradisional.

Angka *mCPR* DIY masih dibawah capaian nasional, yaitu 57,10% untuk angka DIY dan 59,40% untuk angka nasional. Ini menjadi tantangan bagi Perwakilan BKKBN DIY untuk menetapkan strategi yang sesuai dengan kondisi DIY.

Gambar 3.2 Grafik Perkembangan *mCPR*



Persentase mCPR di DIY pada tahun 2020 sempat mengalami kenaikan sebesar 3,31% atau dari 53,79% di tahun 2019 menjadi 57,10% dari jumlah PUS yang ada. Akan tetapi pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan sebesar 1,5% atau menjadi 55,60%. Kemudian di tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 58,50%. Persentase tersebut masih dibawah target yang ditetapkan pada tahun 2022. Menyikapi hal tersebut diperlukan upaya-upaya yang *out of the box* untuk dapat meningkatkan persentase mCPR ini sebab trend dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan yang kecil bahkan tampak menurun di tahun 2021. Fokus kegiatan lebih diarahkan pada WUS usia muda dengan Pendidikan tinggi dan perlu juga pengembangan metode KIE yang berbeda dan terfokus pada sasaran serta meningkatkan kerja sama dengan stakeholder terkait dengan penyusunan kebijakan daerah tentang pelayanan KB Pasca Persalinan.

### 3. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)

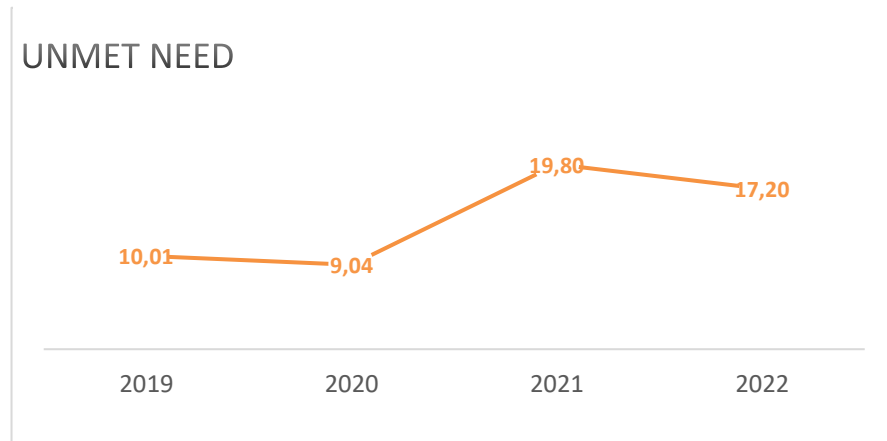
Pada tahun 2022 berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2022, Persentase Unmet need di DIY sebesar 17,20%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY belum dapat mencapai target KKP yang ditetapkan sebesar 14,50%. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian unmet need KB.

Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Sehingga perlu adanya peningkatan promosi, KIE juga advokasi tentang penggunaan alat kontrasepsi modern terutama pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi.

Namun demikian jika melihat dari tahun ke tahun, angka capaian yang terlalu jauh dengan target yang ditetapkan maka diperlukan untuk meninjau kembali penetapan target unmet need tersebut. Di tahun 2022 dilakukan penyesuaian target untuk unmet need ini sehingga capaian unmet need di tahun 2022 tidak terlalu jauh selisihnya dengan target DIY, meskipun begitu capaian unmet need di DIY tahun 2022 tetap tidak tercapai.

Sedangkan untuk capaian nasional sebesar 14,70%, lebih baik dari capaian unmet need DIY

Gambar 3.3 Grafik Perkembangan Unmet Need



Indikator persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) tampak terjadi penurunan pada tahun 2020 namun pada tahun 2021 ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 10,76%. Fenomena *unmet need* KB bersifat multidimensial karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti umur ibu, pendidikan, preferensi gender anak, pendapatan, pekerjaan, agama, pengetahuan mengenai kontrasepsi, komunikasi dengan pasangan, akses terhadap media dan tempat tinggal. Selain itu karakteristik demografi, sosial ekonomi, sikap, akses dan kualitas pelayanan juga merupakan faktor yang erat kaitannya dengan capaian *unmet need* KB.

Salah satu alasan utama kebanyakan orang tidak ingin ber-KB adalah masalah kesehatan dan takut efek samping serta komunikasi dengan pasangan. Oleh sebab itu, upaya penurunan *unmet need* KB harus mempertimbangkan berbagai faktor tersebut. Informasi tentang pelayanan KB yang tidak terpenuhi digunakan untuk menilai sejauh mana program KB telah dapat memenuhi kebutuhan KB di kalangan PUS yang menginginkan untuk ber KB. Apabila program dapat memenuhi kebutuhan KB, diharapkan angka prevalensi KB dapat meningkat dan kelompok *unmet need* KB akan semakin berkurang.

4. Angka Kelahiran Pada Remaja (*ASFR* 15-19 tahun)

*ASFR* 15-19 tahun di DIY pada tahun 2022 adalah 9,60 angka ini 5 point lebih kecil dari target yang ditetapkan sebesar 14 atau tercapai sebesar 141,43%. Hal tersebut menggambarkan bahwa program Genre sudah berjalan baik di DIY sehingga dapat menekan angka kelahiran pada usia remaja. Salah satunya dengan pembinaan kelompok PIK secara berkala, baik pada jalur masyarakat maupun jalur pendidikan.

*ASFR* (*Age Specific Fertility Rate*) 15-19, atau Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 tahun di DIY tercapai pada 9,60 kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun tergolong sangat baik untuk ukuran nasional. Capaian nasional *ASFR* 15-19 tahun di angka 22,80, jauh dibawah capaian DIY.

5. Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*)

Berdasarkan data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2022 Indeks Pembangunan Keluarga (*iBangga*) DIY tahun 2022 adalah sebesar 59,42. Angka menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 90,91% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 65,36. Terbatasnya komunikasi antar anggota keluarga berpengaruh dalam rendahnya nilai indeks kebahagiaan yang merupakan salah satu indeks dalam *iBangga*. Hal tersebut dikarenakan pada era pandemi mewajibkan segala aktivitas dilakukan di rumah sehingga setiap anggota keluarga disibukkan dengan aktivitas masing-masing (dihapus). Melihat kondisi tersebut diperlukan untuk menggaungkan kembali pentingnya 8 fungsi keluarga kepada masyarakat melalui peningkatan advokasi dan KIE Program Bangga Kencana.

Dibandingkan dengan capaian nasional, capaian *iBangga* DIY masih lebih baik, hal ini disebabkan karena karakter keluarga di DIY cenderung lebih berbeda apabila dibandingkan dengan karakter secara nasional.

6. Median Usia Kawin Pertama

Median usia kawin pertama DIY Tahun 2022 sebesar 23,20 yang berarti sudah dapat mencapai 100,87% dari target yang ditetapkan sebesar 23. Hal tersebut didukung oleh keberhasilan program Genre di DIY melalui kampanye Triad KRR bagi remaja. Meskipun demikian masih butuh

penekanan pada sosialisasi tentang pendewasaan usia perkawinan bagi remaja di DIY.

Capaian MUKP DIY Tahun 2022 ini lebih baik dari capaian nasional yang berada pada angka 21.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian dari Tahun 2020 sampai 2022

NO	INDIKATOR KINERJA	2020			2021			2022		
		TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%	TARGET	CAPAIAN	%
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1,92	1,81	105,73%	1,90	1,91	99,47%	1,82	1,93	93,96%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	62,01	57,1	92,08%	62,40	55,60	89,10%	57,18	57,10	99,86%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	5,74	9,04	42,51%	5,62	19,80	-152,31%	14,50	17,20	81,38%
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	17	14	117,65%	16,00	9,10	143,13%	14,00	9,60	131,43%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	61,43	68,48	111,48%	63,07	57,41	91,03%	65,36	59,42	90,91%
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23	22	95,65%	23,00	22,90	99,57%	23,00	23,20	100,87%
7	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323	267	82,66%	235	268	114,04%	377,00	377,00	100,00%
8	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	51.768	51.768	100,00%	51.768	51.768	100,00%	56.722,00	56.722,00	100,00%
9	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418	418	100,00%	422	422	100,00%	443,00	443,00	100,00%

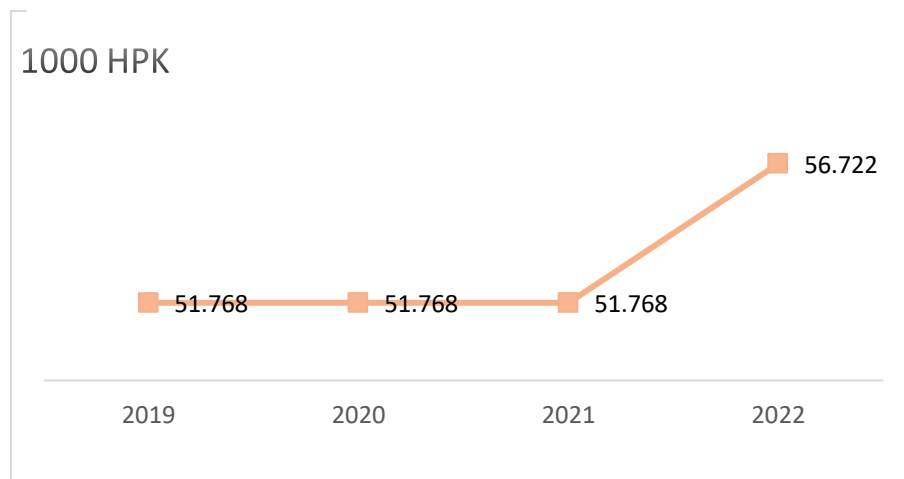
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY dengan capaian nasional

NO	INDIKATOR KINERJA	2022			2022	
		TARGET	CAPAIAN	%	CAPAIAN NAS	%
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82	1,93	93,96%	2,14	90,19%
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	57,18	57,10	99,86%	59,40	96,13%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	14,50	17,20	81,38%	14,70	117,01%
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	14,00	9,60	131,43%	22,80	42,11%
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,36	59,42	90,91%	56,07	105,97%
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	23,20	100,87%	21,00	110,48%

7. Jumlah Keluarga dengan Baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK

Pengetahuan Keluarga yang memiliki Baduta terpapar dalam pengasuhan 1000 HPK bagi 56.722 keluarga yang mempunyai baduta sebagai salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) sudah tercapai 100 %. Informasi dan edukasi tentang pengasuhan 1000 HPK yang disampaikan dalam bentuk cetak seperti buku pegangan kader, leaflet dan praktek penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) serta sosialisasi langsung oleh pakar/ *expert* dan juga para pemangku kepentingan. Dari aspek promotif, preventif penyampaian informasi dan edukasi pentingnya pengasuhan 1000 HPK juga disampaikan pada ibu hamil, ibu menyusui serta para tokoh agama maupun masyarakat, hal tersebut dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam upaya penyebaran ilmu dan informasi.

Gambar 3.4 Grafik fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK



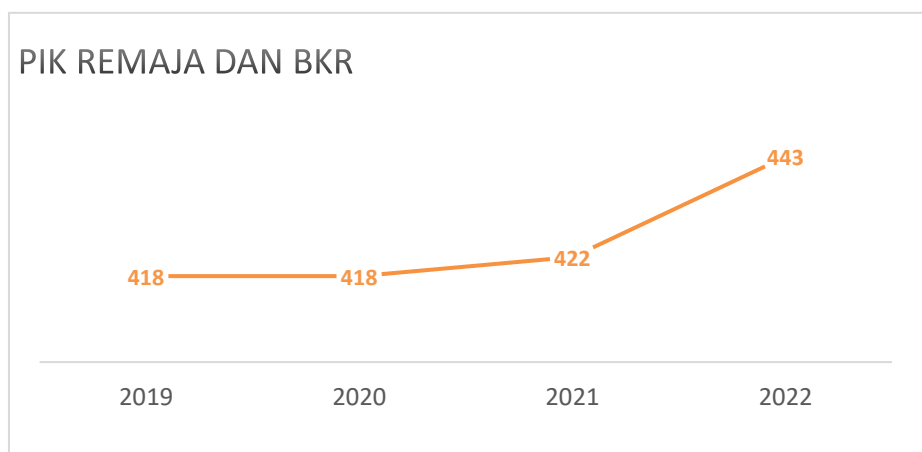
Indikator ini merupakan salah satu indikator dari kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN). Sejak tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu memberikan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK kepada 51.768 keluarga yang memiliki baduta. Guna mempercepat penurunan angka stunting terutama di DIY perlu dilakukan fasilitasi dan pembinaan tentang pengetahuan 1000 HPK terutama bagi ibu hamil dan keluarga yang memiliki baduta. Informasi dan edukasi tentang 1000 HPK disampaikan dalam bentuk cetak seperti buku pegangan kader, leaflet dan praktek penggunaan Kartu Kembang Anak (KKA) serta



sosialisasi langsung oleh pakar/ *expert* dan juga para pemangku kepentingan.

8. Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu  
Penguatan peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi remaja putri sebagai calon ibu, sebagai target Pro PN berikutnya, tercapai 100 %. Dengan pembagian sasaran PIK Remaja sebanyak 292 kelompok dan BKR sebanyak 151 kelompok sehingga total sasaran sebanyak 443 kelompok. Sebagian besar kegiatan remaja dilaksanakan secara *hybrid*, antara kehadiran secara fisik juga dihadiri secara virtual, hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya menegakkan protokol kesehatan covid-19 dan juga sebagai upaya optimalisasi anggaran. Kelompok PIK Remaja dan BKR mempunyai peran penting dalam penurunan angka stunting dikarenakan salah satu sasaran kelompok kegiatan tersebut adalah remaja putri sebagai calon ibu

Gambar 3.5 Grafik BKR dan PIK Remaja



Dari tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah memberikan fasilitasi dan pembinaan tentang edukasi kespro dan gizi bagi remaja putri kepada 418 kelompok kegiatan dan jumlah kelompok kegiatan tersebut mengalami kenaikan menjadi 443 kelompok di tahun 2022. Dengan semakin banyaknya kelompok kegiatan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan tersebut diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting di DIY.

Fasilitasi yang diberikan berupa pemberian modul “1001 Cara Bicara” untuk kelompok BKR dan modul “Tentang Kita” untuk kelompok PIK Remaja. Modul “1001 cara Bicara” berisi tentang cara-cara komunikasi efektif orangtua kepada remaja tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri. Sedangkan modul “Tentang Kita” berisi pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja putri sesuai dengan segmen usia (10-14 tahun; 15-19 tahun; 20-24 tahun). Selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada kelompok kegiatan tentang modul tersebut.

9. Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia

Indikator ini merupakan salah satu kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dan Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 143 kelompok. Kelancaran kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia tidak lepas dari adanya kerjasama dengan beberapa lintas sektor, termasuk Perguruan Tinggi (PT), yaitu Universitas Respati Yogyakarta. Kerjasama yang diwujudkan dengan PT adalah dalam bentuk kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas kader/ anggota kelompok BKL. Bersama Komda Lansia DIY, BKKBN juga ingin mewujudkan DIY yang ramah lansia

10. Jumlah Kampung KB Percontohan yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Merupakan salah satu indikator kegiatan Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan target sebanyak 5 (lima) Kampung KB Percontohan. Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target tersebut. Kegiatan yang dilakukan berupa Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga bagi keluarga Akseptor KB Lestari MKJP dan Keluarga Akseptor KB Mandiri MKJP di Kampung KB Percontohan secara komprehensif dan terintegrasi lintas sektor guna meningkatkan perekonomian keluarga.

Sasaran pelaksanaan kegiatan adalah keluarga akseptor KB Lestari MKJP dan keluarga akseptor KB Mandiri MKJP di Kampung KB Percontohan melalui kelompok UPPKA, yang terdiri dari Kampung KB Jasem, Bantul (Kelompok UPPKA Lestari), Kampung KB Kroco, Kulon Progo (Kelompok

UPPKA Mukti Migunani), Kampung KB Sengir, Sleman (Kelompok UPPKA Binakarya), Kampung KB Karangmiri, Gunungkidul (Kelompok UPPKA Anggrek) dan Kampung KB Rejowinangun 08, Kota Yogyakarta (Kelompok UPPKA Rewina).

Fasilitasi yang diberikan kepada kelompok UPPKA tersebut antara lain Pemberian Buku Materi (Buku Motivasi Ketahanan Ekonomi Keluarga, Buku 8 Langkah Tingkatan Penghasilan Ekonomi, Flipchart Pengelolaan Keuangan Keluarga), Pembelajaran dan Bimbingan yang berkaitan dengan usaha dan Pemberian bantuan sarana/alat pendukung produksi (Spinner, Vacuum Sealer, Alat Prespati dan Mixer)

#### 11. Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan

Sebagai salah satu kegiatan dari Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan memberikan fasilitasi dan pembinaan pada 62 (enam puluh dua) Rumah Data Kependudukan (RDK) Paripurna di Kampung KB. Dari target tersebut Perwakilan BKKBN DIY mampu mencapai 100% target.

Sebagian RDK tersebut adalah Rumah Data Kependudukan Wedomartani, Ngemplak, Sleman; Rumah Data Kependudukan Jasem, Srimulyo, Piyungan, Bantul; RumahData Kependudukan Prawirodirjan Kota Yogyakarta; Rumah Data KependudukanKedungsari, Pengasih, Kulon Progo; Rumah Data Kependudukan Dadapayu, Semanu, Gunungkidul; dan Rumah Data Kependudukan Potorono, Banguntapan, Bantul. Pembinaan yang dilakukan antara lain peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengelola rumah data kependudukan.

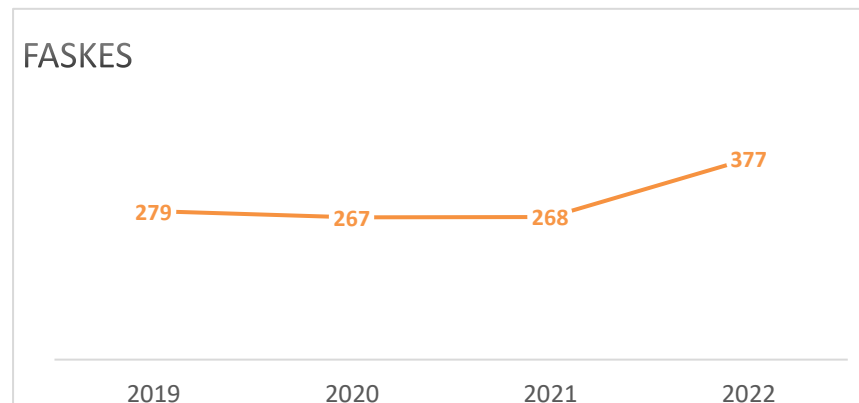
#### 12. Pemenuhan Ketersediaan Alkon di Faskes

Salah satu target kinerja yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah Fasilitas Kesehatan (Faskes). Sasaran Kinerja tersebut adalah Terpenuhinya Ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) di Fasilitas Kesehatan (Faskes), dengan Indikator Kinerja jumlah faskes yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) sebanyak 377 Faskes.

Berdasarkan laporan e-Monev, dari sebanyak 377 faskes yang ditargetkan, pada tahun 2022 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu memenuhi ketersediaan alokon di 377 Faskes (yang terdiri dari Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik Swasta, Dokter Keluarga, dan Praktik Mandiri Bidan yang setara dengan Faskes). Dengan demikian, capaian untuk sasaran kinerja tersebut telah tercapai.

Salah satu tugas pokok dari BKKBN adalah menyediakan alat/obat kontrasepsi (alokon). Dimana alokon tersebut didistribusikan ke fasilitas kesehatan agar dapat digunakan untuk pelayanan KB

*Gambar 3.6 Grafik Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)*



Pada tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah menyalurkan alokon ke 279 faskes. Faskes yang mendapatkan alokon tersebut adalah faskes yang telah terdaftar dalam databasis (K/O/KB) dan juga telah berjejaring dengan BPJS. Namun pada tahun 2020 dan 2021 jumlah faskes mengalami penurunan menjadi 267 dan 268 faskes hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa faskes yang menjadi jejaring dari puskesmas sehingga distribusi alokon dilakukan ke puskesmas tersebut. Meskipun demikian, alokon tetap terdistribusi sampai ke faskes jejaring tersebut.

## 2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2022 dengan Jangka Menengah 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	CAPAIAN 2022	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	1,83	1,93	94,54%	Diperkirakan tercapai
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR</i> )	63,67	57,18	89,81%	Diperkirakan tercapai
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	19,23	17,20	110,56%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	12,00	9,60	120,00%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
5	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	69,95	59,42	115,05%	Sesuai Jalur Untuk Dipertahankan
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun	23,00	23,20	99,13%	Diperkirakan tercapai

Dari capaian diatas diperoleh gambaran bahwa terdapat 5 (lima) indikator renstra yang sudah berjalan sesuai jalur dan diperkirakan tercapai. Namun ada 1 (satu) indikator, yaitu *Unmet Need*, yang perlu untuk ditinjau kembali penetapan targetnya karena capaian indikator tersebut sangat jauh dari target serta masih memerlukan upaya dan strategi yang lebih kuat untuk mencapai target di tahun 2024.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- a. Dukungan berbagai pihak yang menjadi mitra pelaksanaan Program Bangga kencana di Daerah Istimewa Yogyakarta
- b. Tingginya komitmen dan perhatian dari stakeholder maupun masyarakat dalam menerima Sosialisasi Program Bangga kencana

- c. Adanya Perda Ketahanan Keluarga tahun 2018 sebagai rujukan bahwa pelaksanaan program ketahanan keluarga dilaksanakan dengan lintas sektor
- d. Adanya kampung KB sebagai miniatur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program Bangga kencana
- e. Adanya anggaran desa sebagai salah satu pendorong keberlangsungan program Bangga kencana di tingkat wilayah

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Program Bangga kencana di DIY antara lain :

- a. Belum optimalnya pemanfaatan media dalam advokasi dan KIE.
- b. Sosialisasi dan promosi program Bangga kencana belum semuanya terfokus pada sasaran
- c. Kurangnya sinergitas program dan anggaran dengan mitra kerja terkait atau pengelola program dari tingkat provinsi hingga tingkat wilayah dalam melakukan pembinaan program Bangga kencana

## **B. REALISASI ANGGARAN**

### **B.1. Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY**

Pagu awal anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam DIPA Nomor: SP DIPA-068.01.2.017972/2022 tanggal 17 November 2021 adalah sebesar Rp 63.738.158.000,-. Selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta telah mengalami perubahan pagu anggaran sebanyak 5 kali. Perubahan pagu anggaran yang pertama dilakukan berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 324/RC.04/B1/2022 tanggal 4 Februari 2022 perihal Revisi Pengalihan Anggaran SDKI dan Belanja Pegawai Jabatan Fungsional Peneliti ke BRIN TA 2022. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 63.738.158.000,- menjadi Rp 63.466.291.000,-.

Perubahan pagu anggaran yang kedua berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 501/KU.01/B3/2022 perihal Pergeseran Anggaran Belanja Barang Operasional TA 2022. Pergeseran anggaran belanja barang operasional ini terjadi pada Klasifikasi Rincian Output (KRO) Layanan

Pengawasan Internal. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 63.466.291.000,- menjadi Rp 63.351.981.000,-.

Perubahan pagu anggaran yang ketiga berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : 2116/I/RC.04/B1/2022 perihal Penyusunan Revisi untuk Tambahan Anggaran PBDKI, Buka Blokir Automatic Adjustment PBDKI dan Perbaikan Kode Blokir pada Automatic Adjustment Tahap II TA 2022. Pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 63.351.981.000,- menjadi Rp 65.664.808.000,-.

Perubahan pagu anggaran yang keempat berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor : S-453/AG.4/2022 tanggal 20 Oktober 2022 perihal Revisi Pemenuhan Kebutuhan Belanja Pegawai dan Realokasi Automatic Adjustment Belanja Pegawai BKKBN TA 2022, pagu anggaran Perwakilan BKKBN DIY yang semula Rp 65.664.808.000,- menjadi Rp 64.087.462.000,-.

Perubahan pagu anggaran yang kelima berdasarkan Surat Sekretaris Utama BKKBN Nomor : B-493/KU.01/B3/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Usulan Revisi Realokasi Anggaran Blokir Automatic Adjustment ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) BKKBN Tahun Anggaran 2022, pagu yang semula Rp 64.087.462.000,- menjadi Rp 62.974.194.000,-.

Realisasi penyerapan DIPA Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta TA 2022 adalah sebesar Rp 60.815.289.879 atau 96,57 persen dari pagu anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA. 2022 sebesar Rp 62.974.194.000,- Adapun realisasi anggaran Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta TA 2022 per jenis belanja adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2022  
per jenis belanja*

No	Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	42.754.721.000	40.637.854.668	95,05
2.	Belanja Barang	20.119.473.000	20.077.505.211	99,79
.3.	Belanja Modal	100.000.000	99.930.000	99,93
Jumlah		62.974.194.000	60.815.289.879	96,57

Sumber: OMSPAN

Pagu anggaran sebesar Rp 62.974.194.195,- tersebut terbagi ke dalam 2 (dua) program, dengan rincian sebagai berikut:

*Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Perwakilan BKKBN DIY TA. 2022 per program*

No	Program	Pagu Anggaran	Realisasi	%
1.	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	16.515.881.000,-	16.491.200.299,-	99,85
2.	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	46.458.313.000,-	44.324.089.580,-	95,41
Jumlah		62.974.194.000,-	60.815.289.879,-	96,57

Sumber: OMSPAN

- a. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa selama periode tahun 2022 alokasi anggaran terserap cukup baik meskipun belum 100 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran cukup digunakan secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan strategis dan sasaran strategis sesuai yang telah ditargetkan dalam Renstra tahun 2020-2024 dan ditetapkan setiap tahunnya dengan Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.



## **B.2. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pelaksanaan program Banggakencana selain menggunakan dana APBN yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta, juga menggunakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB melalui Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta. Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang KB dan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Sub Bidang KB (BOKB). Dengan adanya dukungan dari DAK Sub Bidang KB tersebut sangat membantu dalam pencapaian target kinerja di DIY.

Selain dukungan anggaran, pencapaian Program Bangga Kencana juga didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang ada di DIY baik ASN yang ada di Perwakilan BKKBN DIY maupun Penyuluh Keluarga Berencana. Pada tahun 2022 ini Perwakilan BKKBN DIY mempunyai pegawai sebanyak 289 orang dengan rincian ASN di Kantor Perwakilan BKKBN DIY sebanyak 102 orang dan Penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 187 orang. Dengan bergabungnya tenaga Penyuluh KB di Perwakilan BKKBN DIY sejak tahun 2017 memberi dampak positif terhadap pencapaian target kinerja di DIY. Hal ini terbukti dengan adanya trend meningkatnya persentase mCPR dan menurunnya tingkat unmet need di DIY. Meskipun capaian tersebut masih belum signifikan dan masih diperlukan inovasi lebih dari para Penyuluh KB guna mencapai target kinerja yang ada sehingga dapat mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang di DIY.

## **C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA**

Selain capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2022, juga terdapat beberapa capaian lainnya yang telah dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY sampai dengan Tahun 2022. Capaian tersebut antara lain :

## a. Juara Lomba – Lomba

### 1. Lomba Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)



Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2022, capaian sekolah yang telah melaksanakan SSK di DIY ada 55 sekolah, dan yang telah di tahap paripurna berjumlah 31 sekolah. Secara nasional telah memenuhi target renstra Ditpenduk 2020-2024 sebanyak 34.

Pada lomba tersebut DIY mampu memperoleh beberapa juara, yaitu Juara 1 Nasional Lomba SSK Tahun 2022 dan Juara 1 Tingkat Regional 1 Lomba SSK Tahun 2022 ( SMP Negeri 2 Pakem ) dan Juara 2 Tingkat Regional 1 Lomba SSK Tahun 2022 ( SMA Negeri 2 Wonosari ).

### 2. Juara II kategori PLKB non PNS Teladan tingkat nasional tahun 2022



Sri Rahayu, PLKB non PNS Bantul berhasil meraih juara kategori PLKB non PNS Teladan tingkat nasional tahun 2022 yang diselenggarakan oleh BKKBN Pusat. Lomba dimaksudkan untuk memberikan motivasi

kinerja bagi petugas di lini lapangan sekaligus mendapatkan penilaian hasil kinerja selama tahun 2022 yang terbaik di tingkat nasional.

Kegiatan Penilaian Teladan Lini Lapangan Program Bangga Kencana dan Penurunan Stunting tahun 2022 secara umum bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga lini lapangan yang saat ini merupakan bagian dari tim pendamping bagi keluarga berisiko stunting, meningkatkan pengetahuan Program Bangga Kencana dan implementasinya di lini lapangan. Secara khusus untuk peningkatkan pengembangan, kreatifitas, dan inovasi dalam pengelolaan dan pengembangan Program Bangga Kencana, penguatan komitmen pada seluruh pihak untuk bersama-sama mengembangkan, menjalankan, dan mengelola Program Bangga Kencana dan memberikan penghargaan kepada Petugas Lapangan KB Non PNS.

### 3. Juara 1 Nasional Pelayanan KB Sejuta Akseptor



Dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 ke-29 pada tanggal 15 Juni 2022, Perwakilan BKKBN DIY berhasil menjadi Juara Nasional Pelayanan KB Sejuta Akseptor kategori target 10.000 – 60.000, tercapai 224,33% dari target.

### 4. Juara 1 Nasional Pelayanan KB MKJP Sejuta Akseptor



Dalam rangka Hari Keluarga Nasional 2022 ke-29 pada tanggal 15 Juni 2022, Perwakilan BKKBN DIY berhasil menjadi Juara Nasional Pelayanan KB Sejuta Akseptor kategori Capaian KB MKJP dgn Target MKJP 1.500 – 5.000, sebesar 434,70% dari target.

## 5. Juara 1 Nasional lomba video pendek BKKBN



Dalam upaya menarik minat dan mengedukasi generasi muda tentang pentingnya kesehatan reproduksi, BKKBN mengadakan Lomba Video Pendek “Ajang Kespro Kawula Muda 2022”. Wakil dari Perwakilan BKKBN DIY atas nama Ananda Novi Adib

Nugraha berhasil meraih Juara 1 se-Indonesia.

## 6. Juara II *National Competition Learning Media Keluarga Keren Cegah Stunting*

Memperingati Hari Keluarga Nasional ke-29 tahun 2022, BKKBN dalam upaya terobosannya untuk meningkatkan pencegahan stunting pada seluruh keluarga



di Indonesia, mengadakan Lomba National Competition Learning Media Keluarga Keren Cegah Stunting.

Berkat koordinasi yang baik oleh Perwakilan BKKBN DIY bersama mitra kerja dan

dukungan segenap masyarakat DIY, maka Provinsi D.I. Yogyakarta berhasil menorehkan prestasi sebagai juara 2 besar Nasional dalam lomba ini.

## 7. Juara 3 PIK-R Percontohan Kategori Beraksi 2022



Pada Kegiatan Genre Award Tahun 2022, PIK R Asoka SMA Negeri 1 Wates, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil meraih Juara 3 PIK R Percontohan Kategori Beraksi.

## 8. Juara 2 Duta Genre Indonesia Puteri 2022



Pada Kegiatan Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreatifitas Genre Tingkat Nasional Tahun 2022, Duta Genre dari Daerah Isimewa Yogyakarta yaitu Marsella Septy Claudia Timmerman berhasil keluar sebagai

Juara 2 Duta Genre Indonesia Puteri 2022.

## 9. Juara 1 Dalduk Awards 2022



Dalduk Awards 2022 adalah Anugerah yang diberikan dari BKKBN Pusat Kepada Perwakilan BKKBN Provinsi terhadap Kinerja Terbaik Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2022. Perwakilan BKKBN DIY meraih Terbaik 1 Dalduk Awards 2022.

Adapun indikator Penilaian Anugerah Kinerja

Terbaik Bidang Pengendalian Penduduk Tahun 2022 meliputi : IPBK, Pokja Bangga Kencana Efektif (Prov dan Kab/ Kota), IKIK, SSK Paripurna, GDPK, RDK Paripurna, Siperindu, Kampung KB Mandiri, Realisasi Anggaran Dalduk Provinsi.

### b. Penghargaan

#### 1. Tertinggi Nasional Pelayanan KB dalam momentum TMMD ke-113



Pada tahun 2022, Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta mendapat penghargaan Tertinggi Tingkat Nasional atas Komitmen dan Dukungan terhadap Pelaksanaan Pelayanan KB Kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-113.

## 2. Apresiasi Kegiatan Pemutakhiran PEMUTAKHIRAN PK 22

Pelaksanaan Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 (PPK-22) dilaksanakan di 52 kecamatan dengan jumlah kalurahan sebanyak 223 kalurahan. Pelaksanaan PPK22 untuk DIY mendapatkan target sebanyak 747.200 dengan capaian 754.687 . Adapun hasil PK-22 DIY menduduki urutan 2 Nasional dengan capaian sebesar 101% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.8 PK DIY 2022

No	Kabupaten/ Kota	Target KK (BPS)	Capaian (Data Masuk)	% Capaian
1	GUNUNG KIDUL	64.857	131.652	202,99%
2	BANTUL	214.552	219.041	102,09%
3	KULON PROGO	77.848	73.200	94,03%
4	SLEMAN	291.104	258.185	88,69%
5	YOGYAKARTA	98.839	72.609	73,46%
<b>DIY</b>		<b>747.200</b>	<b>754.687</b>	<b>101,00%</b>



Dalam pelaksanaan pemutakhiran Pemutakhiran PEMUTAKHIRAN PK 22, Perwakilan BKKBN DIY mendapatkan apresiasi dengan kategori Strategi Pelaksanaan Terbaik. Adapun strategi yang

dilaksanakan oleh Perwakilan BKKBN DIY dalam mencapai target adalah dengan menambahkan jumlah lokus kecamatan yang awalnya sebanyak 47 kecamatan menjadi 52 kecamatan.



Selain itu Perwakilan BKKBN DIY juga mendapat apresiasi pada kategori Komitmen 100% Smartphone. Apresiasi tersebut didasarkan pada penggunaan smartphone



oleh seluruh kader pendata di DIY dalam melakukan Pemutakhiran Data PK 2022



Perwakilan BKKBN DIY juga mendapatkan apresiasi kategori Koordinator Bidang ADPIN Terbaik, dalam hal ini diberikan kepada Rohdhiana Sumatriati, S.Sos., M.Sc. Apresiasi tersebut diberikan kepada beliau

dikarenakan kemampuan beliau mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan termasuk dengan mengelola strategi untuk mencapai target, dimana pada akhirnya Perwakilan BKKBN DIY dapat memenuhi target KK dan target waktu serta mendapatkan peringkat 2 nasional dengan capaian 101%.

### c. Inovasi

#### 1. Sertifikasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

Berdasarkan data KPK dari tahun 2004 s.d tahun 2019, diketahui ada banyak jenis perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK, diantaranya sejumlah 602 perkara (65%) berupa penyuapan, 195 perkara (21%) terkait pengadaan barang dan jasa, sebanyak 47 perkara (5%) terkait

penyalahgunaan anggaran, 31 perkara (3%) terkait TPPU, 25 perkara (3%) terkait pungutan, 23 perkara (2%) terkait perizinan, dan 10 perkara (1%) terkait merintang proses KPK. Dari data tersebut diketahui prosentase



terbanyak perkara yang ditangani oleh KPK adalah terkait penyuaipan, meskipun pada kenyataannya Pemerintah telah banyak menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait penyuaipan dan tindak pidana korupsi. Masih dibutuhkan

penerapan sebuah sistem manajemen yang mampu untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani tentang penyuaipan. ISO 37001:2016 merupakan pedoman untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan meningkatkan sistem manajemen anti penyuaipan. Standar ini telah diadopsi oleh Pemerintah Indonesia melalui Bandar Standarisasi Nasional (BSN) menjadi SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaipan.

Kesesuaian dengan standar ini tidak menjamin penyuaipan tidak akan terjadi atau akan terjadi yang berkaitan dengan organisasi, karena risiko penyuaipan tidak mungkin dihilangkan secara total. Namun, dapat membantu organisasi menerapkan rancangan yang wajar dan proporsional untuk mencegah, mendeteksi, dan menanggapi penyuaipan. Sehingga diharapkan pada akhirnya seluruh pengelola Program Bangga Kencana dapat melaksanakan program sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud pengembangan manajemen anti penyuaipan ISO 37001:2016 ini adalah untuk menetapkan, menerapkan, memelihara, dan meningkatkan program anti penyuaipan di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY.



Tujuan dari penerapan manajemen anti penyuapan ISO 37001:2016 adalah agar setiap komponen pada Perwakilan BKKBN DIY mampu mendeteksi secara dini, mencegah, dan menangani risiko penyuapan.

Kegiatan Sertifikasi ISO 37001 dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap sosialisasi tanggal 11 sd 14 Juli 2022
2. Tahap internalisasi Bulan Agustus 2022
3. Tahap Penilaian tanggal 16 November 2022
4. Penyerahan Sertifikat tanggal 30 Desember 2022

Semua tahapan dilaksanakan secara hibryd (daring dan luring).

Pelaksanaan Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001 di Perwakilan BKKBN DIY tahun 2022 dilaksanakan bekerjasama dengan PT. GSI (Garuda Sertifikasi Indonesia) selaku pihak assessor terhadap kelayakan penerima Sertifikat ISO 37001:2016

## **2. Survey Kepuasan Masyarakat Berbasis Teknologi Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta**

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Nomor 6 tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), saat ini pemerintah tengah melakukan transformasi pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini sebagai wujud pelayanan publik yang harus selalu adaptif dan mengikuti perkembangan zaman. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memudahkan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan menciptakan transparansi dalam pelayanan maka Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta melakukan Survey Kepuasan Masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program pengelolaan aspirasi masyarakat ini berbasis web dan tersedia dalam versi mobile pada telepon genggam yang dapat diakses dan diolah kapanpun serta dimanapun. Melalui digitalisasi ini, proses penilaian

elayanan publik menjadi lebih efektif dan efisien sejak proses pengisian, pengolahan data, hingga seluruh proses monitoring dan evaluasi.

Program ini mendukung program Go Green dengan meninggalkan proses administrasi perkantoran yang sebelumnya dilakukan secara manual dengan menggunakan kertas.

Gambar 3.7 Tampilan Web Survey Kepuasan Masyarakat dan Hasilnya



### 3. Digital Office Mobile App Perwakilan BKKBN DIY

Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 dan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional RI Nomor 6 tahun 2019 dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi, maka Perwakilan

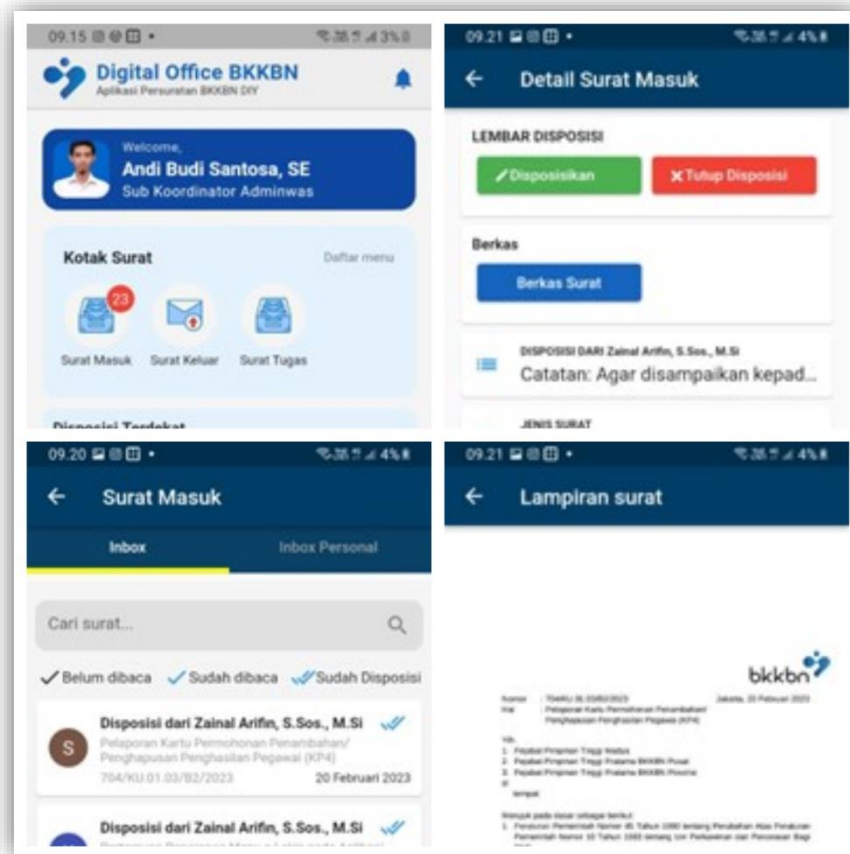
BKKBN D.I. Yogyakarta memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam kegiatan operasional administrasi dengan menggunakan Aplikasi Mobile Digital Office.

Dengan gawai masing-masing dimanapun dan kapanpun, seluruh dokumen dinas yang masuk dapat diterima dan diakses secara realtime kemudian dapat diproses untuk diteruskan atau disposisi ke jajaran sesuai jalur birokrasi yang diterapkan. Selaian itu juga dapat diciptakan naskah dinas yang meliputi pembuatan dari input sampai dengan persetujuan, pengiriman dan penerimaan secara elektronik. Naskah dinas yang telah terbuat akan menjadi arsip dan dapat terpelihara agar tetap autentik, utuh serta terpercaya. Didalam aplikasi ini setiap informasi dan log aktifitas terekam dengan baik dan terstruktur sehingga menjadi bukti akuntabilitas sistem dan proses yang berlangsung

Fitur utama lain pada aplikasi ini adalah :

1. Dashboard Aplikasi Digital Office
  - a. Gambar Dashboard
2. Fungsi Disposisi Surat Masuk, Monitoring Disposisi Tersebut dan Inbox Pribadi
  - a. Gambar Surat Masuk
  - b. Gambar detail Surat Masuk
  - c. Gambar berkas Naskah Dinas
  - d. Gambar keterlibatan dalam disposisi tersebut
3. Fungsi Pembuatan, Monitoring, Approval dan Distribusi Surat Keluar
  - a. Gambar menu surat keluar dengan submenu Daftar, Koreksi dan Monitoring
  - b. Gambar submenu monitoring surat keluar
4. Fungsi Pembuatan, Monitoring, Approval dan Distribusi Surat Tugas
  - a. Gambar menu surat tugas dengan submenu Daftar, Koreksi dan Monitoring
  - b. Gambar submenu monitoring surat tugas
5. Fungsi Agenda pada Google Calender Smartphone
  - a. Gambar agenda kegiatan

Gambar 3.8 Tangkapan Layar Aplikasi Digital Office



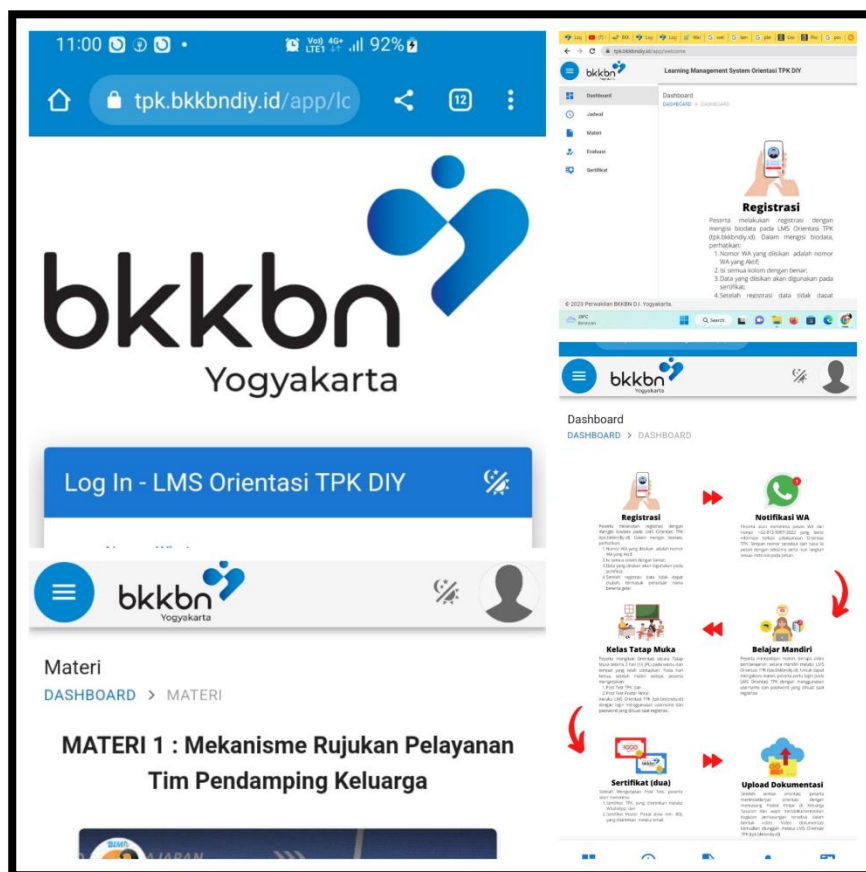
#### 4. Learning Management System Orientasi Tim Pendamping Keluarga Daerah Istimewa Yogyakarta

Untuk Meningkatkan Akses dan Kualitas Pembelajaran pada Orientasi Tim Pendamping Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta, dikembangkan Sistem Manajemen Pembelajaran secara Daring untuk Orientasi Tim Pendamping Keluarga berbasis Web dan Whatsapp, dimana peserta orientasi melakukan pembelajaran melalui Learning Management System Orientasi TPK ([tpk.bkkbndiy.id](http://tpk.bkkbndiy.id)). Learning management system tersebut dapat diakses menggunakan laptop, computer, tablet maupun smartphone. Harapannya dengan adanya Learning Management System akan lebih memudahkan peserta dalam mengikuti pembelajaran.

Learning Management System tersebut, para kader Tim Pendamping Keluarga dapat belajar secara mandiri konten-konten materi orientasi sebelum pelaksanaan orientasi secara tatap muka. Selain itu para kader juga mengerjakan evaluasi orientasi melalui Learning Management System tersebut, dimana para kader yang telah selesai mengikuti orientasi dan mengerjakan evaluasi akan mendaftarkan e-sertifikat yang dikirimkan melalui nomor Whatsapp para kader.

Learning Management System tersebut mampu meningkatkan kualitas pelayanan pelatihan kepada para peserta pelatihan, terbukti dengan adanya Learning Management System, peserta dapat melakukan pembelajaran secara mandiri sebelum pelaksanaan orientasi secara tatap muka dan dapat segera mendapatkan e-sertifikat setelah selesai mengikuti orientasi dan mengerjakan soal-soal evaluasi.

Gambar 3.9 Tampilan Learning Management System



## D. EVALUASI KINERJA

### 1) Review Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024

Di dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, strategi, program dan kegiatan yang akan di capai selama 5 tahun kedepan dalam Program Bangga Kencana. Penetapan sasaran, indikator kinerja kegiatan dan target yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun sudah berdasarkan sasaran kinerja BKKBN Pusat Tahun 2020-2024 yang ada pada Renstra BKKBN Pusat, karena Perwakilan BKKBN DIY sebagai unit pelaksana program Bangga Kencana di daerah. Penetapan target tahun 2020-2024 tersebut sudah menyesuaikan kondisi DIY dengan berdasarkan data dan capaian program Bangga Kencana di tahun 2019.

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2020 perlu dilakukan review renstra Perwakilan BKKBN DIY secara berkala. Akan tetapi review renstra belum dilakukan karena menunggu review renstra BKKBN yang sampai saat ini belum dilaksanakan juga. Dengan melihat capaian program dan kinerja Perwakilan BKKBN DIY selama tiga tahun ini, tahun 2020, 2021 dan 2022 perlu dilakukan review renstra Perwakilan BKKBN DIY, apalagi dengan kondisi pandemic Covid 19 yang belum selesai sampai tahun ke tiga (2022) dari renstra. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan target yang harus dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY, seperti target Indikator Kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi (*Unmet Need*).

### 2) Review Pengelolaan Kinerja

Pada tahun 2022 kinerja Perwakilan BKKBN DIY berdasarkan pada Perjanjian Kinerja 2022 dan juga Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 yang tercantum dalam Renstra Perwakilan BKKBN DIY. Review pengelolaan kinerja dilakukan pada 5 aspek, yaitu :

#### a. Perencanaan Kinerja

Dari indikator kinerja yang ada pada Renstra kemudian disusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan. Dimana Rencana Kerja Tahunan tersebut digunakan sebagai Struktur Program dan Anggaran (SPA) untuk

menyusun program dan anggaran serta kegiatan tahun 2022 yang tertuang dalam DIPA Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2022. Perwakilan BKKBN juga telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) tahun 2022 berdasarkan pada DIPA yang telah disusun.

b. Perjanjian Kinerja

Perwakilan BKKBN DIY mendapat indikator dan target kinerja dari BKKBN Pusat yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut mengalami penyesuaian dikarenakan adanya refocusing anggaran sebagai dampak dari adanya pandemi Covid 19. Dari target kinerja yang ada setelah dilakukan review terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang tidak sesuai dengan kondisi riil di DIY, yaitu pada indikator Persentasi Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*).

c. Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan hasil capaian kinerja tahun 2021 dengan target tahun 2022 baik yang terdapat pada Perjanjian Kinerja maupun Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Renstra. Selain itu juga membandingkan capaian tahun 2022 dengan target jangka menengah (target tahun 2024) dan juga pengukuran trend capaian dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Data capaian yang digunakan untuk pengukuran bersumber dari Puslitbang BKKBN, Statistik Rutin dan SMART.

Dari pengukuran kinerja tahun 2022 dilakukan analisis hasil capaian kinerja, hanya 1 (satu) indikator yang masih dalam capaian merah.

d. Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja Perwakilan BKKBN DIY dilakukan melalui aplikasi e-Monev Bappenas. E-Monev merupakan pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO, serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dari 30 RO yang dilaporkan pada e-Monev Perwakilan BKKBN DIY Tahun Anggaran 2022 hanya ada 1 RO yang capaian realisasinya tidak mencapai 100%, yaitu RO : 001-SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota.

e. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan perencanaan hingga laporan kinerja yang telah dilakukan maka kinerja Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2022 bisa dikatakan cukup optimal. Perwakilan BKKBN DIY dapat mencapai sebagian besar target yang telah ditetapkan baik pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 maupun Renstra. Selain itu Perwakilan BKKBN DIY juga mampu mengoptimalkan penggunaan anggaran pasca *refocusing* dengan penyerapan anggaran diatas 98% pada anggaran Program Bangga Kencana.

**3) Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi**

Perwakilan BKKBN D.I.Yogyakarta berdasarkan hasil penilaian Tim Internal ZI menuju WBK, telah memenuhi nilai minimum pada setiap area perubahan, sebagaimana disampaikan pada table berikut :

*Tabel 3.9 Hasil Penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2021*

NO	AREA PERUBAHAN PENGUNGKIT	NILAI	NILAI MINIMUM	LULUS/TIDAK
1	Manajemen Perubahan	3,67	2,88	LULUS
2	Manajemen Perubahan ( <i>Reform</i> )	3,67	2,88	LULUS
3	Penataan Tata Laksana	2,47	2,52	TIDAK
4	Penataan Tata Laksana ( <i>Reform</i> )	3,5	2,52	LULUS
5	Penguatan Sistem Manajemen SDM	3,76	3,6	LULUS
6	Penguatan Sistem Manajemen SDM ( <i>Reform</i> )	5	3,6	LULUS
7	Penguatan Akuntabilitas	4,31	3,6	LULUS
8	Penguatan Akuntabilitas ( <i>Reform</i> )	2,73	3,6	TIDAK
9	Penguatan Pengawasan	6,94	5,4	LULUS
10	Penguatan Pengawasan ( <i>Reform</i> )	6,88	5,4	LULUS
11	Penguatan Pelayanan Publik	3,76	3,6	LULUS
12	Penguatan Pelayanan Publik ( <i>Reform</i> )	5	3,6	LULUS
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>		<b>51,68</b>	<b>43,200</b>	<b>LULUS</b>
NO	AREA HASIL	NILAI	NILAI MINIMUM	LULUS/TIDAK
1	Survei IPAK	15,93	15,75	LULUS
2	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	1,25	2,50	TIDAK
3	Survei IPKP	15,66	14,00	LULUS
<b>TOTAL HASIL</b>		<b>32,84</b>	<b>32,250</b>	<b>LULUS</b>
<b>TOTAL</b>		<b>84,52</b>	<b>75,45</b>	

Sumber : Hasil penilaian Internal ZI menuju WBK Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2022



Perwakilan BKKBN Provinsi DIY tidak memenuhi syarat/pemenuhan pengajuan sebagai calon unit kerja “Menuju WBK” tahun 2022 dikarenakan rata-rata capaian kinerja tahun 2021 tidak mencapai nilai 100%, dan tidak memenuhi nilai minimal per area perubahan pada dua area perubahan yaitu pada area Penataan Tata Laksana dan Penguatan Akuntabilitas (Reform).

Berdasarkan hasil penilaian di atas, kami merekomendasikan kepada Unit Kerja Perwakilan BKKBN Provinsi DIY untuk :

1. Secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas layanan dan persepsi anti korupsi melalui pelaksanaan survei mandiri atas setiap layanan yang telah dilakukan kepada pelanggan/ mitra kerja. Hasil survei dapat menjadi dasar pelaksanaan perbaikan layanan dan nilai anti korupsi secara terus menerus dalam rangka persiapan pelaksanaan survei IPKP dan IPAK serta survei persepsi korupsi lainnya oleh pihak eksternal.
2. Secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas implementasi pembangunan ZI menuju WBK khususnya pada area perubahan Penataan Tatalaksana dan Penguatan Akuntabilitas (Reform) dan menatausahakan setiap produk kegiatan/dokumen bukti untuk digunakan pada saat penilaian mendatang.
3. Secara berkala melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut berupa perbaikan/usulan perbaikan pada seluruh SOP utama yang ditetapkan.
4. Membuat inovasi atas SOP unit kerja yang telah diterapkan yang mengacu peta proses bisnis khususnya terkait sistem pengukuran kinerja unit dan operasionalisasi sistem manajemen SDM.
5. Secara berkala melaksanakan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik.
6. Menyusun Dokumen Gap analisis kompetensi pegawai dengan standar kompetensi pegawai yang mencakup keseluruhan pegawai.
7. Secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.

8. Menyusun kebijakan pemberian reward dan punishment atas hasil penilaian kinerja.
9. Membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang telah dilaksanakan/diimplementasikan.
10. Membuat Inovasi terkait penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
11. Membuat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan.
12. Secara berkala melaksanakan survey kepuasan masyarakat atas layanan yang diberikan serta melaksanakan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat tersebut.
13. Melaksanakan inovasi-inovasi yang dapat memberikan dampak pada peningkatan capaian kinerja dan melaksanakan pemantauan atas rata-rata capaian kinerja yang telah ditetapkan secara berkala.

#### 4) Evaluasi Atas Implementasi SAKIP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat perbedaan pada jumlah komponen, bobot komponen dan pertanyaan masing-masing komponen yang dinilai, sehingga untuk membandingkan capaian hasil penilaian SAKIP dengan tahun sebelumnya tidak bisa dilakukan. Perubahan tersebut dijelaskan pada tabel berikut :

*Tabel 3.10 Perbedaan Jumlah Komponen dan Bobot Komponen*

No	Komponen	Bobot (Permenpan No.12/2015)	Bobot (Permenpan No.88/2021)
1.	Perencanaan Kinerja	30	30
2.	Pengukuran Kinerja	25	30
3.	Pelaporan Kinerja	15	15
4.	Evaluasi Kinerja	10	25
5.	Capaian Kinerja	20	
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>100</b>

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat beberapa kriteria baru yang spesifik fokus pada :

- Efektifitas dan efisiensi kinerja
- Perjenjangan kinerja yang memiliki kontribusi yang jelas dan terukur bagi organisasi
- Aktivitas berdampak pada pencapaian kinerja
- Hasil evaluasi internal

Tujuan dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta memperoleh nilai 69,45 atau memperoleh predikat penilaian “B”, dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

*Tabel 3.111 Hasil Penilaian SAKIP Perwakilan BKKBN DIY*

NO	KOMPONEN	BOBOT	2022
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	22,8
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,9
4.	Evaluasi Kinerja	25,00	18,75
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>69,75</b>
<b>PREDIKAT</b>			<b>B</b>

Nilai diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan rincian sebagai berikut :

1. Beberapa pencapaian Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam implementasi SAKIP antara lain:

- a. Telah memiliki dokumen perencanaan kinerja yang lengkap, dipertahankan setidaknya dalam 3 tahun terakhir dan dipublikasikan tepat waktu.
  - b. Melakukan perjanjian kerjasama dengan OPD KB kabupaten/kota se provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk penerapan hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan aktivitas antar tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*crosscutting*).
  - c. Pimpinan unit kerja selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur kinerja melalui Rapat Pengendali Program (Radalgram).
2. Dalam mewujudkan hasil yang berkesinambungan, masih terdapat capaian Konrad yang belum *on the right track* yaitu unmeetneed
  3. Dalam upaya mewujudkan capaian kinerja, unit kerja melakukan monitoring dan evaluasi RAPK, e-Monev BAPPENAS, dan SMART Kemenkeu tetapi belum memiliki mekanisme yang jelas atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut
  4. Dokumen Monev RAPK yang dilampirkan belum menjelaskan secara rinci hambatan, rencana kedepannya atas kegagalan suatu kegiatan.
  5. Dalam dokumen laporan kinerja 2021, unit kerja belum membandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase rata-rata capaian kinerja pada perjanjian kinerja
  6. Unit kerja belum menggunakan nilai SKP sebagai dasar pelaksanaan Open Bidding/Mutasi
  7. Dalam laporan kinerja tahun 2021, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 belum disajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, upaya perbaikan kedepannya, target jangka menengah dan target nasional (*benchmark* kinerja).
  8. Dalam upaya membangun budaya kinerja, belum terlihat adanya perubahan budaya kinerja organisasi melalui implementasi *core values* ASN Berakhlak secara spesifik pada seluruh pegawai.

Dalam rangka lebih mengefektifkan manajemen kinerja dan budaya kinerja, terdapat beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menerapkan manajemen risiko level strategis untuk memberikan kepastian bahwa tujuan organisasi (sasaran strategis) dapat dicapai secara optimal.
2. Meningkatkan kualitas monitoring atas rencana aksi perjanjian kinerja tahun 2023 dengan mengidentifikasi adanya permasalahan terkait organisasi, kebijakan, strategi, aktivitas/kegiatan dan anggaran dan menindaklanjutinya sebagai upaya mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
3. Menggunakan SKP sebagai dasar pelaksanaan open bidding/mutasi
4. Menetapkan mekanisme pelaporan kinerja baik berupa SOP ataupun kebijakan lainnya sebagai dasar pelaksanaan Monev RAPK, e-Monev BAPPENAS, dan SMART Kemenkeu
5. Meningkatkan kualitas Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan menyajikan perbandingan realisasi yang lebih memadai pada seluruh indikator kinerja.
6. Mengimplementasikan *core values* ASN Berakhlak secara spesifik pada seluruh pegawai sehingga dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

## **E. PERBAIKAN PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN TA 2023**

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarkan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Perlibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Teknologi Informasi

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2022 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/ sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2022.

### A. Kesimpulan

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang masuk dalam kategori **Sangat Baik {Hijau}** dengan rentang pencapaian antara 90,07% s.d. 200,00% adalah:
  - 1) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
  - 2) Angka prevalensi kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*)
  - 3) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19*)
  - 4) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
  - 5) Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) umur 25-49 tahun
  - 6) Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter
  - 7) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe
  - 8) Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS
  - 9) Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga

- 10) Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah
- 11) Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB
- 12) Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif
- 13) Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi
- 14) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk
- 15) Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan
- 16) Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP
- 17) Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah
- 18) Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan
- 19) Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana
- 20) Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana
- 21) Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik
- 22) Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)
- 23) Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.
- 24) Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK
- 25) Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
- 26) Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia
- 27) Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- 28) Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan
- 29) Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana



- 30) Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi
  - 31) Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting
  - 32) Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi
  - 33) Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes
  - 34) Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota
  - 35) Jumlah Data kasus stunting dan keluarga risiko stunting yang terverifikasi
  - 36) Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan
  - 37) Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)
  - 38) Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik
  - 39) Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi
  - 40) Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting
  - 41) Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
  - 42) Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi
  - 43) Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi
  - 44) Indeks ZI WBK
  - 45) Jumlah Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi
2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 yang masuk dalam kategori **Baik {Biru}** adalah :
- 1) Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet Need*) dengan pencapaian sebesar 81,38%
  - 2) Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan dengan pencapaian sebesar 82,96%

- 3) Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan pencapaian sebesar 84,62%.
3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022 yang masuk dalam kategori **Cukup {Kuning}** dengan pencapaian sebesar 54,94% adalah Indeks Informasi Metode KB (*Method Information Index/MII*).

## B. Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2022, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan Program kepada masyarakat dengan dukungan komitmen dan kebijakan dalam mempertimbangkan skema kegiatan yang berbasis Tehnologi Informasi dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program Bangga Kencana dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian *mCPR* rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmear.
5. Mengintensifkan pembinaan program Bangga Kencana baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program Bangga Kencana dengan mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program Bangga Kencana di wilayah DIY.
6. Pelibatan generasi milenial menjadi penting di setiap kegiatan yang ada di kelompok kegiatan, oleh karena mobilitasnya yang tinggi dan maju dalam hal Tehnologi Informasi

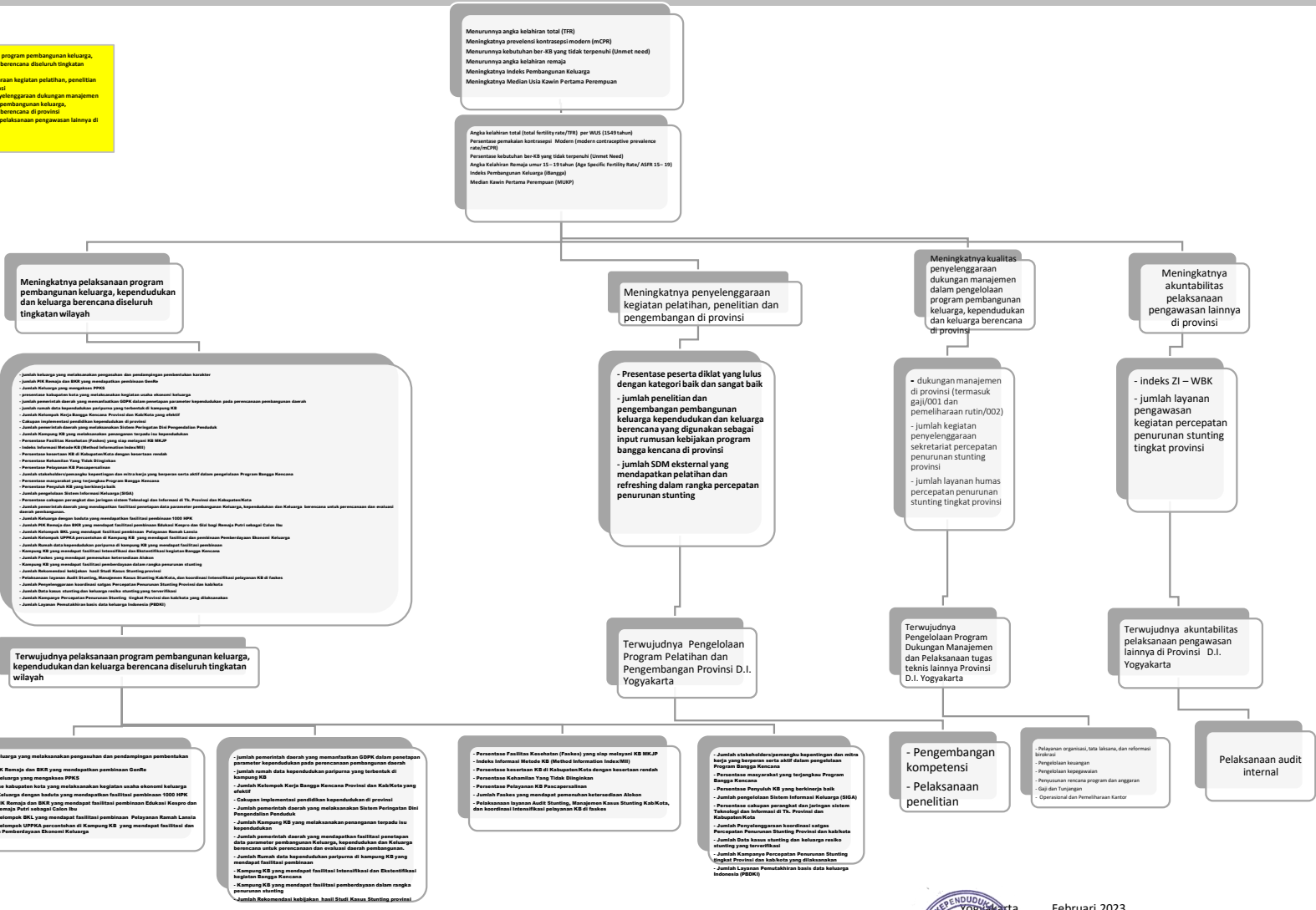
# LAMPIRAN

# FORMAT POHON KINERJA KEPALA PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

-Meningkatnya pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana diseluruh tingkatan wilayah  
 -Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di provinsi  
 -Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana di provinsi  
 -Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi

RENSTRA DAN PK KAPER

PK DAN SKP ESELON III



Yogyakarta, Februari 2023  
  
 Shodiqin, SH., MM

STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERWAKILAN BKKBN PROVINSI TA 2022

Perwakilan BKKBN Provinsi : Di Yogyakarta

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	<b>PAGU PERWAKILAN BKKBN PROVINSI</b>				
068.DJ	Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana			63,738,158,000	
3331	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi			15,210,777,000	
	<b>Bidang KSPK Perwakilan BKKBN Provinsi</b>			2,386,790,000	
3331.FBA	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah</b>				
3331.FBA.001	<b>Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga</b>	5	Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	263,826,000	
	1.1 Jumlah Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga		Kab/Kota		
	171 Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter	5	Kab/Kota	76,206,000	
	a Koordinasi lintas sektor percepatan penurunan stunting di Provinsi melalui sistem pemantauan tumbuh kembang anak				
	b Fasilitasi pembinaan kelompok BKB HI				
	172 Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	3	PPKS	187,620,000	
	a Pengelolaan PPKS Rujukan di Provinsi				
	b Pengelolan PPKS di Balai Penyuluhan				
	c Orientasi pengelola dan Pelaksana PPKS di berbagai tingkatan				
	d Perbanyak Materi dan Media KIE ketahanan Keluarga Rentan				
3331.QDE	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga</b>				
3331.QDE.001	<b>Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK</b>	56,722	Keluarga	247,201,000	Tagging RPJMN/ProPN
	2.1 Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK		Keluarga		
	173 Promosi dan KIE 1000 HPK	5	Kab/Kota	222,483,000	
	a Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE Pengasuhan 1000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting untuk mitra kerja dan pemangku kebijakan daerah				
	b Peningkatan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting bagi kader BKB				
	c Internalisasi Pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting kepada masyarakat				
	174 Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000 HPK	1	Laporan	24,718,000	
	a Monev (Monitoring dan Evaluasi) pelaksanaan percepatan penurunan stunting berbasis IT				
	b Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui SIGA dan SMART				
	315 Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	0	Pemangku kebijakan	0	
	a Konsolidasi dengan pemangku kebijakan tingkat daerah (Kemitraan)				
3331.QDD	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>				
3331.QDD.001	<b>PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu</b>	443	Kelompok Masyarakat	1,428,158,000	Tagging RPJMN/ProPN
	3.1 Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu		PIK Remaja dan BKR		
	176 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	443	Jumlah PIK Remaja dan BKR Yang mendapat fasilitasi pembinaan	1,428,158,000	
	a Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				
	b Promosi dan Pelembagaan GenRe Melalui Berbagai Media dan Momentum Strategis				
	c Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				
	d Apresiasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR				
	e Penggandaan Materi Stunting				
	f Workshop Kespro, Gizi dan Perencanaan Masa Depan untuk Remaja Difabel bagi PS KS				
	g Workshop -Parenting 1001 Cara Bicara tingkat Provinsi (Lanjutan)				
	h Workshop "Tentang Kita" bagi Pengelola PIK Remaja tingkat Provinsi (lanjutan)				
	i Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreatifitas Genre				
	j Apresiasi PIK R Percontohan Segmentasi Usia (Berani, Beraksi dan Berkolaborasi)				
	k Implementasi Elsimit Tk. Kab/Kota				
	316 Peningkatan komitmen dengan pemangku kebijakan dalam percepatan penurunan stunting	0	Pemangku kebijakan	-	
	a Konsolidasi dengan pemangku kebijakan tingkat daerah (Kemitraan)				
3331.QDD	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>				
3331.QDD.002	<b>Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia</b>	143	Kelompok Masyarakat	301,700,000	Tagging RPJMN/ProPN
	4.1 Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia		Kelompok BKL		
	177 Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL	143	Kelompok BKL	301,700,000	
	a Pengembangan dan Perbanyak Materi dan Media Kelanjutan				
	b Sosialisasi 7 Dimensi Lansia Tangguh				
	c Orientasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bagi Lansia				
	d Pertemuan Integrasi Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Bersama Mitra				
	e Pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL				
	f Sinkronisasi Kegiatan kelanjutan eksternal dan internal				
3331.QDD	<b>Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat</b>				
3331.QDD.003	<b>Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga</b>	15	Kelompok Masyarakat	145,905,000	Tagging RPJMN/ProPN
	6.1 Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga		Kelompok UPPKA		
	178 Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan	15	Kelompok UPPKA Percontohan di Kampung KB	145,905,000	

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	a	Perbanyak materi dan media KIE serta pengembangan materi sesuai karakteristik lokal			
	b	Sosialisasi materi dan media KIE Pemberdayaan Ekonomi Keluarga akseptor			
	c	Orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor			
	d	Fasilitasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor			
	e	Pengembangan PEK melalui strategi jenis usaha dalam rangka mendukung pencegahan stunting			
<b>Bidang DALDUK Perwakilan BKKBN Provinsi</b>				<b>2,044,750,000</b>	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.002	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk		2	Daerah (Provinsi/Kab/Kota)	260,550,000
1.1	Jumlah Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk			Provinsi	
179	Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan		1 prov & 5 Kab/kota	Kab/Kota	24,000,000
	a	Pendampingan penyusunan GDPK 5 Pilar (pembentukan tim koordinasi penyusunan dan pelaksanaan GDPK 5 Pilar, penyusunan rencana anggaran dan kegiatan penyusunan GDPK)			
	b	Pendampingan pengolahan data dan analisis pengembangan kebijakan dalam GDPK 5 Pilar			
	c	Pendampingan penyusunan rencana aksi pembangunan kependudukan terintegrasi (dalam rangka pemanfaatan GDPK)			
180	Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah		1 prov & 2 Kab/kota	Provinsi dan Kab/Kota	18,000,000
	a	Fasilitasi penetapan data parameter kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan) dalam kerangka Satu Data Indonesia			
181	Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah		1 prov & 2 Kab/kota	Provinsi dan Kab/Kota	21,000,000
	a	Pendampingan penyusunan perencanaan program Bangga Kencana dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/Renstrada/RKPD/Renja Perangkat Daerah bidang Kependudukan)			
	b	Telaah dokumen perencanaan pembangunan daerah			
182	Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan		86	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang telah diregistrasi	14,880,000
	a	Sosialisasi Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan			
	b	Sosialisasi Pengelolaan data Kampung KB (website)			
183	Penguatan Tata Kelola Rumah Data Kependudukan		77	Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	16,290,000
	a	Fasilitasi teknis manajemen data pada Rumah Data Kependudukan			
	b	Fasilitasi teknis tata kelola Rumah Data Kependudukan berbasis aplikasi			
	c	Fasilitasi advokasi pemanfaatan dan pengintegrasian data basis Rumah Data Kependudukan pada Sistem Manajemen Data Desa			
184	Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif		1 Prov	Pemda Provinsi & Kab/Kota	44,460,000
	a	Pengembangan bahan pembinaan Kelompok Kerja Bangga Kencana			
	b	Pengelolaan Forum Komunikasi Kelompok Kerja Bangga Kencana			
	c	Implementasi sistem monitoring dan evaluasi Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif			
185	Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal, non formal dan informal)		1 provinsi dan 5 kab/kota	Pemda Provinsi & Kab/Kota	21,590,000
	a	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis pendidikan kependudukan Jalur Formal (Sekolah Siaga Kependudukan dan Perguruan Tinggi Perduki Kependudukan) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	b	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis pendidikan kependudukan Jalur NonFormal (Balai Diklat/ASN PK dan Saka Kencana) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
	c	Fasilitasi dan Pembinaan Teknis pendidikan kependudukan Jalur Informal (Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Kelompok Kegiatan dan lain-lain khususnya di Kampung KB) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota			
186	Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota		2	Kab/Kota	83,170,000
	a	Workshop Perumusan Isu Strategis Pengendalian Penduduk di Provinsi			
	b	Penyusunan Kajian Analisis Dampak Kependudukan			
	c	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			
	d	Sosialisasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk untuk OPD Kab/Kota			
	e	Peningkatan Kapasitas Pengelola Program Analisis Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi dan Kab/Kota			
	f	Seminar Hasil Analisis Dampak Kependudukan Tingkat Provinsi			
	g	Monitoring dan Evaluasi Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk			
187	Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB		3	Pemerintah Daerah Kab/Kota	17,160,000
	a	Workshop Perumusan Isu Kependudukan di Kampung KB			
	b	Pengembangan Pengelolaan Kampung KB Percontohan			
	c	Momentum Hari Kependudukan Dunia di Provinsi Bersama Mitra Kerja			
	d	Monitoring dan Evaluasi Terpadu Pengelolaan Kampung KB			
3331.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
3331.QDD.004	Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB		62	Kelompok Masyarakat	868,000,000	Tagging RPJMN/ProPN
	2.1	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitas pembinaan		Kampung KB		
	188	Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	62	Kampung KB	868,000,000	
		a Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan				
		b Fasilitasi Pengumpulan dan Updating Data di rumah data kependudukan				
		c Fasilitasi pemanfaatan dan integrasi data di kampung kb				
3331.UBA						
3331.UBA.001	Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)		5	Kab/Kota	448,000,000	Tagging RPJMN/ProPN
	3.1	Kampung KB yang mendapat fasilitas Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana		Kab/Kota		
	319	Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	5	kab/kota	448,000,000	
		a Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB				
		b Workshop Pengelolaan Kampung KB				
		c Penguatan Kemitraan Kampung KB				
		d Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB				
		e Penguatan Kampung KB				
3331.UBA.002	Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting		5	Kelompok Masyarakat	318,200,000	Tagging Stunting
	4.1	Kampung KB yang mendapat fasilitas pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting		Kab/Kota		
	289	Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di kampung kb	15	Kegiatan	318,200,000	
		a Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting				
3331.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan					
3331.PBG.001	Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi		2	Rekomendasi kebijakan	150,000,000	Tagging Stunting
	2.1	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi		Rekomendasi kebijakan		
	295	Studi kasus dan pembelajaran (provinsi)	2	laporan	150,000,000	
		a Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi				
		b Workshop dan Diseminasi Studi kasus dan pembelajaran baik Stunting di Provinsi				
<b>Bidang KBKR Perwakilan BKKBN Provinsi</b>					<b>3,274,518,000</b>	
3331.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga					
3331.BDB.001	Faskes yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan		377	Lembaga	277,025,000	
	1.1	Jumlah Faskes yang mendapat fasilitas dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan		Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
	189	Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di faskes	1	Dokumen	20,000,000	
		a Perencanaan Kebutuhan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi				
		b Fasilitasi kesiapan fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB (SDM, Sarana dan Alokon)				
	190	Penyediaan fasilitas peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	254	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	46,050,000	
		a Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pelayanan KB Melalui Pre Service Training				
		b Fasilitasi Peningkatan Standarisasi Tenaga Kesehatan				
		c Forum Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja				
		d Evaluasi dan Monitoring Pre Service Training				
	191	Penyerasian Kebijakan dan Penguatan Program Pelayanan KB Pria	1	Dokumen	15,000,000	
		a Peningkatan pembinaan kesertaan KB Pria bersama mitra kerja				
	192	Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	5	Kab/Kota	25,000,000	
		a Penguatan Penyediaan 1 tim vasektomi di tiap Kabupaten dan Kota				
	193	Penyerasian Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kab/Kota	1	Dokumen	15,000,000	
		a Analisis dan evaluasi capaian kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah				
	194	Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabutan Implan serta Komplikasi dan Kegagalan	5	Kab/Kota	22,000,000	
		a Koordinasi dan evaluasi penggerakan pelayanan KB MKJP dengan anggaran BOKB di Kabupaten/Kota				
	195	Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Galciltas	3	Mitra Kerja (Kumulatif)	32,400,000	
		a Integrasi penguatan kemitraan dalam rangka penggarapan KBKR di wilayah dan sasaran khusus pada kegiatan momentum				
	196	Peningkatan implementasi penggerakan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi wilayah Risiko tinggi	3	kab/kota	21,300,000	
		a Pembinaan dan pengembangan Kesehatan Reproduksi di Komunitas Risiko Tinggi dan Remaja di Era Milenial				
		b Penguatan Kespro Remaja Melalui Ajang Kreatifitas di Komunitas Muda (Lomba Video Pendek)				
	197	Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK	3	kab/kota	34,650,000	
		a Penyusunan Kebijakan Daerah tentang Pelayanan KBPP dalam mendukung percepatan penurunan Stunting				
		b Orientasi penurunan Angka kematian ibu dengan pengaturan jarak kehamilan yang sehat melalui KBPP				
	198	Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	9	Mitra	45,625,000	
		a Optimalisasi peran serta stakeholder dalam Promosi Kesehatan Reproduksi bagi anak				
		b Fasilitasi dan Integrasi Baksos Kesehatan Reproduksi Pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB				
3331.QEI	Bantuan Lembaga					
3331.QEI.001	Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)		377	Lembaga	1,798,870,000	Tagging RPJMN/ProPN
	1.1	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokon		Faskes		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
	199 Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan, evaluasi dan ketersediaan alokon)	1	Dokumen	1,798,870,000	
	a Pengadaan Alokon				
	IUD	10,275	set		
	Implan 2 Batang	7,470	set		
	Implan 1 Batang	0	set		
	Obat Suntik KB Tiga Bulanan 1 ml	0	Vial		
	Obat Suntik KB Kombinasi 1 ml	0	Vial		
	Syringe	0	Buah		
	Pil Progestin	0	Cycle		
	Pil KB Kombinasi	0	Cycle		
	Kondom	21,708	Lusin		
	BMHP	7,470	set		
	Administrasi Pengadaan				
3331.QAH	Pelayanan Publik Lainnya				
3331.QAH.001	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi intensifikasi pelayanan KB di faskes	5	layanan	1,198,623,000	Tagging Stunting
	1.1 Jumlah Audit Stunting dan Manajemen Kasus Stunting yang dilaksanakan di Kab/Kota		kab/kota		
	290 Audit Stunting dan Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota	5	kegiatan	600,000,000	
	a Diskusi Panel Manajemen Kasus Stunting		Kegiatan		
	b Telekonsultasi pakar				
	1.2 Jumlah Koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes yang dilaksanakan		faskes		
	291 Koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	377	faskes	598,623,000	
	a Pertemuan koordinasi tingkat provinsi dan Kab/Kota dalam upaya intensifikasi pelayanan KB di faskes		Kegiatan		
	b Peningkatan perluasan akses pelayanan KB di faskes tingkat Provinsi dan Kab/Kota				
	c Penguatan pengelolaan pelayanan KB Faskes, jaringan dan jejaring				
	d Fasilitasi dukungan operasional PKBRs				
	e Orientasi peningkatan kapasitas pelayanan KB bagi tenaga kesehatan di faskes, jaringan dan jejaring				
	f Monitoring dan evaluasi intensifikasi pelayanan KB di faskes				
	<b>Bidang ADPIN Perwakilan BKKBN Provinsi</b>			<b>4,276,315,000</b>	
3331.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah				
3331.FBA.003	Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE, serta penyediaan data dan informasi keluarga	1	Daerah (Prov/Kab/Kota)	364,567,000	
	1.1 Jumlah Pemda yang mendapat fasilitasi pembinaan pergerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE dalam perubahan sikap dan perilaku masyarakat, serta penyediaan data dan informasi dalam sistem informasi keluarga		Pemda Provinsi		
	200 Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	14	jumlah mitra aktif	38,151,000	
	a Penilaian Penghargaan Bidang Bangga Kencana bagi Mitra Kerja dalam rangka HARGANAS		Kegiatan		
	b Fasilitasi Kunjungan Kerja Lembaga Eksekutif dan Legislatif Provinsi/Kabupaten/Kota ke Perwakilan BKKBN Provinsi				
	c Fasilitasi Pelaksanaan TMKK di Provinsi		Kegiatan		
	d Temu Kerja Konvergensi dalam Percepatan Penurunan AKI dan Stunting				
	201 Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	7	jumlah mitra aktif	26,182,000	
	a Rapat Koordinasi Teknis Kerjasama Kemitraan Tingkat Provinsi		Kegiatan		
	b Pertemuan Mitra Kerja Program Bangga Kencana di Provinsi				
	202 Peningkatan Kelembagaan pada Kab/Kota yang memiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang utuh	1	Kab/Kota	15,331,000	
	a Temu kerja dinas bidang pengendalian penduduk dan KB tingkat Provinsi				
	203 Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	1	Provinsi	17,231,000	
	a Pengembangan Desain Materi Promosi KIE Program Bangga Kencana Berdasarkan Segmentasi Sarasar dan Wilayah				
	205 Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik, Media Online serta Media Luar Ruang	4	Frekuensi	29,462,000	
	a Promosi KIE Program Bangga Kencana Melalui Berbagai Media				
	b Sosialisasi Program Bangga Kencana Melalui Kegiatan Momentum Strategis				
	206 Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	3	Kegiatan	25,462,000	
	a Penguatan Pokja Advokasi dalam Percepatan Penurunan AKI dan Stunting				
	b Fasilitasi Pokja Advokasi Program Bangga Kencana di daerah				
	207 Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB	12	Dokumen	39,519,000	
	a Pembinaan Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja Penyuluh KB/PLKB				
	b Fasilitasi Bimbingan Teknis Fungsional Penyuluh KB dalam penurunan AKI, DO, UN dan stunting				
	c Penyelenggaraan Uji Kompetensi Penyuluh KB				
	d Penilaian Kinerja Penyuluh KB/PLKB				
	208 Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	3,971	PPKBD/ Sub PPKBD	31,113,000	
	a Fasilitasi Koordinasi Pengorganisasian Tim Pendamping Keluarga Stunting bersama K/L Terkait				
	b Penguatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap Tangguh Bencana dalam Peningkatan Program Bangga Kencana penurunan stunting di desa dan kelurahan				
	c Penguatan Kapasitas IMP sebagai Tim Pendamping Keluarga Stunting				
	209 Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	31	MEKOP	35,573,000	
	a Penguatan Integrasi Mekanisme operasional dan rembug stunting tingkat Kabupaten/kota				



No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
		b	Facilitasi adaptasi Desa zero stunting			
		c	Bimbingan Teknis mekanisme Operasional bagi Pengelola Program tingkat Kabupaten/Kota			
	210		Penguatan tupoksi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB	197	Orang	30,153,000
		a	Facilitasi Penguatan Sasaran Kinerja Penurunan AKI, DO, Unmeet Need dan Stunting bagi Penyuluh KB/PLKB			
		b	Facilitasi Peningkatan Kompetensi dan Budaya Kerja Penyuluh KB/PLKB			
		c	Facilitasi Koordinasi Percepatan Kinerja Penurunan DO bagi Pengurus IPeKB			
	211		Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi data dan informasi Program Bangsa Kencana	5	Kab/Kota	13,973,000
		a	Monitoring dan evaluasi sosialisasi, promosi, KIE Program Bangsa Kencana			
	212		Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan jaringan STIK program Bangsa Kencana	1	provinsi	30,053,000
		a	Penguatan Sarana dan prasarana pendukung Teknologi Informasi dan komunikasi			
		b	Koordinasi Teknis Sistem Teknologi Informasi Program Bangsa Kencana			
		c	Sosialisasi dan evaluasi SPBE STIK BKKBN tingkat Prov.			
	213		Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi, Dokumentasi dan pengelolaan PPID	1	provinsi	32,364,000
		a	Penyebarluasan Informasi Program Bangsa Kencana Melalui Media Elektronik			
		b	Pengelolaan Perpustakaan			
		c	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi dan Program Bangsa Kencana TK. Provinsi			
		d	Evaluasi Pemanfaatan Penyebarluasan Informasi Program Bangsa Kencana			
3331.QMA	Data dan Informasi Publik					
3331.QMA.001	Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)		5	Layanan	2,625,572,000	Kegiatan Prioritas
	1.1	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)			Layanan	
		214	Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia	5	Kab/Kota	2,625,572,000
		a	Pengadaan Formulir PBDKI di 9 provinsi	0	keluarga	-
		b	Operasional Pencatatan dan Pelaporan PBDKI	496,679	keluarga	1,986,714,000
		c	Monitoring /Pengamatan Pelaksanaan PBDKI	5	kab/kota	25,050,000
		d	Pengumpulan Hasil dan verifikasi PBDKI	47	kecamatan	8,813,000
		e	Operasional Supervisor	143	desa	32,175,000
		f	Operasional Manajer	47	kecamatan	23,500,000
		g	Workshop PBDKI bagi Pengelola Data TK KabKota	5	kab/kota	13,000,000
		h	Workshop PBDKI bagi Kader	3,021	kader	302,140,000
		i	Workshop PBDKI bagi Manajer	47	kecamatan	4,700,000
		j	Workshop PBDKI bagi supervisor	143	desa	14,300,000
		k	ATK Pengelolaan PBDKI Kecamatan	47	kecamatan	14,100,000
		l	Biaya Pengiriman sarpras PBDKI	47	kecamatan	4,700,000
		m	PBDKI Kit (diluar wilayah timur)	3,021	kader	75,535,000
		n	Penyusunan laporan statistik	1	provinsi	19,800,000
		o	Uji kualitas data	5	kab/kota	6,500,000
		p	Cetak Formulir New SIGA	47,537	formulir (K/0 dan R/I)	19,015,000
		q	Rekonsiliasi data PK New SIGA Tk Provinsi	5	kab/kota	12,150,000
		r	Rekonsiliasi Data PK New SIGA Tk Kab/Kota	78	kecamatan	16,380,000
		s	Regional PBDKI	1	provinsi	32,000,000
		t	Ujicoba PBDKI	5	kab/kota	15,000,000
3331.PEA	Koordinasi					
3331.PEA.001	Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota		6	Kegiatan	791,170,000	Tagging Stunting
	1.1	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota			kegiatan	
		292	SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6	provinsi dan kab/kota	791,170,000
		a	SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	1	provinsi	400,000,000
		b	SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Kab/kota	5	kab/kota	391,170,000
3331.QMA	Data dan Informasi Publik					
3331.QMA.003	Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi		1	layanan	265,006,000	Tagging Stunting
	1.1	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi			dokumen	
		293	Verifikasi dan validasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting	1	dokumen	265,006,000
		a	Register verifikasi dan validasi	174	Kampung KB	8,700,000
		b	Operasional Verifikasi dan Validasi data	47	kecamatan	14,100,000
		c	Orientasi verifikasi dan validasi	174	Kampung KB	21,750,000
		d	Pemutakhiran data	174	Kampung KB	104,400,000
		e	Sosialisasi Panduan verifikasi dan validasi	78	kecamatan	55,800,000
		f	Rekonsiliasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting	78	kecamatan	51,256,000
		g	Verifikasi Provinsi	5	kab/kota	9,000,000

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN	TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
		Target	Satuan		
3331.QMB	Komunikasi publik				
3331.QMB.001	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota	1	layanan	230,000,000	Tagging Stunting
1.1	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan		layanan		
294	Kampanye Percepatan Penurunan Stunting	58	kegiatan	230,000,000	
a	Kampanye tingkat provinsi	2		230,000,000	
	>> KIE Pencegahan Stunting Lini Atas				
	- Penayangan TV Lokal (PSA/Talkshow/Built In Segmen)				
	- Penayangan Radio Lokal (PSA/Talkshow/Adlibs/Airtime)				
	>> KIE Pencegahan Stunting Lini Tengah				
	- KIE melalui Media Online				
	- KIE melalui Media Sosial				
	>> KIE Pencegahan Stunting Lini Bawah				
	- Produksi Multimedia Pencegahan Stunting				
	- Momentum strategis / KIE Interpersonal kepada Kelompok/ Komunitas				
	- Media Luar Ruang (Billboard/Videotron)				
	- Public Figure / Influencer				
b	Kampanye tingkat kab/kota	0	Kegiatan	-	11 Provinsi (Jabar, Sumbar, Jambi, Lampung, Kalbar, Kaltim, Sulsel, Bali, NTT, Bengkulu, Sulbar)
	>> KIE Pencegahan Stunting Lini Atas				
	- Penayangan TV Lokal (PSA/Talkshow/Built In Segmen)				
	- Penayangan Radio Lokal (PSA/Talkshow/Adlibs/Airtime)				
	>> KIE Pencegahan Stunting Lini Tengah				
	- KIE melalui Media Online				
	- KIE melalui Media Sosial				
	>> KIE Pencegahan Stunting Lini Bawah				
	- Produksi Multimedia Pencegahan Stunting				
	- Momentum strategis / KIE Interpersonal kepada Kelompok/ Komunitas				
	- Media Luar Ruang (Billboard/Videotron)				
	- Public Figure / Influencer				
c	Promosi & KIE Program Percepatan Penurunan Stunting Di Wilayah Khusus	0	kegiatan	-	
	- Promosi & KIE kepada masyarakat di wilayah khusus				
d	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	Keg/Ok	-	
	- Belanja Bahan				
	- Belanja Barang Operasional COVID 19				
<b>Bidang Lalitbang Perwakilan BKKBN Provinsi</b>				<b>3,228,404,000</b>	
3331.DCJ	Pelatihan Bidang Sosial				
3331.DCJ.001	SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota	80	Orang	313,350,000	
1.1	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota		Orang		
216	Pelatihan Teknis Program Bangga Kencana	80	Orang	313,350,000	
a	Pelatihan Teknis New SIGA				
b	Pelatihan Teknis Manajemen Rantai Pasok (SIRIKA)				
c	Pelatihan Pengelolaan Program KKBPK di Balai Diklat KKB				
d	Orientasi Teknis bagi Toma, Toga, Toda dan Mitra Kerja				
e	Identifikasi Kebutuhan Diklat				
f	Pengembangan kurikulum, Materi dan Media Pembelajaran				
g	Penjaminan Mutu Diklat				
h	Penyusunan Tata Laksana Diklat				
i	Fasilitasi Visitasi Penilaian Akreditasi Balatbang dan Balai Diklat				
j	Pembinaan SDM provinsi				
k	Fasilitasi Evaluasi Pasca Diklat				
3331.SCM	Pelatihan Bidang Kesehatan				
3331.SCM.001	Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5,559	Orang	2,840,054,000	Tagging Stunting
4.1	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting		Orang		
317	Pelatihan dan Pendalaman	5,559	Orang	2,840,054,000	
a	Pelatihan Pelayanan KB (CTU)	3	Orang	1,201,620,000	
b	Pelatihan Tim Pendamping keluarga bagi bidan	1,852	Orang	923,515,000	
c	Pelatihan Tim Pendamping keluarga bagi kader dan PKK	3,704	Orang	714,919,000	
3331.ABN	Kebijakan Bidang Sosial				
3331.ABN.001	Rekomendasi kebijakan Evaluasi Program Bangga Kencana	1	Rekomendasi Kebijakan	75,000,000	
2.1	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Evaluasi Program Bangga Kencana		Rekomendasi Kebijakan		
218	Pelaksanaan evaluasi dan analisis program Bangga Kencana untuk rekomendasi kebijakan	1	Laporan	75,000,000	
a	Penyusunan Evaluasi dan analisis Program Bangga Kencana				
b	Diseminasi hasil evaluasi dan analisis Program Bangga Kencana				
a	Penyusunan/penulisan policy brief sebagai rekomendasi kebijakan Program Bangga Kencana				
068.WA	Program Dukungan Manajemen			48,527,381,000	
5297	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi			48,527,381,000	
<b>Bidang Sekretariat Perwakilan BKKBN Provinsi</b>				<b>48,077,944,000</b>	
5297.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal				
5297.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	Layanan	363,500,000	
1.1	Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal yang dilaksanakan		Layanan		
266	Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1	Kegiatan	52,500,000	
a	Fasilitasi bantuan hukum				
b	Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan NSPK				
c	Pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI WBK)				
d	Pelaksanaan Pelayanan publik				
267	Pengelolaan Keuangan dan BMN	1	Satker	124,000,000	
a	Rekonsiliasi Laporan Keuangan dan BMN Semester I dan II (Tk. Pusat dan provinsi)				

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
		b	Pembinaan dan pendampingan pelaksanaan anggaran thd pejabat perbendaharaan, pengelola BMN dan petugas SAI Tk. Prov dg Mitra Kerja Terkait			
		c	Bimbingan Teknis Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
		d	Akselerasi Percepatan Pelaporan DAK Sub Bid KB Fisik dan Non Fisik bagi TIM Pengendali DAK Kab/Kota, Monitoring DAK			
		e	Pelaksanaan Sosialisasi DAK Regional			
		f	Peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan dan BMN			
		g	Penatakelolaan barang persediaan dan pengelolaan gudang alkon serta Stock Opname alkon gudang provinsi			
		h	Distribusi Alokon ke Gudang Kab/Kota (distribusi dinamis dan buffer)			
		i	Pengelolaan BMN berupa sarana kerja (Labelisasi BMN existing dan manajemen daftar barang ruangan)			
		j	Pengelolaan BMN dalam kondisi Rusak Berat (manajemen penghapusan Barang Milik Negara)			
		k	Penyusunan Dokumen RKBMN satuan Kerja			
		l	Penyelenggaraan SPIP			
		m	Pengendalian BMN dalam proses hukum, dalam proses pembuatan dokumen kepemilikan (IMB, Sertifikat tanah), serta dalam sengketa yang belum masuk ke ranah hukum			
		n	Manajemen pengendalian atas BMN yang berpotensi Idle			
		o	Evaluasi pengelolaan BMN, pengendalian atas data hasil Revaluasi BMN			
		<b>268</b>	<b>Pengelolaan Manajemen Kepegawaian</b>	<b>19</b>	<b>Pegawai</b>	<b>80,000,000</b>
		a	Pengadaan ASN di lingkungan BKKBN			
		b	Asesmen ASN	<b>8</b>		
		c	Orientasi CASN	<b>11</b>		
		d	Dukungan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
		<b>269</b>	<b>Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran</b>	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>107,000,000</b>
		a	<b>Pemaduan Perencanaan Program dan Anggaran KKBPK Tk. Provinsi dan Kab/Kota (Korenda)</b>			
		b	Fasilitasi sinkronisasi program dalam forum Rakortek/Musrenbangda Provinsi			
		c	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan DAK Sub Bidang KB - (termasuk fasilitasi melalui aplikasi Krisna DAK)			
		d	Penyusunan data basis perencanaan program dan anggaran Provinsi dan Kab/Kota			
		e	<b>Konsolidasi Perencanaan program KKBPK Pusat dan Provinsi (e-KOREN I / KOREN II)</b>			
		f	<b>Forum sinkronisasi Perencanaan Program dan Anggaran (koordinasi lintas Bidang dan lintas sektor - Prov dan Kab/Kota)</b>			
		g	Rapat Koordinasi Teknis pembahasan usulan DAK subbidang KB Kab Kota			
		h	<b>Penguatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah</b>			
5297.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
5297.EBA.994	Layanan Perkantoran		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>47,117,194,000</b>	
	2.1	Jumlah Layanan Perkantoran yang dilaksanakan		<b>Layanan</b>		
		<b>001</b>	<b>Gaji dan Tunjangan perwakilan BKKBN Provinsi</b>	<b>13</b>	<b>Bulan Layanan</b>	<b>44,603,934,000</b>
		a	Pembayaran Gaji dan Tunjangan			
		<b>002</b>	<b>Operasional dan pemeliharaan kantor</b>	<b>12</b>	<b>Bulan Layanan</b>	<b>2,513,260,000</b>
		a	Langganan Daya dan Jasa (Listrik, telp dan air PDAM) Kantor BKKBN Pusat, Rumah Jabatan, Gudang dan Mess			
		b	Layanan Jasa Sewa Mesin Fotocopy			
		c	Langganan Koran, Majalah, Air Minum dan TV Kabel			
		d	Pembayaran PBB/Pembuatan Sertifikat			
		e	Pembayaran Pajak Kendaraan Roda 2, 4 dan 6			
		f	Honorarium Jasa Perorangan Kontraktual			
		g	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan			
		h	Pemeliharaan Kendaraan			
		i	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			
		j	Honor Pengelola Anggaran Satuan Kerja			
		k	Dukungan layanan Persuratan dan Paket Kedinasan			
		l	Dukungan Layanan Kearsipan			
		m	Pembelian ATK			
		n	Layanan Jamuan Tamu dan Mitra kerja			
		o	Layanan Rapat Pengendalian Program tingkat provinsi			
		p	Dukungan layanan Keamanan. Peningkatan Kinerja dan Daya Tahan Tubuh			
		q	Dukungan Layanan Keprotokol dan pendampingan pimpinan			
		r	Konsultasi dan Koordinasi teknis dengan mitra kerja			
		s	<b>Sewa jasa internet (bandwidth)</b>			alokasi bandwidth disesuaikan dengan kebutuhan
5297.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
5297.EBB.951	Layanan Sarana Internal		<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>100,000,000</b>	
	3.1	Jumlah sarana Internal yang diadakan		<b>Unit</b>		
		<b>271</b>	<b>Pengadaan Sarana Fasilitas Perkantoran</b>	<b>2</b>	<b>Unit</b>	<b>100,000,000</b>
		a	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
		b	Fasilitasi Pengadaan Sarana Kantor dan Rumah Jabatan			
		c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran			
		d	Dukungan dan fasilitasi pengadaan Barang/jasa			
5297.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal					
5297.EBB.971	Layanan Prasarana Internal		<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>	
	4.1	Jumlah prasana Internal yang diadakan/direnovasi		<b>Unit</b>		
		<b>272</b>	<b>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</b>	<b>0</b>	<b>Unit</b>	<b>-</b>
		a	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Kantor/Gudang/Rumah Dinas/Diklat			
		b	Dukungan dan Fasilitas Kantor/Rumah Dinas/Diklat			
		c	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
5297.PEA	Koordinasi					
5297.PEA.001	Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi		<b>1</b>	kegiatan	<b>366,000,000</b>	
	5.1	Jumlah Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting		<b>kegiatan</b>		
		<b>296</b>	<b>Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>366,000,000</b>
		a	Rekonsiliasi Stunting TK Provinsi			
		b	Rekonsiliasi Stunting TK Kab/Kota			
		c	Operasional Sekretariat Stunting Tk. Provinsi			
5297.QAH	Pelayanan Publik Lainnya					
5297.QAH.001	Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>131,250,000</b>	<b>Tagging Stunting</b>
	6.1	Jumlah Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi		layanan		
		<b>297</b>	<b>Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi</b>	<b>1</b>	<b>kegiatan</b>	<b>131,250,000</b>
		a	Liputan Kegiatan Peanganan Stunting			

No.	PROGRAM / KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT/ RINCIAN OUTPUT / INDIKATOR RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN / SUB KOMPONEN		TARGET KINERJA		ALOKASI ANGGARAN	KETERANGAN
			Target	Satuan		
		b	Media Publikasi:			
			Advetorial PSA/Banner/ Display Media Cetak			
			Advetorial PSA Media Online			
		c	Forum Koordinasi Jurnalis			
<b>Bidang Pengawasan Perwakilan BKKBN Provinsi</b>					<b>312,437,000</b>	
5297.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal					
5297.EBD.965	Layanan Audit Internal		<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>241,000,000</b>	
	1.1	Jumlah Layanan Audit Internal		<b>dokumen</b>		
		273 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi	<b>1</b>	<b>Dokumen</b>	<b>241,000,000</b>	
		a Evaluasi Pelaksanaan SPIP				
		b Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB				
		c Fasilitas Pengawasan Mitra Kerja				
		d TLHP Internal dan Eksternal				
		e Rapat Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja				
		f Audit/Uji Petik (Bagi Auditor)/ Monev (Bagi Adminwas)				
		g Penyusunan Laporan PKPT dan PKAU Provinsi dan Laporan Hasil				
5297.QIF	Pengawasan dan Pengendalian Layanan					
5297.QIF.001	Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi		<b>1</b>	<b>Layanan</b>	<b>71,437,000</b>	<b>Tagging Stunting</b>
	1.1	Jumlah Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi		<b>layanan</b>		
		298 Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	<b>1</b>	<b>dokumen</b>	<b>71,437,000</b>	
		a Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan Kab/Kota				
<b>Bidang Lalitbang Perwakilan BKKBN Provinsi</b>					<b>137,000,000</b>	
5297.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal					
5297.EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan		<b>106</b>	<b>Orang</b>	<b>137,000,000</b>	
	1.1	Jumlah SDM internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program		<b>Orang</b>		
		215 Pelatihan bagi Penyuluh KB Berbasis Standar Kompetensi	<b>80</b>	<b>Orang</b>	<b>96,000,000</b>	
		a Pelatihan Peningkatan Kompetensi bagi PKB				
		b Peningkatan Kompetensi Aparatur Provinsi				
		217 Pelatihan bagi Fungsional Tertentu	<b>26</b>	<b>Orang</b>	<b>41,000,000</b>	
		a Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu di Provinsi				
		b Orasi Ilmiah Widyaiswara				

Catatan: Kegiatan yang mendukung ProPN, Percepatan Penurunan Stunting, dan kegiatan prioritas K/L (PBDKI) mengacu pada panduan/RAB dan berkoordinasi dengan Unit Kerja Eselon-II (UKE 2) Pengampu

Sekretaris Utama,  
  
Tavip Agus Rayanto

REVISI



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Shodiqin  
**Jabatan** : Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Hasto Wardoyo  
**Jabatan** : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Yogyakarta, 27 Desember 2022  
Pihak Pertama,

Shodiqin



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**PERWAKILAN BKKBN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Menurunnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	1,82 Rata-rata anak per Wanita
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalance Rate/mCPR)	57,18 %
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi	1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	14,50 %
4	Menurunnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	14 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	65,36 (Skala 0-100)
6	Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama Perempuan	1	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23 Tahun
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter	45.056 Keluarga
		2	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat pembinaan GenRe	292 PIK Remaja & 151 BKR
		3	Jumlah Keluarga yang mengakses PPKS	926 Keluarga
		4	Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga	80 %
		5	Jumlah Pemerintah Daerah yang memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah	1 Prov & 5 Kab/Kota
		6	Jumlah Rumah Data Kependudukan Paripurna yang terbentuk di Kampung KB	65 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB
		7	Jumlah Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif	1 prov & 2 kab/kota
		8	Cakupan implementasi pendidikan kependudukan di provinsi	3 Jalur (formal, nonformal, dan informal)
		9	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk	1 prov & 2 kab/kota
		10	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan terpadu isu kependudukan	157 Kampung KB
		11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	71,93 %
		12	Indeks Informasi Metode KB (Method Information Index/MII)	74,69 (Skala 0-100)

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		13	Persentase kesertaan KB di Kabupaten/Kota dengan kesertaan rendah	57,17 % peserta KB
		14	Persentase Kehamilan Yang Tidak Diinginkan	23,30 %
		15	Persentase Pelayanan KB Pascapersalinan	24,41 %
		16	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pengelolaan Program Bangga Kencana	22 Stakeholder/ Mitra
		17	Persentase masyarakat yang terjangkau Program Bangga Kencana	65 %
		18	Persentase Penyuluh KB yang berkinerja baik	75 %
		19	Jumlah pengelolaan Sistem Informasi Keluarga (SIGA)	5 Kab/Kota
		20	Persentase cakupan perangkat dan jaringan sistem Teknologi dan Informasi di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota	100 % Wilayah Prov dan Kab/Kota
		21	Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan fasilitasi penetapan data parameter pembangunan Keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana untuk perencanaan dan evaluasi daerah pembangunan.	1 prov & 2 Kab/kota
		22	Jumlah Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi pembinaan 1000 HPK	56722 Keluarga
		23	Jumlah PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	443 PIK Remaja dan BKR
		24	Jumlah Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi pembinaan Pelayanan Ramah Lansia	143 Kelompok BKL
		25	Jumlah Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	15 Kelompok UPPKA
		26	Jumlah Rumah data kependudukan paripurna di kampung KB yang mendapat fasilitasi pembinaan	62 Kampung KB
		27	Kampung KB yang mendapat fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangga Kencana	5 Kab/Kota
		28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alokasi	377 Faskes
		29	Kampung KB yang mendapat fasilitasi pemberdayaan dalam rangka penurunan stunting	5 Kab/Kota
		30	Jumlah Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	2 Rekomendasi kebijakan
		31	Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	5 Kab/Kota
		32	Jumlah Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	6 kegiatan
		33	Jumlah Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi	1 dokumen (174 Kampung KB)
		34	Jumlah Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota yang dilaksanakan	1 layanan (2 Kegiatan)
		35	Jumlah Layanan Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)	1 Layanan (5 Kab/Kota)
8	Meningkatnya penyelenggaraan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Persentase peserta Diklat yang lulus dengan kategori baik dan sangat baik	65%



NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana yang digunakan sebagai input rumusan Kebijakan Program Bangga Kencana di Provinsi	1 Laporan
		3	Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting	5559 Orang
9	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan dukungan manajemen dalam pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	12 Bulan
		2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan sekretariat percepatan penurunan stunting provinsi	1 kegiatan
		3	Jumlah layanan humas percepatan penurunan stunting tingkat provinsi	1 layanan
10	Mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Indeks ZI WBK	79 (Skala 1-100)
		2	Jumlah Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	1 layanan

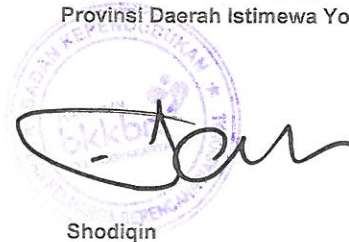
NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi	16,515,881,000
2	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	46,458,313,000
TOTAL ANGGARAN		62,974,194,000

Kepala Badan Kependudukan  
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Yogyakarta, 27 Desember 2022  
Kepala Perwakilan BKKBN  
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Shodiqin



LAMPIRAN DEFINISI OPERASIONAL PER-RAKILAN BIKEN PROVINSI

NO	SASARAN NINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Sasaran	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PENGUKUHAN/INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	UNIT KERJA, SUMBER DATA PENANGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA
1	Meningkatnya angka kelahiran total	1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate (TFR)) per 1000 wanita 40 Tahun	Reproduksi secara alami	1. Total anak lahir anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) sumber BPS Sistem Informasi Rutinitas Statistik (SIRUS) 2. Jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita sampai akhir masa reproduksinya jika dapat melampaui masa melahirkan anak dengan mengikutinya ASFR sesuai (SDG 2007, pp.49)	Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun) $TFR = 5 \times \sum_{15-49} ASFR_i$ Kelompok usia 5 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 30-34 tahun, 35-39 tahun, 40-44 tahun, 45-49 tahun. ASFR: ASFR untuk wanita kelompok usia ke-	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDG	Pendataan Keluarga dan SDG dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDO setiap tahun)	
2	Meningkatnya angka prevalensi kontrasepsi modern	1	Angka prevalensi kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR))	Prevalensi	Prevalensi wanita kawin usia 15-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern pada saat pengamatan. Adapun kontrasepsi modern terdiri dari peserta KB LAM, Implant, MOP, NEM, Simik, FI, Kondem dan IUD.	Banyaknya peserta KB modern dibagi dengan banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) $MCPR = \frac{P_{Modern}}{P_{PUS}} \times 100\%$ P <sub>Modern</sub> : Peserta KB modern P <sub>PUS</sub> : Pasangan Usia Subur usia 15-49 tahun	Tahunan/Bulanan	Pendataan Keluarga/DMK/Statistik Rutin	Penelitian Keluarga dan SDG dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDO setiap tahun)	
3	Meningkatnya kelahiran berisiko tidak terencana	1	Prevalensi kelahiran berisiko yang tidak terencana (Unmet Need)	Prevalensi	1. Prevalensi PUS yang tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin mengontrol kelahiran berikutnya tetapi tidak memakai alat/pelaksanaan KB (simik & IUD) 2. Wanita usia subur yang tidak menggunakan alat/pelaksanaan kontrasepsi namun menggunakan penundaan kehamilan (penggunaan) atau belum sama sekali (kehamilan) SDG 2007, pp.10	Formula Statistik Rutin $PUS \text{ Tanpa Peserta KB} \times 100\% \text{ (IAT+TAL)}$ Keterangan: Formula ASUR 15-19 Tahun	Tahunan/Bulanan	Pendataan Keluarga/SDG/Statistik Rutin	Pendataan Keluarga dan SDG dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDO setiap tahun)	
4	Meningkatnya angka kelahiran remaja	1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 wanita 15-19 tahun	Angka kelahiran selama setahun per 1000 wanita pada kelompok umur 15-19 Tahun. Angka ini dapat digunakan untuk membandingkan tingkat umur muda	Formula ASUR 15-19 Tahun $ASFR_{15-19} = \frac{K_{15-19}}{P_{15-19}} \times 1000$ K <sub>15-19</sub> : jumlah persampulian kelahiran kelompok umur 15-19 tahun P <sub>15-19</sub> : jumlah kelahiran pada kelompok umur 15-19 tahun	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDG	Pendataan Keluarga dan SDG dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDO setiap tahun)	
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	1	Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)	Indeks (skala 0-100)	Pengukuran perbandingan dari kualitas keluarga untuk semua daerah di Indonesia, serta mengklasifikasikan sesuai wilayah dengan status pembangunan keluarga (baik berkembang atau stabil)	Nilai Kompositi dari 3 dimensi dengan memperbandingkan bobot tertentu, yaitu: (a) Dimensi Ketertarikan dengan indikator antara lain (1) kegiatan ibadah, (2) legalitas keluarga, (3) jaminan kesehatan, (4) jaminan keuangan, dan (5) keamanan keluarga. (b) Dimensi Kemandirian dengan indikator antara lain (1) pemenuhan kebutuhan dasar, (2) keberlangsungan pendidikan, (3) kesehatan keluarga, (4) akses informasi. (c) Dimensi Kesejahteraan dengan indikator antara lain (1) interaksi keluarga, (2) interaksi sosial Formula Indeks Bangsa IBangsa = 1/3 (Indeks ketertarikan + Indeks kemandirian + Indeks kesejahteraan) x 100	Tahunan	Pendataan Keluarga/Statistik	Pendataan Keluarga dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDO setiap tahun)	
6	Meningkatnya Indeks Nilai Peran Perempuan Perempuan	1	Indeks Nilai Peran Perempuan (INPP)	Tahun	Umur wanita dan secara wanita pada kelompok umur 10-49 tahun seluruh dunia	Umur wanita median atau 50 persen dari secara wanita kelompok umur 10-49 tahun yang sudah menikah $M_d = X_1 + \left( \frac{F(X_d) - F(X_1)}{F(X_n) - F(X_1)} \right) \cdot (X_n - X_1)$	Tahunan	Pendataan Keluarga/SDG	Penelitian Keluarga dan SDG dilaksanakan 5 tahunan (Updating PBDO setiap tahun)	
7	Meningkatnya Pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga: Kepedulian dan Keluarga Berencana diarahkan kearah yang lebih	1	Jumlah keluarga yang melaksanakan penyisihan dan pemeliharaan pembangunan karakter	Keluarga	Keluarga sebagai TSCD hasil pembinaan BKK, mendayagunakan materi sebagai Tenaga Mula dan menggunakan kartu Kembang Anus (KCA)	Penelitian	BULANAN/TAHUNAN	SIGA/LINAP	DITBALIK	
		2	Jumlah PKR dan PKR yang mendapat pembinaan	PKR/Banyuwangi/SDR	Jumlah PKR yang mendapat pembinaan yang dilaksanakan secara langsung dengan anggaran dan cakupan laporan keuangan PKR di kabupaten Banyuwangi (Banyuwangi)	Jumlah PKR yang mendapat pembinaan yang dilaksanakan secara langsung dengan anggaran dan cakupan laporan keuangan PKR di kabupaten Banyuwangi (Banyuwangi)	Bulanan	SIGA	DITANREM	
		3	Jumlah keluarga yang mendapat PKR	Keluarga	Terdapat yang mendapat pembinaan di PKR	Jumlah keluarga yang mendapat pembinaan di PKR selama tahun berjalan	Tahunan	Survei Sosial Internal Diklat	DITANREM	
		4	Pemenuhan kebutuhan yang melandaskan kegiatan usaha ekonomi keluarga yang didukung dengan adanya dukungan anggaran dari laporan keuangan UPPKS pada aplikasi SIGA (RAU/PKS)	Perusahaan	Jumlah Keluarga yang melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga yang didukung dengan adanya dukungan anggaran dari laporan keuangan UPPKS pada aplikasi SIGA (RAU/PKS)	Indikator Kota yang melandaskan melalui SIGA (Formulir UPPKS) $\sum \frac{\text{Jumlah Keluarga yang melandaskan melalui SIGA}}{\text{Jumlah Keluarga yang ada}} \times 100\%$	Bulanan/Tahunan	ETAC/LINAP	DITPEMKN	
		5	Jumlah Pemenuhan Target yang dilaksanakan oleh dalam pemenuhan parameter kepedulian pada perencanaan pembangunan daerah	Pembangunan Daerah dan Kabupaten	Jumlah Pemenuhan Daerah yang memandatkan CCK dalam pemenuhan parameter kepedulian pada perencanaan pembangunan daerah	Indikator Pemenuhan Daerah yang memandatkan CCK dalam pemenuhan parameter kepedulian pada perencanaan pembangunan daerah	Tahunan	Laporan eksekutif	DITRENDUK	
6	Jumlah Pemenuhan Data kepedulian Keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Rumah Keluarga yang terdapat SK	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator KB yang memiliki pemenuhan kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Tahunan	Laporan eksekutif/Statistik	DITRENDUK		
7	Jumlah Pemenuhan Data kepedulian Keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Perwakilan Keluarga	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator KB yang memiliki pemenuhan kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	DITRENDUK		
8	Kelengkapan informasi pendidikan berbasis data dan informasi	Jalur formal/informal	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator KB yang memiliki pemenuhan kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Sesuai	Laporan E-Monev	3 jalur (formal, nonformal dan informal)	DITRENDUK	
9	Jumlah Pemenuhan Data kepedulian Keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Perwakilan Keluarga	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator KB yang memiliki pemenuhan kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	DITRENDUK		
10	Jumlah Pemenuhan Data kepedulian Keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Kampung KB	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator Data kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Indikator KB yang memiliki pemenuhan kepedulian data keluarga (jumlah keluarga yang telah memiliki SK Pengakuan, telah mengadopsi, mempunyai lebih dari 2 jenis sarana dan prasarana, memiliki mata lebih dari 3 jenis data, mempunyai lengkap data data yang dimanfaatkan)	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	DITRENDUK		

NO	SASARAN KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Satuan	Penjelasan Definisi Umum	Rumus Perhitungan Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PEMUKURAN INDIKATOR KINERJA	METERAN/ALAT	UNIT KERJA - SUMBER DATA PENUNGGUNG JAWAB PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	
11	Peningkatan Fasilitas Kesehatan (Fasilitas) yang siap melayani KB MKJP	11	Persentase Fasilitas Kesehatan (Fasilitas) yang siap melayani KB MKJP	Persen	Persentase fasilitas kesehatan yang siap melayani KB MKJP adalah fasilitas SDM, ketersediaan sarana, dan ketersediaan alat yang dibandingkan dengan total fasilitas yang terakreditasi di BKKBN <ul style="list-style-type: none"> <li>MKJP adalah metode yang mencakup IUD, Implan, MFW, MOP</li> <li>Fasilitas adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terakreditasi di BKKBN yangutamakan memberikan pelayanan IUD dan Implan</li> <li>Persentase SDM adalah tersedianya dokter/bidan yang mendapatkan pelatihan IUD dan Implan (Sumber data : KODIN)</li> <li>Ketersediaan Sarana adalah tersedianya sarana di fasilitas minimal IUD kit dan Implan removal kit (sumber data : KODIN)</li> <li>Ketersediaan Alotri adalah tersedianya alat/kit di fasilitas minimal IUD dan Implan (Sumber data : KODIN atau KIRIN)</li> </ul>	$\frac{\sum \text{Fasilitas yang tersedia SDM, sarana dan alat untuk melayani KB MKJP}}{\sum \text{Fasilitas B yang terakreditasi di BKKBN}} \times 100\%$	Tahunan/Tahunan	Laporan statistik non GOKB dan FA/IB atau SIGA (GOKB dan KIRIN)			DITSEYAN KB
12	Indeks Informasi Metode KB (Metode Informasi IndeksMI)	12	Indeks Informasi Metode KB (Metode Informasi IndeksMI)	Indeks (Skala 0-100)	Penilaian komposisi dan informasi tentang metodologi kontrasepsi, efek samping dan yang dilakukan jika terjadi efek samping Untuk provinsi sebagai alternatif pokok MI menggunakan cakupan informed consent MKJP (masuk dalam variabel Pendidikan-Keluarga 2020)	$I = (\text{Indeks komposisi variabel "Informasi tentang metodologi kontrasepsi"} + \text{"Efek samping"} + \text{"Yang dilakukan jika terjadi efek samping"})$	Tahunan	Pendataan Keluarga		DITAS	
13	Persentase kesetaraan KB di Kabupaten/Kota dengan kesetaraan rendah	13	Persentase kesetaraan KB di Kabupaten/Kota dengan kesetaraan rendah	Persentase KB	Jumlah penerima KB di Kabupaten/Kota dengan kesetaraan rendah dibandingkan jumlah PUS di Kabupaten/Kota dengan Kesetaraan Rendah (Kab/Kota dengan CPR di bawah CPR Provinsi) dilakikan 100	$\frac{\sum \text{jumlah penerima KB di Kabupaten atau Kota dengan Kesetaraan Rendah}}{\sum \text{jumlah PUS di Kabupaten atau Kota dengan kesetaraan rendah}} \times 100\%$				DITYANSUS	
14	Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan	14	Persentase Kehamilan yang tidak direncanakan	Persen	Persentase jumlah ibu yang tidak ingin anak lagi maupun yang ingin hamil namun tidak mendapat jumlah ibu yang saat ini sedang hamil	$\frac{\sum \text{ibu hamil yang tidak ingin anak lagi}}{\sum \text{ibu hamil yang sedang hamil}} \times 100\%$	Tahunan	Pendataan Keluarga	Pendataan Keluarga dan BKKBN dilaksanakan 5 tahunan (Updating PEDDI setiap tahun)	DITKESPRO	
15	Persentase Pelayanan KB Pascapelayanan	15	Persentase Pelayanan KB Pascapelayanan	Persen	KB pascapelayanan merupakan upaya pelayanan kesehatan dengan menggunakan kontracepsi segera setelah melahirkan sampai dengan 42 hari pertama minggu setelah melahirkan Alat dan obat kontrasepsi yang digunakan antara lain IUD, implan, tubektomi, pil dan suntikan	$\frac{\sum \text{ibu yang dilayani KB pascapelayanan}}{\sum \text{ibu melahirkan di tahun berjalan}} \times 100\%$	Tahunan/Bulanan	Statistik Rutin Laporan Dinkes Prov	Pendataan Keluarga dilaksanakan 5 tahunan (Updating PEDDI setiap tahun)	DITKESPRO	
16	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pelaksanaan Program BKKBN	16	Jumlah stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang berperan serta aktif dalam pelaksanaan Program BKKBN	Stakeholder Aktif	Stakeholder/pemangku kepentingan dan mitra kerja yang telah mempartisipasi secara aktif dengan melakukan minimal 20 persen kegiatan yang tercantum dalam ringkasan MOU dan membuat kelembarangan dituju penguatan penduduk dan KB di Kabupaten/Kota berupa di atas 50%	$I = \text{MOU yang ditandatangani} + \text{jumlah kelembarangan utuh di Kab/Kota}$	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	kumulatif per tahun	DITHUBGA	
17	Persentase Masyarakat yang mengikuti Program BKKBN	17	Persentase Masyarakat yang mengikuti Program BKKBN	Persen	Persentase masyarakat yang mengikuti Program BKKBN adalah dengan cara menghadiri, berpartisipasi aktif dalam kegiatan BKKBN melalui media dan berbagai sarana komunikasi massa Media Massa Elektronik: Media Massa Elektronik, Media Massa Cetak, Media Promosi Cetak dan Elektronik dan lain-lain Media Massa Tradisional: Radio, Televisi, Public Place, Spanduk, Flyer, Pamflet, dan lain-lain Media Massa Digital: Website, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain Perangkat Lunak: Komputer, Kader, IMP dan lainnya	$I = \text{Indeks indikator informasi yang diperoleh dari media + Partisipasi}$	Tahunan	BKKP dan Pendataan Keluarga		DITKEMIDU	
18	Persentase Penerima KB yang berkeseluruhan	18	Persentase Penerima KB yang berkeseluruhan	Persen	Persentase Penerima KB adalah jumlah PUS yang telah menerima KB pada tahun berjalan dibandingkan dengan total PUS yang ada pada tahun berjalan apabila PUS yang menerima KB pada tahun berjalan dibandingkan dengan total PUS yang ada pada tahun berjalan apabila PUS yang menerima KB pada tahun berjalan dibandingkan dengan total PUS yang ada pada tahun berjalan	$\frac{\sum \text{Penerima KB}}{\sum \text{PUS}} \times 100\%$	Bulanan/Tahunan	Sumber data E-VISUM E-SIP		DITLILAP	
19	Jumlah pengalokasian sumber informasi kesehatan (SIP)	19	Jumlah pengalokasian sumber informasi kesehatan (SIP)	Kab/Kota	Jumlah pengalokasian sumber informasi kesehatan (SIP) adalah jumlah SIP yang telah dialokasikan pada tahun berjalan	$I = \text{Jumlah pengalokasian sumber informasi kesehatan (SIP) pada tahun berjalan}$	Tahunan/Bulanan	Statistik SIGA	E-VISUM E-SIP	Verifikasi dan validasi data dilaksanakan satu tahun sekali	
20	Persentase cakupan pelayanan kesehatan keluarga dan informasi di TK, Provinsi dan Kabupaten/Kota	20	Persentase cakupan pelayanan kesehatan keluarga dan informasi di TK, Provinsi dan Kabupaten/Kota	Persentase KB	Persentase cakupan pelayanan kesehatan keluarga dan informasi di TK, Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah persentase KB yang telah diterima di TK, Provinsi dan Kabupaten/Kota	$\frac{\sum \text{jumlah penerima KB}}{\sum \text{jumlah penduduk}} \times 100\%$	Bulanan/Tahunan	Laporan Khusus		DITLAPK	
21	Jumlah penerima KB yang berkeseluruhan	21	Jumlah penerima KB yang berkeseluruhan	Persentase KB	Jumlah penerima KB yang berkeseluruhan adalah jumlah KB yang telah diterima di TK, Provinsi dan Kabupaten/Kota	$I = \text{Jumlah penerima KB yang berkeseluruhan}$	Tahunan	Laporan Khusus		DITRENDUK	
22	Jumlah keluarga dengan tingkat literasi yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK	22	Jumlah keluarga dengan tingkat literasi yang mendapatkan fasilitas pembinaan 1000 HPK	Keluarga	Keluarga yang mendapat literasi yang mendapatkan promosi dan KE penunahan 1000 HPK	$I = \text{Keluarga yang mendapat literasi yang mendapatkan promosi dan KE penunahan 1000 HPK pada tahun berjalan} / \text{jumlah keluarga berdaya yang berada pada tahun berjalan} \times 100\%$	Tahunan	Smart DJA			
23	Jumlah PK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	23	Jumlah PK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Persentase KB	Jumlah PK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	$I = \text{Jumlah PK Remaja dan BKR yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu}$	Bulanan	e-Monev Bappenas/SMART/SIGA		DITHANREM	
24	Jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	24	Jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Keluarga, BKK	Jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	$I = \text{Jumlah keluarga yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu}$	Tahunan	Statistik		DITHANLAN	
25	Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	25	Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Jumlah kelompok UPPKA	Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu	$I = \text{Jumlah kelompok UPPKA yang mendapatkan fasilitas pembinaan BKKBN-Kespro dan BKR Remaja Putri sebagai Calon Ibu}$	Bulanan/Tahunan	Laporan Unit Kerja			



NO	SARAFAS KINERJA	NO	INDIKATOR KINERJA	Sasaran	Penjelasan Definisi Utama	Format Pengukuran Indikator Kinerja	Periode Waktu Pengukuran Indikator Kinerja	SUMBER DATA PENGUKURAN INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN	UNIT KERJA, SUMBER DATA, FENANGGUNG JAWAB, PENGURUM INDIKATOR KINERJA
		26	Jumlah Rumah dan Kependudukan paripam di kampung KB yang mendapat fasilitas penunahan	Kampung KB	Jumlah Rumah dan Kependudukan paripam yang didaftarkan di kampung KB	1 kampung KB yang mendapatkan fasilitas dalam pengemb- ngan Rumah Data Kependudukan dan di rumah Kampung/Bumih Desa menjadi kah/kei paripam	Tahunan	Laporan ekwiter		DITRENDUK
		27	Kampung KB yang mendapat fasilitas intensifikasi dan Ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana	kabikota	Jumlah kabupaten/kota yang kampung KB nya telah mendapatkan fasilitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana. info dengan lingkungan teknis dan pemerintah pusat, pemenuhan daerah maupun mitra terkait untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas kegiatan Bangga Kencana di Kampung KB dalam rangka menuju Kampung KB mandiri	1 kabupaten/kota yang kampung KB nya telah mendapatkan fasilitas intensifikasi dan ekstensifikasi kegiatan Bangga Kencana	Tahunan	Aplikasi Kampung KB, Laporan Khusus Unit Kerja		DITAMDUK
		28	Jumlah Faskes yang mendapat pemenuhan ketersediaan Alunan	Faskes	Faskes baik FKTP maupun FKRTL yang terdaftar di BIKBN yang mendapatkan ketersediaan pemenuhan alunan	1 FKTP dan FKRTL yang terregistrasi yang mendapatkan pemenuhan ketersediaan alunan	Tahunan	Laporan Unit Kerja		DITAKSES
		29	Kampung KB yang mendapat fasilitas pemberdayaan dalam rangka penunahan stunting	kabikota	Jumlah kabupaten/kota yang Kampung KB nya telah mendapatkan fasilitas pemberdayaan lingkungan teknis pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun mitra terkait dalam rangka penunahan dan pencegahan stunting misalnya pemberdayaan kelompok masyarakat di Kampung KB	1 kabupaten/kota yang Kampung KB nya telah mendapatkan fasilitas pemberdayaan oleh pemerintah daerah maupun mitra terkait dalam rangka penunahan dan pencegahan stunting	Tahunan	Aplikasi Kampung KB, Laporan Khusus Unit Kerja		DITAMDUK
		30	Jumlah Rekomendasi kegiatan hasil Studi Kasus Stunting provinsi	rekomendasi kegiatan	Jumlah rekomendasi kegiatan tentang pengembangan kegiatan pencegahan penurunan stunting yang diperoleh berdasarkan hasil kajian studi kasus stunting dan pembelajaran implementasi kegiatan pencegahan penurunan stunting	1 rekomendasi kegiatan pengembangan kegiatan pencegahan penurunan stunting berdasarkan studi kasus dan pembelajaran kegiatan pencegahan penurunan stunting	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		DITAMDUK
		31	Pelaksanaan Insan Aksi Stunting, Manajemen Krisis Stunting Kabupaten dan Komunitas, Koordinasi pelayanan KB di faskes	Kabupaten	Pelaksanaan Insan Aksi Stunting, Manajemen Krisis Stunting Kabupaten dan Komunitas, Koordinasi pelayanan KB di faskes	1 Kabupaten/kota yang melakukan Insan Aksi Stunting, Manajemen Krisis Stunting Kabupaten dan Koordinasi pelayanan KB di faskes	Tahunan	Laporan Unit Kerja		DITAS
		32	Analisis Penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten	Provinsi	Analisis kegiatan penyelenggaraan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan Kabupaten	1 kegiatan koordinasi tugas Provinsi dan Kabupaten	Tahunan	Laporan Kegiatan		DITLAP
		33	Jumlah Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	Unit Kerja	Jumlah Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	1 Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	Tahunan	New Skill / Pendirian Keluarga	Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	DITLAPTIK
		34	Jumlah Kampanye Promosi, Penunahan Stunting, Strategi Promosi dan keluarga yang dilaksanakan	Layanan	Kampanye yang dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya KIE dalam pemenuhan prestasi pencegahan stunting melalui 3 layanan 1. Kampanye tingkat provinsi 2. Kampanye tingkat kabupaten/kota 3. Promosi & KIE program Percepatan Penurunan Stunting di Wilayah Khusus	1 Layanan Kampanye Promosi dan Koordinasi KIE	1 tahun	Ruang Layanan Promosi		DITKOMU
		35	Jumlah Layanan Penunahan Stunting dan Keluarga yang Stunting (PUSU)	Layanan	Layanan penunahan stunting dan keluarga yang stunting pada Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang ditetapkan	Jumlah layanan penunahan stunting dan keluarga yang stunting	Tahunan	Keluarga	PKI PKI dilaksanakan oleh UJUN sebagai	DITLAPTIK
8	Meningkatkan jumlah kegiatan dan jumlah pendanaan dari penganggaran di Provinsi	1	Penyusunan rencana DIPA yang akurat sebagai dasar bagi pelaksanaan kegiatan	Provinsi	Penyusunan DIPA Anggaran yang mengaitkan Pembiayaan atau Penerimaan Monev kegiatan yang Akurat dan Lulus dengan kegiatan baik dan sangat baik	1. DIPA anggaran yang mengaitkan DIPA Akurat dan Lulus dengan kegiatan baik dan sangat baik 2. DIPA anggaran yang mengaitkan DIPA Akurat dan Lulus dengan kegiatan baik dan sangat baik 3. DIPA anggaran yang mengaitkan DIPA Akurat dan Lulus dengan kegiatan baik dan sangat baik	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja	Berikut ini adalah data pelaksanaan Program Bangga Kencana yang menggunakan data primer maupun data sekunder yang telah selalu kami diupdate	PUSUKLAT KKB
		2	Jumlah Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan dan terdapat literatur yang dihasilkan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat di Provinsi	Layanan	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan dan terdapat literatur yang dihasilkan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat di Provinsi	1 Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan dan terdapat literatur yang dihasilkan yang dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat di Provinsi	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		PRODIKUDU
		3	Jumlah Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	Unit Kerja	Jumlah Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	1 Tim Kerja Stunting dan Keluarga yang Stunting yang terakreditasi	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		PUSUKLAT KKB
9	Meningkatkan jumlah dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan Program Penunahan Stunting dan Keluarga yang Stunting di Provinsi	1	Dukung terwujudnya Program penunahan stunting dan keluarga yang stunting	Unit Kerja	Dukung terwujudnya Program penunahan stunting dan keluarga yang stunting	Jumlah dukungan terwujudnya Program penunahan stunting dan keluarga yang stunting	Bulanan dan Tahunan	Laporan Internal		BIRUMAS
		2	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayanan penunahan stunting provinsi	Kegiatan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan kegiatan pelayanan penunahan stunting provinsi	1 Kegiatan pelayanan penunahan stunting provinsi			Laporan Khusus Unit Kerja	BIREN
		3	Jumlah layanan humas dan publikasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	Layanan	Jumlah layanan humas dan publikasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	Jumlah layanan humas dan publikasi dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting	Tahunan	Laporan Khusus Unit Kerja		BIRUMAS
10	Meningkatkan jumlah dan dukungan manajemen dalam pelaksanaan Program Penunahan Stunting dan Keluarga yang Stunting di Provinsi	1	Analisis Layanan Stunting dan Keluarga yang Stunting	Unit Kerja	Analisis Layanan Stunting dan Keluarga yang Stunting	Jumlah layanan Stunting dan Keluarga yang Stunting	Tahunan	Laporan Hasil Evaluasi		BIRUMAS
		2	Analisis Layanan Stunting dan Keluarga yang Stunting	Unit Kerja	Analisis Layanan Stunting dan Keluarga yang Stunting	Jumlah layanan Stunting dan Keluarga yang Stunting	Tahunan	Laporan Hasil Evaluasi		BIRUMAS

## LAPORAN HASIL

# PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

# Triwulan IV 2022

#017972

PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL D.I. YOGYAKARTA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

## LAPORAN TRIWULANAN

**Tahun Anggaran** : 2022

**Kementerian/Lembaga** : 068 - BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN)

**Unit Kerja Eselon I** : 01 - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

**Triwulan** : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
<b>3331.ABN.001</b>													
<b>Rekomendasi kebijakan Evaluasi Program Bangga Kencana</b>													
1	<b>3331.ABN.001.218</b> Pelaksanaan evaluasi dan analisis program Bangga Kencana untuk rekomendasi kebijakan	Laporan	1	1	52,365,000	52,102,500	99%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.BDB.001</b>													
<b>Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan</b>													
2	<b>3331.BDB.001.189</b> Pengelolaan kebijakan dan strategi peningkatan pelayanan KB di faskes	Dokumen	1	1	19,716,000	19,412,800	98%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
3	<b>3331.BDB.001.190</b> Penyediaan fasilitasi peningkatan kompetensi bagi Tenaga Kesehatan KB	Tenaga Kesehatan (Kumulatif)	254	254	45,250,000	45,250,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
4	<b>3331.BDB.001.191</b> Penyerasian Kebijakan dan Penguatan Program Pelayanan KB Pria	Dokumen	1	1	9,700,000	9,700,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
5	<b>3331.BDB.001.192</b> Fasilitasi Peningkatan dan Pembinaan Kesertaan KB Pria	Kab/Kota	5	5	23,100,000	23,100,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
6	<b>3331.BDB.001.193</b> Penyerasian Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kab/Kota	Dokumen	1	1	15,650,000	15,650,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
7	<b>3331.BDB.001.194</b> Penggerakan Pelayanan KB MKJP dan Pencabutan Implan serta Komplikasi dan Kegagalan	Kab/kota	5	5	22,000,000	22,000,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
8	3331.BDB.001.195 Integrasi Penggarapan Program dan Pelayanan KB Bersama Mitra Kerja di Wilayah Galciltas	Mitra Kerja (Kumulatif)	1	1	23,370,000	23,353,794	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
9	3331.BDB.001.196 Peningkatan implementasi penggerakan promosi dan konseling Kesehatan Reproduksi wilayah Risiko tinggi	kab/kota	5	5	21,300,000	21,300,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
10	3331.BDB.001.197 Peningkatan Kesertaan KB PP dan PK	kab/kota	5	5	11,950,000	11,950,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
11	3331.BDB.001.198 Penguatan Peran Mitra Kerja yang Terlibat dalam Promosi dan Konseling Keserhatan Reproduksi	Mitra	5	5	42,400,000	42,300,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.DCJ.001</b>													
<b>SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota</b>													
12	3331.DCJ.001.216 Pelatihan Teknis Program Bangsa Kencana	Orang	80	60	191,680,000	191,193,850	100%	Selesai	karena terkena AA jadi target disesuaikan menjadi 60	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.FBA.001</b>													
<b>Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga</b>													
13	3331.FBA.001.171 Fasilitasi Pembinaan Tumbuh Kembang Balita dan Anak dalam rangka pembentukan Karakter	Kab/Kota	5	5	41,250,000	41,250,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
14	3331.FBA.001.172 Pengelolaan PPKS tingkat provinsi sebagai layanan publik dan fasilitasi PPKS di tingkat kecamatan (Balai Penyuluhan)	PPKS	10	10	113,380,000	113,380,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.FBA.002</b>													
<b>Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk</b>													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
15	<b>3331.FBA.002.179</b> Peningkatan kualitas Bimbingan Teknis penyusunan profil/parameter, proyeksi penduduk, serta advokasi penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Kab/Kota	2	2	22,500,000	22,500,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
16	<b>3331.FBA.002.180</b> Koordinasi pemanfaatan dan pengintegrasian data kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah	Provinsi dan Kab/Kota	1	1	450,000	450,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
17	<b>3331.FBA.002.181</b> Peningkatan kualitas bimbingan teknis perencanaan pembangunan daerah	Provinsi dan Kab/Kota	1	1	1,750,000	1,750,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
18	<b>3331.FBA.002.182</b> Peningkatan Sistem Registrasi Rumah Data Kependudukan	Rumah Data Kependudukan	86	86	14,880,000	14,880,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
19	<b>3331.FBA.002.184</b> Peningkatan Kualitas Penggerakan Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/kota yang efektif	Pemda Provinsi & Kab/Kota	1	2	44,260,000	44,090,500	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
20	<b>3331.FBA.002.185</b> Pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di tingkat provinsi dan kab/kota (formal, non formal dan informal)	Pemda Provinsi & Kab/Kota	1	2	21,590,000	21,500,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
21	<b>3331.FBA.002.186</b> Penguatan internalisasi Kebijakan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kabupaten/Kota	Kab/Kota	2	2	62,370,000	62,342,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
22	<b>3331.FBA.002.187</b> Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Kampung KB dan Bimbingan teknis Kampung KB	Pemerintah Daerah Kab/Kota	3	3	16,700,000	16,700,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.FBA.003</b> <b>Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga</b>													
23	<b>3331.FBA.003.200</b> Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	jumlah mitra aktif	14	14	17,600,000	17,600,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
24	<b>3331.FBA.003.201</b> Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Program Bangga Kencana	jumlah mitra aktif	7	7	27,971,000	27,966,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
25	<b>3331.FBA.003.202</b> Peningkatan Kelembagaan pada Kab/Kota yang memiliki Dinas Pengendalian Penduduk dan KB yang utuh	kab/kota	1	1	15,310,000	15,309,150	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
26	<b>3331.FBA.003.203</b> Pengembangan Kebijakan dan dukungan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	provinsi	1	1	17,231,000	17,231,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
27	<b>3331.FBA.003.205</b> Peningkatan promosi dan KIE Program Bangga Kencana melalui Media Massa Cetak, Media Elektronik, Media Online serta Media Luar Ruang	frekuensi	4	4	18,750,000	18,750,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
28	<b>3331.FBA.003.206</b> Peningkatan Kualitas Penggerakan Tim Advokasi Terpadu Program Bangga Kencana	kegiatan	3	3	22,550,000	22,550,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
29	<b>3331.FBA.003.207</b> Pembinaan dan evaluasi Kinerja Penyuluh KB/PLKB	dokumen	12	12	32,829,000	32,828,400	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
30	<b>3331.FBA.003.208</b> Pembinaan Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan (PPKBD dan Sub PPKBD)	PPKBD/Sub PPKBD	3971	3,971	31,730,000	31,730,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
31	<b>3331.FBA.003.209</b> Pembinaan Penguatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional	mekop	31	31	43,930,000	43,930,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
32	<b>3331.FBA.003.210</b> Penguatan tupoksi dan kinerja IPeKB dan Penyuluh KB/PLKB	orang	197	197	32,764,000	32,550,600	99%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
33	<b>3331.FBA.003.211</b> Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi data dan informasi Program Bangga Kencana	kab/kota	5	5	11,323,000	10,970,000	97%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	



NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
34	3331.FBA.003.212 Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan jaringan STIK program Bangga Kencana	provinsi	1	1	14,800,000	14,791,100	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
35	3331.FBA.003.213 Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi, Dokumentasi dan pengelolaan PPID	provinsi	1	1	32,064,000	31,852,500	99%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.PBG.001</b> <b>Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi</b>													
36	3331.PBG.001.295 Studi kasus dan pembelajaran baik (provinsi)	laporan	2	2	150,000,000	150,000,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.PEA.001</b> <b>Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota</b>													
37	3331.PEA.001.292 SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota	provinsi dan kab/kota	6	6	791,170,000	791,049,200	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QAH.001</b> <b>Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes</b>													
38	3331.QAH.001.290 Audit Stunting dan Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota	kegiatan	5	5	599,130,000	598,929,800	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
39	3331.QAH.001.291 Koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes	faskes	377	374	599,493,000	599,341,040	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QDD.001</b> <b>PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu</b>													
40	3331.QDD.001.176 Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)	PIK Remaja dan BKR	443	443	1,210,021,000	1,209,572,700	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QDD.002</b> <b>Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia</b>													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
41	<b>3331.QDD.002.177</b> Penguatan Pelaksanaan tujuh dimensi lansia tangguh dan pendampingan perawatan jangka panjang bagi lansia di Kelompok BKL	Kelompok BKL	143	143	301,700,000	301,700,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QDD.003</b> Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga													
42	<b>3331.QDD.003.178</b> Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB KB lestari MKJP dan keluarga akseptor KB mandiri MKJP di kampung KB percontohan	Kelompok UPPKA Percontohan	15	15	135,940,000	135,384,200	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QDD.004</b> Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB													
43	<b>3331.QDD.004.188</b> Peningkatan Kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna	Kampung KB Percontohan	62	62	622,368,000	622,065,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QDE.001</b> Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK													
44	<b>3331.QDE.001.173</b> Promosi dan KIE 1000 HPK	Kab/Kota	56722	56,722	222,483,000	222,259,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
45	<b>3331.QDE.001.174</b> Pelaporan pelaksanaan Promosi dan KIE 1000HPK	Laporan	1	1	24,718,000	24,646,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QEI.001</b> Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon)													
46	<b>3331.QEI.001.199</b> Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister (termasuk pembinaan, evaluasi dan ketersediaan alokon)	Dokumen	377	377	1,798,870,000	1,798,811,766	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QMA.001</b> Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI)													
47	<b>3331.QMA.001.214</b> Peningkatan kualitas, cakupan pengelolaan serta pemanfaatan basis data keluarga Indonesia	kab/kota	5	5	4,938,399,000	4,930,244,699	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
<b>3331.QMA.003</b>													
<b>Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi</b>													
48	<b>3331.QMA.003.293</b> Verifikasi dan validasi data kasus stunting dan keluarga resiko stunting	dokumen	1	1	265,006,000	264,320,200	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.QMB.001</b>													
<b>'Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota</b>													
49	<b>3331.QMB.001.294</b> Kampanye Percepatan Penurunan Stunting	kegiatan	58	58	230,000,000	229,833,550	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.SCM.001</b>													
<b>Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting</b>													
50	<b>3331.SCM.001.317</b> Pelatihan dan Pendalaman	Orang	5559	5,559	2,840,054,000	2,836,201,400	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.UBA.001</b>													
<b>Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB)</b>													
51	<b>3331.UBA.001.275</b> Fasilitasi Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana	kab/kota	5	5	331,866,000	331,555,050	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>3331.UBA.002</b>													
<b>Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting</b>													
52	<b>3331.UBA.002.289</b> Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di kampung kb	kab/kota	5	5	318,200,000	317,689,500	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.CAN.001</b>													
<b>Pengadaan sarana dan prasana TIK Provinsi</b>													
53	<b>5297.CAN.001.321</b> Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Provinsi	Unit	2	2	88,750,000	88,680,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.EBA.960</b>													
<b>Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal</b>													
54	<b>5297.EBA.960.266</b> Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Kegiatan	1	1	32,962,000	32,961,500	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
55	5297.EBA.960.267 Pengelolaan Keuangan dan BMN	satker	1	1	90,305,000	90,304,850	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
56	5297.EBA.960.268 Pengelolaan Manajemen Kepegawaian	pegawai	19	19	72,050,000	71,857,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
57	5297.EBA.960.269 Pengelolaan perencanaan Program dan Anggaran	dokumen	1	1	98,838,000	98,836,300	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.EBA.994</b> <b>Layanan Perkantoran</b>													
58	5297.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	Bulan Layanan	13	13	42,754,721,000	40,694,504,881	95%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
59	5297.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Bulan Layanan	12	12	2,513,260,000	2,505,488,462	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.EBB.951</b> <b>Layanan sarana internal provinsi</b>													
60	5297.EBB.951.271 Pengadaan sarana Fasilitas Perkantoran	Unit	3	3	11,250,000	11,250,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.EBC.996</b> <b>Layanan Pendidikan dan Pelatihan</b>													
61	5297.EBC.996.215 Pelatihan bagi Penyuluh KB Berbasis Standar Kompetensi	orang	80	80	96,000,000	95,810,250	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
62	5297.EBC.996.217 Pelatihan bagi Fungsional Tertentu	orang	26	26	11,000,000	10,311,400	94%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.EBD.965</b> <b>Layanan Audit Internal</b>													
63	5297.EBD.965.273 Pelaksanaan Pengawasan Program Bangsa Kencana di Provinsi	Dokumen	1	1	120,490,000	120,215,850	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.PEA.001</b> <b>Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi</b>													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
64	5297.PEA.001.296 Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi	kegiatan	1	1	366,000,000	365,996,900	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.QAH.001</b> <b>Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi</b>													
65	5297.QAH.001.297 Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi	kegiatan	1	1	131,250,000	130,878,800	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	
<b>5297.QIF.001</b> <b>Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi</b>													
66	5297.QIF.001.298 Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi	dokumen	1	1	71,437,000	71,407,000	100%	Selesai	dalam tahap selesai	100 %	<b>Sudah</b>	Tidak Ada Masalah	

## **Lembar Pengesahan**

Mengetahui,  
Kepala Unit / Satuan Kerja

**[masih kosong]**



**Kementerian PPN/  
Bappenas**

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan  
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**

**NOTULEN RAPAT PENGENDALIAN PROGRAM  
PERWAKILAN BKKBN DIY**

Hari, tanggal : Senin, 8 Agustus 2022  
 Pukul : 09.00-12.00  
 Tempat : Ruang Kencana  
 Pimpinan Rapat : Shodiqin, SH, MM (Kepala Perwakilan BKKBN DIY)  
 Moderator : Novitrisia Widowati, SH, M.Sc (Sekban)  
 Pemateri : Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc (Koordinator Bidang Adpin)  
 Septiana Rakhmawati, S.Far, Apt.(Sub Koord Keuangan dan BMN)

Susunan Acara :

1. Pembukaan
2. Sambutan Kepala Perwakilan BKKBN DIY
3. Penyerahan Penghargaan
4. Paparan Materi dan Diskusi
5. Penutup

No.	Pemateri	Materi	Resume
1.	Ibu Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc (Koordinator Bidang Adpin)	Data Capaian Program s/d Juli 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cakupan K/0 Tempat Pelayanan KB dilaporkan 733 dari total 737.</li> <li>2. Cakupan K/0 BKB tercapai 1219 dari total 1435, Kab. Kulon Progo sudah 100%.</li> <li>3. Cakupan K/0 BKR tercapai 603 dari total 658, Kab. Kulon Progo sudah 100%.</li> <li>4. Cakupan K/0 BKL tercapai 721 dari total 798, Kab. Kulon Progo sudah 100%</li> <li>5. Cakupan K/0 UPPKA tercapai 1846 dari total 2175, tertinggi Kab. Sleman 97%</li> <li>6. Cakupan K/0 PIK-R tercapai 388 dari total 419, Kab. Kulon Progo sudah 100%.</li> <li>7. Cakupan K/0 Setara Poktan kampung KB 150 belum terupdate</li> <li>8. Capaian laporan bulanan total pelayanan KB sampai dengan Juli 2022 adalah 81.702.</li> <li>9. Pelayanan KB tertinggi yaitu Suntikan 3 Bulan Progestin dengan jumlah 29.579.</li> <li>10. KB Pasangan Baru total 19,3% dan terendah adalah Kab. Bantul dengan capaian 13%.</li> <li>11. Capaian peserta KB Aktif total 83,61% tertinggi adalah Kota Yogyakarta 84,51%.</li> <li>12. Capaian peserta KB PA / PUS yaitu 59,29%, tertinggi Kab. Gunung Kidul dan terendah Kota Yogyakarta.</li> <li>13. Capaian PUS Bukan Peserta KB 24,78%.</li> </ol>



			<p>14. Capaian Sekolah Siaga Kependudukan 14 SMP.</p> <p>15. Jumlah Rumah Dataku DIY 162 dan 32 diantaranya sudah Paripurna.</p> <p>16. Target ProPN Rumah Dataku 62 dan 6 diantaranya sudah Paripurna. Diharapkan semua dapat paripurna dengan selalu updateing melalui K/0 aplikasi New Siga.</p> <p>17. Fasilitasi kegiatan pertemuan Rumah Dataku ProPN harap dilaksanakan sesuai dengan jadwal RTL.</p>
2.	Ibu Septiana Rakhmawati, S.Farm. (Sub Koordinator Keuangan dan BMN)	Stock Alokon dan Realisasi DAK	<p>1. Ketersediaan alokon di Gudang BKKBN DIY masih mencukupi kebutuhan.</p> <p>2. Ketersediaan alokon pada aplikasi new siga masih belum akurat. Cakupan pelaporan dan validitas data sangat menentukan pengambilan kebijakan</p> <p>3. Penggunaan kontrasepsi jenis baru perlu disosialisasikan</p> <p>4. Penggunaan aplikasi SIRIKA (MIMTools dan Stokku) menghasilkan data realtime.</p> <p>5. DAK dari aplikasi Morena diupdate tiap 3 bulan, dan belum ada penambahan realisasi DAK Fisik Kab. Bantul. Diharapkan pada pelaporan setelah ini sudah ada penambahan realisasi.</p> <p>6. Realisasi DAK Fisik dan Non Fisik tertinggi sampai dengan Juli 2022 adalah Kab. Gunung Kidul.</p>

Yogyakarta, 8 Agustus 2022

Notulis

Diah Sulistiyowati, SE

FOTO KEGIATAN



## **Notulen Rapat Pengendalian Program Perwakilan BKKBN DIY**

Hari, tanggal : Senin, 30 Mei 2022  
Pukul : 09.00-12.00  
Tempat : Ruang Kencana  
Pimpinan Rapat : Shodiqin, SH, MM (Kepala Perwakilan BKKBN DIY)  
Moderator : Novitrisia Widowati, SH, M.Sc (Sekban)  
Pemateri : Rohdhiana Sumariati, S.Sos, M.Sc (Adpin)  
Sofia Nur yulida Furi, S.Si, MA (Sub Koord Perencanaan)

Materi :

### 1. Arahan Kepala BKKBN DIY :

- a. Kegiatan radalgram rutin dilakukan baik di tingkat nasional maupun provinsi. Provinsi DIY sudah mengikuti program nasional dan telah dievaluasi oleh pusat. Radalgram kali ini akan membahas tentang target, realisasi program serta keuangan dan stok alokon di provinsi maupun kab/kota.
- b. Dalam rangka Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni 2022 nanti, akan dilaksanakan program KB sejuta aseptor dalam hal ini target untuk Provinsi DIY adalah sekitar 10.000. Untuk itu mohon dipantau ketersediaan alokon di kab/kota. Kami harapkan kab/kota selalu melaporkan alokon melalui Sirika.
- c. DAK Fisik/Non Fisik adalah salah satu anggaran yang dapat diberikan BKKBN kepada Kab/Kota sehingga bapak Kepala BKKBN selalu berpesan untuk penyerapan DAK dapat dimaksimalkan. Anggaran BOKB yang berupa bantuan kepada TPK berupa pulsa @100.000 di Kab Kulon Progo sudah dibayarkan sampai dengan 5 bulan. Diharapkan dapat diserap maksimal di setiap kab/kota.

### 2. Materi Koordinator Bidang Adpin (Data Capaian):

Radalgram kali ini merupakan radalgram pertama yang menggunakan data New Siga. Maka ada kemungkinan data belum sesuai dengan dilapangan.

- a. Cakupan K/0 Tempat Pelayanan KB masih kurang update 1 tempat pelayanan dari Bantul dan 2 tempat pelayanan dari Sleman
- b. Cakupan K/0 BKB belum terupdate 100%, jumlah keseluruhan 1922 terupdate 1882.
- c. Cakupan K/0 BKR belum terupdate 100%, jumlah keseluruhan 658 terupdate 534.
- d. Cakupan K/0 BKL belum terupdate 100% , jumlah keseluruhan 796 terupdate 708.
- e. Cakupan K/0 UPPKA belum terupdate 100%, jumlah keseluruhan 2168 terupdate 1829.
- f. Cakupan K/0 PIK R, keseluruhan 93%
- g. Cakupan K/0 Setara Poktan terdiri dari Kampung KB 100% terupdate, Rumah Dataku 99% sedangkan PPKS sudah terupdate 100%.
- h. Capaian laporan bulanan New Siga per 23 Mei 2022
  - Total Pelayanan KB 43.144 di seluruh DIY
  - PB dan PB MKJP terendah adalah Kab Bantul
  - Capaian Peserta KB Per Mix Tertinggi Tubektomi dan terendah Pil.
  - Capaian Peserta KB Baru secara keseluruhan masih merah semua, atau 11,13% masih sangat kurang dari target

- Capaian PB terhadap KKP sampai dengan April sudah mencapai 11,1%. Bila trend nya masih seperti ini kita tidak akan bisa mencapai target dan proyeksi nya hanya 39% sampai dengan akhir tahun.
- Capaian KB ulangan tertinggi adalah Suntikan 3 bulan Progestin.
- Capaian Peserta KB Ganti Cara tertinggi adalah Implant 2 batang.
- Capaian peserta KB aktif per Mix Kontrasepsi tertinggi adalah vasektomi yaitu 2409,72% sedangkan terendah adalah metode MAL.
- Capaian KB Aktif diseluruh kab/kota Prov DIY ada di grade kuning (Cukup).
- Data PA/PUS 58,37% yang sudah dikelola.
- Angka Unmet Need Provinsi DIY adalah 24,03%, dan prosentase terendah adalah Kab. Gunung Kidul.

3. Materi Sub Koordinator Perencanaan (Stock Alokasi dan Realisasi DAK)

- a. Sumber data dari Sirika dan Stokku. Persediaan Gudang BKKBN DIY IUD 850 set, Pil 130.900 cycle, Kondom (CO) 42.300 lusin, Suntik Kombinasi 1cc 3 bulanan 5.980 vial, dan Implan 7930 set.
- b. Data realisasi di aplikasi Morena masih sangat rendah, kemungkinan karena masih triwulan pertama. Diharapkan untuk selalu update data realisasi di aplikasi Morena.
- c. Sesuai dengan Surat Sestama BKKBN No.1682 tentang Penundaan pengadaan BKB Kit sampai dengan ada peraturan baru.
- d. Percepatan penyerapan anggaran DAK Fisik/Non Fisik dan BOKB.

4. Moderator :

Mohon klarifikasi untuk DAK Fisik/Non Fisik mengapa sangat kecil realisasinya ? Mohon dari Kab/Kota dapat mengklarifikasi.

5. Bp. Zainal Bidang KSPK

Persiapan Harganas ada kegiatan yang nanti melibatkan UPPKA, surat akan segera meluncur terkait dengan Live Selling. UPPKA untuk berpartisipasi memasarkan produknya, link dan web melalui surat. Memasarkan produk melalui live dan tebeng. Nanti akan dipilih 3 UPPKA yang bisa mewakili ProPN di Live Selling.

6. Bu Ratna Bidang KBKR

Mengkonfirmasi bahwa di BKKBN suntik itu jenisnya ada 2 yaitu Suntik Progestin dan Suntik Kombinasi, di slide tadi yang ditampilkan adalah suntik progestin bukan suntik kombinasi. Suntik kombinasi belum masuk di Sirika.

7. Bp. Daryono Bidang Latbang

Kegiatan pemantauan sekolah lansia Dayakan Kulon Progo dan pengembangan media pembelajaran TPK.

8. Bp Mardiyo (Kulon Progo)

Capaian KB Baru di KP sekitar 11%, meskipun dibanding Kab/Kota lain sudah di no.2. Panduan Harganas 2022 karena di KP ada pelayanan 1 juta asektor nanti ada pelaksanaan Harganas di tingkat Kabupaten di Kapanewon wates meskipun lokasi pasti menggunu dari Kapanewon Wates. Nantinya pelaksanaan sepertinya akan diadakan Senam Keluarga. Kemarin sudah dicoba Senam Bangsa Kencana saat pemilihan kampung KB. Kemudian juga akan diadakan Jathilan dan akan dimasukkan pesan2

tentang Ketahanan Keluarga. Kegiatan lain expose PPKA akan dilakukan disamping pelayanan KB. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan ketersediaan Alokon di KP termasuk Pil Kombinasi karena sudah mepet

Ibu Niken Kab Sleman.

- a. Melaporkan bahwa di kab Sleman di RS Sadewa dari 84 ada 77 peserta dapat dilaksanakan, penyebab tidak bisa di laksanakan adalah karena positif hamil dan ada beberapa kendala lainnya.
- b. New Siga mohon arahan untuk evaluasi sebelumnya ditentukan tanggal pengisian new siga, sedangkan tahun ini belum diinfo tanggal pengisian new siga. Sebaiknya ada panduan. New siga belum bisa menggambarkan sebenarnya dan belum bisa digunakan sebagai bahan analisis.
- c. Pembangunan balai penyuluhan di Kapanewon Sleman sudah on progress dan kira2 di bulan Juli sudah diselesaikan untuk kegiatan DAK Fisik.
- d. Hasil evaluasi tadi didepan, terkait capaian yang masih merah (KB Baru) mohon arahan metode penghitungan dan bagaimana definisi operasional sebenarnya. Apakah targetnya terlalu tinggi ? atau cara perhitungan yang keliru? Mohon kab/kota bisa diberi refreshing perhitungan capaian. Apakah setia tahunnya semua peserta dianggap menjadi peserta baru lagi ?

9. Ibu Perwakilan UPD Kota Yogyakarta

- a. Data capaian program dipaparkan setiap bulan dalam perencanaan kegiatan selanjutnya. Capaian bulan April sudah dipaparkan, untuk bulan Mei PUS di Kota Yogyakarta ada 54,15%. Unmeet Need di Kota cukup tinggi dari UPD akan berkoordinasi terkait kebutuhan alat kontrasepsi.
- b. Target MOP di data 0, sebenarnya ada 2 mungkin belum melaporkan.
- c. Pengadaan Kit Stunting ditunda sesuai arahan.
- d. Pengendalian penduduk ada sekolah siaga kependudukan, sudah ada 5. Bahwa tahun ini ditargetkan ada 15 disemua Kemantren.
- e. Penggerakan Kampung KB di kota sudah ada 45. Terkait impres penggerakan kampung KB ?
- f. Petunjuk program Dashat?
- g. Layanan Lansia terintegrasi apakah program ini sudah dimulai dan berkelanjutan ?
- h. Capaian menurut data real peserta KB IUD tercapai 157 , selisih terjadi karena data belum diinputkan.

10. Ibu Tutik Kota Yogyakarta

Usulan terkait pelayanan KB di RSKIA Sadewa, baru kali ini di sesi ke 2 yang dilayani banyak yang dilarikan ke IGD, sehingga perlu ada pemikiran tentang berapa tenaga yang bisa melayani dengan jumlah peserta sebanyak itu, dengan tempat yang memadai.

Peserta ada yang mengeluh masih sakit, sampai dengan tiduran di konblok. Aseptor ada yang mengeluh kedinginan sampai masuk ke IGD, ada juga mengeluh sakit karena peserta memiliki maag, karena mereka harus puasa dulu. Mohon dipikirkan bersama untuk pelaksanaan berikutnya supaya pelayanan kedepan semakin baik dan menjaga BKKBN dan program bangga kencana lebih baik lagi.

11. Ibu Titik Kab Bantul

Beberapa aseptor dari Bantul merasa kesakitan tidak seperti pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Kami selalu mengkonsultasikan kondisi aseptor kepada dr. Iin, dan diberikan rekomendasi untuk membawa aseptor ke IGD RS Sadewa. Kendalanya adalah kendaraan yang akan digunakan menuju RS Sadewa. Masukan saja bila aseptor setelah tindakan keluar diberikan kursi dan ruang yang memadai. Mohon evaluasi untuk lokasi di RS Sadewa kejauhan untuk kab lainnya. Dan pembagian waktu pelayanan supaya tidak terlalu ramai/antre lama. Mohon klarifikasi terkait capaian PA untuk tapakah tidak salah ?

12. Bp. Totok IPKB Gunung Kidul

Implant 1 batang apakah sudah tersedia di seluruh faskes di Gunung Kidul ? Karena selama ini masih menggunakan implant 2 batang.

13. Klarifikasi Sekban :

- a. Terkait DAK , mohon terus mengupdate Morena karena akan digunakan sebagai bahan perencanaan DAK yang akan diterima bapak ibu di kab/kota.
- b. Panduan Harganas akan disampaikan dari Bidang KSPK, karena semenjak pandemi tidak pernah dialokasikan anggaran untuk Kegiatan Harganas, karena dilakukan secara virtual. Kami sangat berterimakasih karena di Kab/Kota tetap menyelenggarakan harganas.
- c. Harganas tahun ini akan dilaksanakan secara hybrid dan berpusat di Medan.

14. Klarifikasi Koordinator Adpin :

- a. KIE Media tradisional di acara Harganas dalam bentuk jathilan mohon dapat terekam agar bisa diputar berulang. KIE Media tradisional seperti ini sangat cocok untuk diputar saat ada tamu dari Internasional.
- b. Menanggapi ibu Niken, New Siga ini adalah aplikasi baru yang menggantikan aplikasi lama. Untuk new siga mulai januari sudah dapat input data. Jadi mungkin bila data belum sesuai real, mohon bapak/ibu bisa segera menginput. Kedepan bila semua data sudah terinput maka akan dibuat input data ditutup setiap tanggal 10 setiap bulannya. Tapi ini nanti bila data sudah terinput semua.
- c. Terkait KKPPB memang setiap tahun kita belum bisa mencapai target KKPPB . Kami sudah berupaya, bersurat ke Pusat untuk menurunkan target KKPPB di DIY. Tetapi memang belum membuahkan hasil.
- d. Untuk selisih capaian pada presentasi dengan real, monggo bisa diupdate diaplikasi.
- e. Menanggapi bu Titik Kab Bantul , untuk PA Vasektomi di DIY memang kecil / turun. Untuk bantu mendapat 1 berarti sudah tercapai.

15. Klarifikasi dr. Fatur KBKR

- a. Terkait saran pelayanan MOW serentak di RS Sadewa, merupakan saran langsung dari Pimpinan. Tim mensyaratkan serentak dan terpusat dengan 150 aseptor setiap hari. Kegiatan terus berlangsung tidak terputus-putus, mulai dari skrining, tindakan, dll. Kedepan akan dilaksanakan lagi KB Serentak pada 15 Juni namun akan dilaksanakan di faskes-faskes. Jadi tidak terpusat.
- b. BKKBN DIY belum pernah mendistribusikan implant 1 batang, bila di Sirika ada laporan mungkin dari Swasta atau Mandiri.

16. Klarifikasi Bu Niken Dalduk

- a. Laporan di New Siga belum ditutup. Jadi bukan tanggal pelaporannya yang akan dipegang tetapi tanggal pelayanannya. Level faskes dan kecamatan belum sanggup untuk melakukan penginputan, semoga di New Siga di semester II bisa berjalan dengan baik.
- b. Definisi Operasional PA dan PB tetap, tidak berubah sejak dulu.

17. Klarifikasi Bu Yuni KSPK

Isu tentang lansia kami sedang berkoordinasi dengan Alma Atta untuk membuat inovasi menyelesaikan isu lansia yang semakin banyak. Untuk rangkaian lomba Harganas, ada beberapa lomba yang diikuti oleh ASN, Kader, kami sudah bersurat ke UPD Kab/Kota. Untuk puncak acara dilaksanakan di Medan dengan kegiatan bedah rumah.

**Foto Kegiatan**









# NOTULEN

## RAPAT KERJA PROGRAM BANGGA KENCANA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022

### I. PELAKSANAAN

- Hari/tanggal : Kamis, 10 Maret 2022
- Tempat : Eastparc Hotel Yogyakarta (luar jaringan)  
Platform *zoom meeting* (dalam jaringan)  
ID: 973 1453 4394 passcode: rakerda
- Peserta : 150 orang dihadirkan secara fisik. Peserta berasal dari unsur Forkompimda DIY, Mitrakerja DIY/Mitra Kerja Kab/Kota, Jajaran Perwakilan BKKBN DIY dan panitia.
- Narasumber : 1. Kepala Perwakilan BKKBN DIY– Shodiqin, SH, MM  
2. Inspektur Wilayah II BKKBN - Sunarto, S.E., M.M..  
3. Bapeda DIY – Doddy Bagus Jatmiko, SE,Akt.  
4. Rektor Alma Ata - Prof. Dr. Hamam Hadi, M.S., Sc.D. Sp. G.K.  
5. Dr. Med. Dr. Supriyatiningih,Sp. OG.M.Kes.

### II. HASIL

#### A. Laporan dan Refleksi Program Bangga Kencana tahun 2021 dan Kebijakan, Strategi serta Prioritas Program tahun 2022 oleh Kepala Perwakilan BKKBN DIY - Bapak Shodiqin,SH, MM

- Rakerda merupakan tindak lanjut dari Rakernas. BKKBN DIY berkomitmen dalam penanganan stunting. Siap mengerahkan dukungan melalui tenaga PKB dan Tim Pendamping Keluarga yang tersebar di seluruh desa. Jumlah TPK 1.852 tim.
- Tema Review 2022 : “Penguatan Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting melalui Optimalisasi Sumber Daya dan Konvergensi Lintas Sektor”
- 

#### INDIKATOR SASARAN STRATEGIS RENSTRA BKKBN 2020-2024

No.	Indikator Sasaran Strategis	2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka kelahiran total ( <i>Total Fertility Rate/TFR</i> ) per WUS usia 15-49 Tahun	2,26	2.24	2.21	2.19	2.1
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern ( <i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i> )	61,78	62,16	62,54	62,92	63,41
3	Persentase kebutuhan ber-KB yg tidak terpenuhi ( <i>Unmet Need</i> )	8,60	8,30	8,00	7,70	7,40
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun ( <i>Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19</i> )	25	24	21	20	18
5	Indeks Pembangunan Keluarga ( <i>IBangga</i> )	53,57	55,00	57,00	59,00	61,00
6	Median Usia Kawin Pertama Perempuan ( <i>MUKP</i> ) seluruh wanita umur 25-49 tahun	21,9	22,0	22,0	22,1	22,1

- Capaian Program Banggakencana 2021

No	Indikator	Target 2021	Capaian 2021 (PK 21)	Ket
1	TFR	2,1	1,91	Tercapai di atas 100%
2	ASFR 15-19 tahun	14	9,1	Tercapai di atas 100%
3	mCPR	62,4	55,6	Belum tercapai
4	Unmetneed	5,62	19,8	Belum tercapai
5	PA MKJP	34,88	42,4	Tercapai di atas 100%
6	iBANGGA	63,07	57,41	Belum tercapai
7	MUKP	23	22,9	Belum tercapai
8	% Masyarakat terjangkau Prog Banggakencana	60% (nasional)	75,98%	Tercapai di atas 100%
9	% tingkat putus pakai kontrasepsi	24,5 (nasional)	19,6%	Tercapai di atas 100%

- Capaian Realisasi DAK BOKB DIY 89,46% dengan rincian (1) Kulon Progo: 91,41%, (2) Bantul: 94,50%, (3) Gunungkidul: 87,77%, (4) Sleman: 91,95%, (5) Kota Yogyakarta: 79,50%.

#### B. Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama, Pemberian Penghargaan, dan Deklarasi ZI WPK

Dilakukan oleh Perwakilan D.I. Yogyakarta dan Mitra Kerja. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama D.I. Yogyakarta, Pimpinan Perum Bulog D.I. Yogyakarta, LazizMU D.I. Yogyakarta, Aisyiah D.I. Yogyakarta, dan Ombudsman D.I. Yogyakarta. Pembacaan Deklarasi ZI WPK dibacakan oleh Kepala Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta. Pengukuhan oleh Sestama BKKBN RI kepada Ibu Sri Paduka Pakualam X periode 2022-2024. Pemberian penandatanganan nota kesepakatan, perjanjian kerjasama, komitmen bersama, penerima bantuan, dan penerima penghargaan.

#### C. Sambutan Sekretaris Utama BKKBN – Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si.

- Apresiasi BKKBN D.I. Yogyakarta karena secara umum program Banggakencana tercapai, walaupun masih ada indikator yang belum tercapai. Salah satunya indikator iBangga. Ibangga itu terkait ketentraman, kemandirian, kebahagiaan. Padahal indeks kebahagiaan untuk D.I. Yogyakarta juga cukup tinggi. Yang musti kita perhatikan terhadap indikator yang belum terpenuhi.
- Penugasan Presiden RI kepada BKKBN sebagaimana Perpres No 72 tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting. Komisi IX RI menuntut instrumen Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dapat diselesaikan

pada pertengahan Maret. Oleh karena itu, penghargaan Bupati Bantul yang sudah relatif baik pembentukan TPPS.

- Target penurunan stunting nasional 14%. DIY sudah mencapai 17%.
- Presiden mencanangkan ada 12 provinsi prioritas, yaitu: Jatim, Jateng, Jabar, Banten, dan Sumut. Sumbangan untuk 5 provinsi sudah 51%. Ada 7 provinsi yang menjadi angka prevalensi tertinggi, diantaranya: NTT, NTB, Kalbar, Kalsel, Sulteng, Aceh.
- BKKBN melakukan kebijakan Menyusun Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI)
- Bapak Kepala BKKBN secara reguler sudah mendatangi para menteri. Menteri kesehatan, Kominfo, PMK, Bapenas, PUPR, Pertanian. Tujuannya untuk meyakinkan bahwa penurunan stunting tidak bisa ditangani secara sektoral.
- Pembentukan Tim pendamping keluarga sudah 600.000 se-Indonesia sudah terbentuk. Ada 200.000 tim yang terdiri dari ketua PKK, Kader, dan bidan. Program stunting yang sudah berjalan sudah bagus, namun menurut Setneg yang masih kurang di level mikro.
- Harapan bersama para mitra K/L, perguruan tinggi kami menyelaraskan program termasuk KKN tematik

**D. Arahan dan Pembukaan Resmi Rakerda Program Bangga Kencana D.I. Yogyakarta tahun 2022 – Arahan Gubernur D.I. Yogyakarta – diwakili Wakil Gubernur (Sri Paduka Paku Alam X)**

- Program Banggakencana sebagai bagian upaya menjadikan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk seimbang.
- Hal itu program besar dan harus kongruen antara pusat dan daerah.
- Percepatan penurunan stunting bersifat multisektor dan lintas sektor.
- Komitmen menjadi relevan dalam program penurunan stunting perlu dilakukan holistik integratif, dan berkualitas melalui sinkronisasi antara kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kab/kota, hingga pemerintah desa.
- Intervensi spesifik dan intervensi sensitif, didukung pemangku kepentingan, dunia usaha, media, organisasi, PT dalam usahan mobilisasi sumber daya dan potensi.
- Rakerda sebagai upaya koordinasi sinergi, dan sinkronisasi. Hal ini menjadi titik tolak menjadi kerja yang integratif dan kolaboratif. Upaya penurunan stunting dapat tepat sasaran.

**E. Sesi Pemaparan Materi dan Diskusi**

**Moderator: Ibu Erlina Hidayati Sumardi, S.IP., MM – Kepala Dinas DP3AP2 DIY**  
**Materi Implementasi RAN PASTI di DIY dalam Percepatan Penurunan Stunting secara Efektif dan Efisien – Bapeda DIY – Doddy Bagus Jatmiko, SE,Akt.**

- Alur indikator perencanaan sektor kesehatan didasarkan dari visi dan misi

- Visi Gubernur DIY pada periode 2017-2022 : “Menyongsong abad Samudera Hindia untuk kemuliaan martabat manusia Jogja.”
- Misi Pembangunan DIY 5 (lima) tahun 2017-2022: (1) Meningkatkan kualitas hidup, kehidupan dan penghidupan masyarakat yang berkeadilan dan berkeadaban; (2) Mewujudkan tata pemerintah yang demokratis.
- Visi dan misi ini diwujudkan dalam 6 indikator perencanaan pembangunan, yaitu Sasaran pemda : meningkatkan derajat kualitas SDM; Indikator sasaran pemda : Indeks Pembangunan Manusia; Program Pemda : Peningkatan usia harapan hidup; Indikator program pemda : angka harapan hidup
- Mendukung sasaran perangkat daerah : terwujudnya perilaku sadar sehat Indikator sasaran perangkat daerah persentase puskesmas melaksanakan program Jogja Sehat dengan pendekatan keluarga
- Kebijakan pemda Jogja terkait stunting DIY yaitu Kesejahteraan rakyat Yogyakarta adalah tugas dan tanggung jawab bersama, seperti yang telah tertulis dalam indikator kinerja utama pembangunan pemerintah baik pusat maupun daerah.
- Dampak dari tingginya kemiskinan dan rendahnya pendidikan, berpengaruh terhadap kesehatan bumil.
- Stunting masuk dalam RAD SDGs Pemda DIY yaitu di Tujuan 2 – tanpa kelaparan.
- Upaya yang telah dilakukan oleh pemda dalam rangka memperbaiki gizi masyarakat adalah: (1) Sosialisasi tentang gizi dan pangan; (2) Peningkatan promosi hidup sehat; (3) Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi rumah tangga; (4) Perbaikan atau pengayaan gizi pangan; (4) Penguatan pelaksanaan dan pengawasan regulasi dan standar gizi dan keamanan pangan; (5) Penguatan integrasi intervensi gizi; (6) Perbaikan gizi ibu hamil; (7) Penguatan sistem surveilans pangan dan gizi termasuk pemantauan pertumbuhan; (8) Pelaksanaan germas; (9) Peningkatan jangkauan kualitas kesehatan masyarakat; (10) Penyaluran bantuan pangan
- Upaya penanganan stunting di DIY ada 3: (1) Aksi konvergen, semua kab/kota menjadi lokus percepatan penanggulangan stunting. Dimana hal ini dievaluasi secara reguler oleh kemendagri (dirjen bangda); (2) Analisis data, secara rutin melalui si Gizi terpadu dan juga data survei (riskesdas 5 tahunan); (3) Intervensi perbaikan gizi, dibagi 30% intervensi spesifik dan 70% intervensi sensitif.
- Potensi DIY dalam percepatan penurunan stunting: (1) DIY memiliki Indeks Pembangunan Manusia tertinggi kedua se-Indonesia; (2) DIY memiliki Indeks Desa Membangun yang tinggi, sehingga tidak ada lagi desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di DIY; (3) Kemitraan dan sinergi yang konvergen

untuk meburansi kemiskinan, kelaparan dan berkurangnya kesenjangan; (4) Kerja kolaboratif yang sinergis antar stake holder.

**F. Materi Percepatan Penurunan Stunting melalui Tri-Dharma Perguruan Tinggi – Rektor Alma Ata - Prof. Dr. Hamam Hadi, M.S, Sc.D.Sp.G.K.**

- Salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah implementasi merdeka belajar di kampus merdeka. Hal ini sejalan dengan percepatan penurunan stunting yang dilakukan oleh BKKBN yaitu PTPK yang berisi dengan kuliah umum, pojok kependudukan, integrasi mata kuliah, KKN Tematik, PKL dan magang
- Visi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045 merupakan mplementasi dari SDGs, dimana ada bberapa prasyarat yang harus dibenahi seperti kualitas SDM, kesiapan infrastruktur, kesiapan teknologi, kelembagaan pemerintah, tata ruang wilayah, dan sumber daya ekonomi dan keuangan (APBN)
- Diliat dari tren jumlah anak-anak, usia kerja dan manula dari tagun 1950-2050, transisi demografi akan menciptakan peluang bonus demografi pada 2012-2045. Hal ini akan terealisasi apabila adanya
  1. suplai tenaga kerja yang besar dan berkualitas yang akan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat
  2. perempuan yang terdidik dan bekerja
  3. tabungan masyarakat meningkat
  4. kebijakan investasi pemerintah dan swasta yang membuka lapangan kerja.
- Menurut WHO, 151 juta anak dibawah umur 5 tahun menderita stunting, oleh sebab itu 1000HPK sangat penting karena akan berdampak pada anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Ada 5 pilar pencegahan stunting, yaitu
  1. Pilar 1 : Komitmen dan visi pimpinan nasional dan daerah
  2. Pilar 2 : Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku
  3. Konvergensi program pusat, daerah dan desa
  4. Ketahanan pangan dan gizi
  5. Pemantauan dan evaluasi
- Model konvergensi pencegahan stunting merupakan tugas dan tanggungjawab multisektor dalam mendukung desa melakukan pencegahan stunting, yaitu dari intervensi gizi spesifik (30%) dan intervensi gizi sensitif (70%)
- 8 aksi integrasi intervensi penurunan stunting di kab/kota:
  1. Analisis situasi : bappeda
  2. Rencana kegiatan : bappeda
  3. Rembuk stunting : sekda
  4. Peraturan bupati/walikota tentang peran desa : BPMD
  5. Pembinaan KPM : BPMD

6. Sistem manajemen data : bappeda
  7. Pengukuran dan publikasi stunting : dinkes
  8. Reviu kinerja tahunan : sekda dan bappeda
- Pengukuran stunting dapat didukung melalui surveilans gizi
  - Pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting dilakukan guna memastikan pemenuhan layanan konvergensi pencegahan stunting di Desa bagi masyarakat miskin dan masyarakat rentan khususnya pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dapat dipenuhi dengan baik, serta meningkatkan peran Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam memantau pemenuhan layanan konvergensi stunting di Desa.
  - Rencana aksi percepatan konvergensi pencegahan stunting di desa
    1. Optimalisasi perankader di desa
    2. Fasilitasi perencanaan pembangunan desa
    3. Koordinasi dan implementasi layanan konvergensi pencegahan stunting di desa
    4. Monitoring laporan konvergensi pencegahan stunting di desa pada sasaran rumah tangga 1000 HPK
  - Merdeka belajar kampus merdeka sebagai salah satu instrumen perguruan tinggi untuk memperkuat pendampingan perguruan tinggi pada pemerintah daerah dalam program prioritas nasional percepatan penurunan stunting
  - Belajar diluar kampus dengan 8 modalitas bisa dilakukan dengan cara:
    1. pertukaran pelajar
    2. Magang/praktek kerja
    3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan
    4. Penelitian/riset
    5. KKN tematik
    6. Studi/proyek independen
    7. Kegiatan wirausaha
    8. Proyek kemanusiaan
  - Indikator kinerja utama (IKU) akan menjadi landasan transformasi pendidikan tinggi dibagi 3 yang masing-masing mempunyai indikator secara spesifik, yaitu:
 

Kualitas lulusan:

    1. Lulusan mendapat pekerjaan yang layak pekerjaan dengan upah diatas UMR, menjadi wirausaha atau melanjutkan studi
    2. Mahasiswa mendapat pengalaman diluar kampus contoh : magang, proyek desa, dll

Kualitas dosen dan pengajar:

    3. Dosen berkegiatan diluar kampus
    4. Praktisi mengajar di dalam kampus
    5. Hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat atau mendapat rekognisi internasional sehingga hasil riset dan pengabdian dapat dimanfaatkan.

Kualitas kurikulum:

6. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia
  7. Kelas yang kolaboratif dan partisipatif
  8. Program studi berstandar internasional
- Pemanfaatan Program-program Dari Mitra Terkait Oleh Perguruan Tinggi (PT) Pendamping Pemda Dalam Program Nasional Percepatan Penurunan Stunting:
    1. Kemedikbudristek RI : program kompetisi kampus merdeka, program kedaireka, dll
    2. BKKBN : KKN tematik mahasiswa penting, program pendampingan PT pada pemda, dll
    3. Kementerian desa
    4. BRIN

**G. Materi Peningkatan KB Pasca Persalinan sebagai Upaya Percepatan Penurunan Stunting - Dr. Med. Dr. Supriyatiningih, Sp. OG.M.Kes.**

- Stunting adalah produk yang dihasilkan dari kehamilan. Saat ini, bayi lahir saja sudah 23% prevalensi stunting. Upaya pencegahan stunting melalui peningkatan KB pasca persalinan bisa diliat dari pentingnya pendampingan kepada keluarga dan calon pasangan usia subur sebelum proses kehamilan, selama kehamilan dan setelah kehamilan.
- Dalam upaya percepatan penurunan stunting, BKKBN mempunyai panduan pelaksanaan pendampingan keluarga yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan kepada keluarga dan/atau keluarga beresiko stunting seperti ibu hamil, ibu pasca persalinan, anak usia 0-59 bulan, serta semua calon pengantin/calon PUS melalui pendampingan 3 (tiga) bulan pranikah sebagai bagian dari pelayanan nikah untuk deteksi dini faktor risiko stunting dan melakukan upaya meminimalisir atau pencegahan pengaruh dari faktor risiko stunting.
- Implementasi pendampingan keluarga bisa dimulai dari Bidan, Pengurus TP PKK tingkat desa atau keluarhan dan akder KB yang akan melakukan koordinasi, penyuluhan dan pencatatan pelaporan kepada keluarga dan/atau keluarga beresiko stunting.
- Keberhasilan program KB ditentukan oleh pelayanan kesehatan yang diberikan sepanjang siklus usia reproduksi, yaitu: (1) Pendidikan dan konseling kespro pada remaja dan catin, (2) Konseling dan pelayanan KB pada PUS, (3) Promosi KB pasca persalinan pada bumil, (4) Pelayanan KB pasca persalinan pada ibu bersalin dan nifas, (5) Pelayanan KB interval.
- Metode KB yang bisa dilakukan adalah Pil, IUD, Implant, kondom, steril dan suntik



- Angka kegagalan metode kontrasepsi disebut dengan pearl indeks, yaitu angka kehamilan yang terjadi pada 100 wanita setelah menggunakan suatu metode kontrasepsi selama 1 tahun. Sehingga bisa disimpulkan makin kecil PI, makin efektif metode KB tersebut.
- Efektivitas kontrasepsi dibagi 4, yaitu : (1) Hormonal, bisa berupa kontrasepsi oral (pil), suntikan, dan susuk/implan; (2) Mekanik, berupa alat-alat mekanik seperti spiral/IUD, kondom, diaframa, spermatisida, dan diaframa+spermatisida; (3) Teknik, bisa berupa senggama terputus atau sistem kalender; (3) Non kontrasepsi, atau tanpa kontrasepsi.

#### **H. Materi Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting – Inspektur Wilayah II BKKBN - Sunarto, S.E., M.M.**

- Capaian program Banggakencana secara nasional TFR tercapai 2,24 (100%), ASFR 15-19 tercapai 20 (120%), mCPR 57,00 (91,70%), Unmet need tercapai 18 (46,11%), PA MKJP tercapai 22,4 (86,38%), iBangga tercapai 54, 01 (98,20%), mUKP tercapai 20,71 (94,14%), tingkat putus pakai tercapai 21,03 (116,50%), masyarakat yang terjangkau program banggakencana 76,02 (126,70%).
- Persentase penurunan stunting per tahun (RPJMN 2015 – 2019): 0,3 %. Persentase penurunan pertahun 2019- 2021 : 1,65%. Rata-rata penurunan pertahun untuk mencapai target 14%:3,5%.
- Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dari tingkat pusat, provinsi, kab/kota, kecamatan dan desa. Pembentukan TPPS Provinsi target 34, baru 16. TPPS Kab/kota dari 514, terbentuk 114 atau 22,18%. TPPS Kecamatan dari target 7.247, baru terbentuk 147 atau 2,4%. Desa/Kelurahan target 81.223 baru terbentuk 1.366 atau 1,68%. Pembentukan TPPS ini ditargetkan akan selesai pertengahan Maret 2022.
- Tindak lanjut diterbitkannya Perpres nomor 72 tahun 2021: (1) Menetapkan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting (RAN PASTI), (2) Melakukan koordinasi antar kementerian/lembaga dalam upaya konvergensi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting, (3) Membentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di pusat hingga sampai desa/kelurahan, (4) Membentuk 200.000 Tim Pendamping Keluarga (TPK) atau 600.000 orang terdiri dari bidan, kader PKK dan Kader Penyuluh KB, (5) Me-launching program screening 3 bulan Pranikah.

### **III. SESI TANYA JAWAB**

#### **A. PERTANYAAN**

##### **Pertanyaan ke-1, dari Ibu Supriyatna**



- Mengapa implant bisa langsung diberikan langsung setelah persalinan? Sedangkan kontrasepsi suntik progesterin menunggu 6 minggu.

**Pertanyaan ke-2, dari Ibu Eli Kariyani (TP PKK Kota Yogyakarta)**

- TP PKK memiliki 9 pilot project, salah satunya yaitu penurunan stunting. Kota Yogyakarta mewakili DIY secara nasional. Kerja ini adalah kerja bersama Bapeda, DP3AP2, Perguruan Tinggi, dan BKKBN. Kami ingin dibantu project tersebut di lokus Kelurahan Kricak. Mohon bantuan, kerjasama, pencerahan, dan pendampingan.
- Untuk Kaper: sebaiknya ada MOU BKKBN dan TP PKK DIY.

**Pertanyaan ke-3 dari Pak Amirudin (Gunung Kidul)**

- Upaya untuk pencegahan stunting di Gunung Kidul mengacu pada 8 konvergensi stunting. Penanganan stunting tiap desa sudah dianggarkan di APDes.
- Untuk pencegahan stunting, kami telah melangkah bekerjasama dengan Kemenag. Kemenag sudah siap menggerakkan KUA untuk pembekalan catin agar terhindar dari isu stunting.
- Ditujukan untuk Bapeda, dari hasil pemaparan Gunung Kidul angka stunting masih 20%. Sumber data/parameter dari mana? Berdasarkan info dari Dinas Kesehatan, Gunung Kidul telah mencapai 15%. Apakah angka yang dipakai dari Pusat menggunakan data dari BPS atau dariman?
- Pada awal PK 21 dijanjikan akan dijadikan buku/data yang sakti. Tetapi ketika kami mengisi stunting dari Bapeda, data yang terpakai dari PK 21 hanya sedikit sekali. Pemanfaatan data PK 21 masih minim. Terkait dengan 29 cakupan data berasal dari luar PK 21.
- Bapak Kepala Dinas sudah memerintahkan untuk membuat SOP bagaimana catin dapat mengakses ke elsimil. Tetapi kami dapat informasi kalau elsimil yang mengisi catin. Padahal yang berpotensi stunting bisa terjadi pada bumil. Apakah ke depan akan ada aplikasi untuk ibu hamil?

**Pertanyaan ke-4 dari Pak Sunarto (IPADI DIY)**

Apakah Bapeda memiliki data nama-nama kecamatan yang memiliki stunting tinggi seperti di Gunung Kidul?

**B. JAWABAN**

**1. Jawaban Narsum dr Dr. Med. Dr. Supriyatningsih,Sp. OG.M.Kes**

- KB Implan adalah kontrasepsi yang mengandung hormon progesteron. Beda KB suntik yang mengandung hormon progesterin.
- Progesteron adalah hormon steroid yang dikeluarkan dari sistem reproduksi wanita sedangkan Progesterin adalah bentuk progesteron buatan, itu kerjanya jauh lebih cepat dalam merangsang. Mengatur sistem menstruasi
- Di progesterin rantai karbonnya terbuka sehingga ada struktur hormonal dengan rantai yang panjang, kemampuan untuk melakukan pekerjaan

aktivasi menjadi lebih cepat dalam hal merangsang kerja dari hormon estrogen. Estrogen berfungsi untuk mengatur fungsi menstruasi bersama dengan hormon lainnya. Akibatnya kalau menggunakan progestin terlalu cepat maka akan menyebabkan penekanan terhadap hormon penghasil asi (prolaktin). Karena itu ditunggu 6 minggu supaya prolaktin bekerja terlebih dahulu. Diundur dulu penggunaan progestin supaya kerja prolaktin dengan osis-oksinya lebih maksimal.

- Implan itu Levonogestrel, setelah sekian kali turunan dibandingkan progesteron asli atau progestin maka Levonogestrel bisa kita masukkan lebih cepat disisipkan di bawah kulit. Sifat dari implan adalah pelan-pelan, dosisnya sudah tertakar karena dia dapat bekerja harus berikatan dengan sel otak. Hal itu menyebabkan pelepasannya tidak sangat tinggi. Maka itu penggunaan implan diizinkan setelah melahirkan. Karena tidak mungkin menekan hormon penghasil asi.

## **2. Jawaban Narsum Sunarto,SE,MM**

- MOU TP PKK dengan BKKBN sudah ada di tingkat pusat. Jika di tingkat wilayah belum, maka perlu ditindaklanjuti dengan PKS sebagaimana sesuai diktum MOU. Kami nanti cek ke Direktorat Advokasi dan Hubungan Antar Lembaga.
- Elsimil untuk catin dan ibu hamil menjadi satu disitu. Nanti konfirmasi ke Direktorat Remaja.
- Terimakasih untuk rencana untuk membuat SOP di Gunung Kidul
- Cakupan di luar PK 21, saat ini Direktorat Pelaporan dan Statistik sedang berkoordinasi K/L terkait yang saat ini telah tersedia data penurunan stunting menuju satu data Indonesia. Data yang tersedia tidak hanya dapat diakses oleh yang mengampunya tapi dikondisikan untuk dapat diakses oleh seluruh pihak terkait.
- .

## **3. Jawaban Narsum Doddy Bagus Jatmiko, SE,Akt.**

- Gunung Kidul memiliki karakteristik faktor luas wilayah, jarak jauh dari yankes. Sesuai monev tahun 2020, Gunung Kidul termasuk 5 besar di level pas Kabupaten. Monev Bangda muncul di aksi ke 7 soal hasil pengukuran yang ditanggjawab oleh Dinkes dengan Dinas di sektor PMDes. Di situ juga terdapat pengukuran-pengukuran posyandu pada bulan timbang. Hal itu yang akan terus diupload pada forum 7 di web Bangda. Angka stunting ada berbeda versi dari Riskesdes, ada lagi ukuran-ukuran lain. Form 7 monev Bangda harus diricek ulang.
- Anggaran stunting 11 % bersifat direct (langsung) ada juga bersifat sensitif seperti sarpras, air, sanitasi, pangan, gizi.
- Pastin kami mereformulasi data-data, misal data kemiskinan, stunting sampai level kecamatan. Kalau dibutuhkan kami akan share.

## **C. KESIMPULAN**

1. Anak adalah generasi yang penting untuk masa depan sehingga anak stunting di awal kehidupan hampir tidak mungkin dikembalikan secara normal. Orang tua harus merencanakan dan mempersiapkan kehamilan, memelihara, melahirkan di yankes, mengasuh bayi dengan baik. Kesuksesan program membutuhkan kerjasama semua pihak, seperti dukungan pengetahuan dan nutrisi yang baik, Perguruan Tinggi tidak hanya pada pilar yang ke 5 tapi di semua pilar dengan juga program MDKM.
2. Pendidikan kespro di keluarga dan sekolah ditambahkan dengan pendidikan agama.
3. Edukasi KB harus disampaikan secara tepat sebagai salah satu bentuk ikhtiar semaksimal mungkin untuk suksesnya pembangunan keluarga. Keluarga sejahtera didukung regulasi dan kebijakan serta fasilitasi teknis dan satu data kependudukan Indonesia. Dalam rangka hari perempuan internasional, perempuan memiliki posisi tawar yang tinggi untuk menentukan dirinya sendiri bila pembangunan kita berkeadilan gender. Keadilan gender ini akan mendorong laki-laki untuk ber KB.
4. BKKBN DIY agar menindaklanjuti membuat PKS antara BKKBN DIY dengan TP PKK.

Tim Notulis,

Mila Savitri,S.Sos.,M.A.  
Wartiningsih, M.Pd.

# Input RVRO

Entri Data / Input RVRO

**Program : DJ. Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana**

**Kegiatan : 3331. Pengelolaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Perwakilan BKKBN Provinsi**

Data RVRO secara otomatis sudah terkonfirmasi dan koreksi data RVRO dilakukan atas persetujuan Unit Eselon I, dengan mengubah status dari tanda centang hijau menjadi tanda silang merah

: Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I

: Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali

: Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Pilih Kegiatan **Rekap** Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

No.	Periode	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu RO (Rp.)	TVRO (volume)	RVRO (volume)	Progres (%)	Keterangan
1	Rekap	<b>ABN</b> Kebijakan Bidang Sosial (Rekomendasi Kebijakan)	<b>001</b> Rekomendasi kebijakan Evaluasi Program Bangsa Kencana (Rekomendasi Kebijakan)	52.365.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: Telah dilakukan rapat koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan Maret: Telah dilaksanakan Konsolidasi Internal dan Eksternal Rencana Pelaksanaan Kegiatan April: Telah dilaksanakan Koordinasi Lintas Sektor Program dan Studi Tiru Penguatan Program Mei: Telah dilakukan kegiatan Penyusunan Analisis Program Bangsa Kencana Juni: Telah dilaksanakan kegiatan rakor program KKBPK bersama Mitra Kerja Juli: Telah dilaksanakan kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan analisis Prog Banggakencana Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan kajian analisis program bangsa kencana September: Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Analisis Program Bangsa Kencana Oktober: Dalam proses pelaksanaan Penyusunan Evaluasi Dan Analisis Program Bangsa Kencana dengan PT Nopember: Telah dilaksanakan persiapan kegiatan diseminasi hasil evaluasi dan analisis program bangsa kencana Desember: -
2	Rekap	<b>BDB</b> Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga)	<b>001</b> Faskes yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standar pelayanan (Fasilitas Kesehatan Tk Pertama)	234.436.000	377.0000	377.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan Mitra Kerja (Faskes) tentang Kespro, KBPP dan Pelayanan Wilayah Tertinggal dan Terpencil April: Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kesertaan KB Pria Mei: Telah dilaksanakan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB di Faskes dan Peningkatan Kesertaan KB Pasca Persalinan Juni: telah dilaksanakan kegiatan forum peningkatan pelayanan kualitas KB bersama mitra kerja Juli: - Agustus: - September: Telah dilaksanakan kegiatan Analisis dan Evaluasi Capaian Kesertaan KB di Kab/Kota Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Bhaksos Kesehatan Reproduksi pada Kegiatan Momentum Pelayanan KB Desember: -
3	Rekap	<b>DCJ</b> Pelatihan Bidang Sosial (Orang)	<b>001</b> SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangsa Kencana Tk. Provinsi dan Kab/Kota (Orang)	191.680.000	80.0000	60.0000	75.00	Januari: - Februari: - Maret: Telah dilaksanakan Koordinasi Penjaminan Mutu Diklat dan Penguatan Tatalaksana Kediklatan April: Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Teknis New SIGA dan Penyusunan Modul/Materi Diklat Mei: Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan New Siga untuk pendataan keluarga Juni: Telah dilaksanakan kegiatan tata laksana dan akreditasi diklat Juli: telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Koordinasi, Monitoring, Evaluasi Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan SDM Provinsi September: Telah dilaksanakan kegiatan perbaikan Sarana dan Prasarana Kediklatan Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Penambahan Tata Laksana Diklat dan Penjaminan Mutu Diklat Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi hasil Pelatihan Desember: -
4	Rekap	<b>FBA</b> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>001</b> Pemerintah Daerah Kab/kota yang mendapat fasilitasi dan pembinaan dalam Bidang Pembangunan Keluarga (Kab/Kota)	154.630.000	5.0000	5.0000	100.00	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Pembinaan Kelompok BKB Holistic Integratif Maret: Telah dilaksanakan Pembinaan Kelompok BKB Holistic Integratif April: Telah dilaksanakan kegiatan Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan dan Pembinaan Poktan Mei: Telah dilaksanakan Orientasi bg Pengelola di Berbagai Tingkatan Juni: telah dilaksanakan kegiatan dukungan pengelolaan PPKS di balai penyuluhan Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan pengelolaan PPKS Rujukan Tk Provinsi September: Telah dilaksanakan kegiatan Pengelolaan PPKS tingkat provinsi dan Kab/Kota Oktober: Telah dilaksanakan Fasilitasi Pengelolaan PPKS tingkat provinsi dan Kab/Kota Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi Pengelolaan PPKS di Balai Penyuluhan Desember: -

5	Rekap	<b>FBA</b> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>002</b> Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi dan pembinaan sinkronisasi kebijakan dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk (Provinsi)	<b>184.500.000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan kegiatan Penguatan untuk Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di Kab/Kota Maret: Telah dilakukan Koordinasi Penyusunan GDPK dan Pengembangan Model Solusi Strategis April: Telah dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Data kampung KB dan Peningkatan Kapasitas Pengelola Prog Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan penyusunan GDPK dan Pengelolaan Forum Komunikasi Pokja banggakencana Juni: telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi dan pembinaan teknis pendidikan kependudukan jalur formal (SSK dan PT) Juli: Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Pendidikan Kependudukan Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan penyusunan rencana aksi pembangunan kependudukan terintegrasi September: Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kependudukan Tk Provinsi Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Monev Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Rakor Program Bangga Kencana bersama Mitra Kerja Kependudukan Desember: -
6	Rekap	<b>FBA</b> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>003</b> Pemerintah Daerah yang mendapat fasilitasi pembinaan penggerakan mitra kerja dan pemangku kebijakan (stakeholders), KIE , serta penyediaan data dan informasi keluarga (Pemda Provinsi)	<b>318.852.000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Kegiatan Pembinaan untuk Peningkatan Kualifikasi Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD dan Sub PPKBD) Maret: Telah dilaksanakan kegiatan Advokasi dan KIE, Penggerakan Lini Lapangan dan Peningkatan Layanan STIK April: Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kualitas Penyebarluasan Informasi dan Pengelolaan PPID Mei: Telah dilaksanakan kegiatan pengembangan desain materi KIE dan Penguatan IMP/ Institusi masyarakat pedesaan Juni: telah dilaksanakan kegiatan fasilitasi pokja advokasi program banggakencana di daerah Juli: Telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Desain Materi Promosi KIE Program Bangga Kencana Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan pembinaan penguatan pelaksanaan mekanisme operasional lini lapangan September: Telah dilaksanakan kegiatan Temu Kerja Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Bimbingan Teknis Fungsional PKB dalam Penurunan Stunting Nopember: Telah dilaksanakan Peningkatan Peran Serta Pemangku Kepentingan dalam Penggerakan Program Bangga Kencana Desember: -
7	Rekap	<b>PBG</b> Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	<b>001</b> Rekomendasi kebijakan hasil Studi Kasus Stunting provinsi (rekomendasi kebijakan)	<b>150.000.000</b>	<b>2.0000</b>	<b>2.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: - Maret: Kegiatan masih pada tahapan persiapan dan konsolidasi internal April: Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Internal Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Workshop Studi Kasus Stunting di Prov Juni: telah dilaksanakan kegiatan workshop dan diseminasi studi kasus dan pembelajaran baik stunting di provinsi Juli: Telah koordinasi pelaksanaan Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi Agustus: Telah dilaksanakan penyusunan kajian stunting kerjasama BKKBN dengan Perguruan Tinggi September: Sedang dilaksanakan kegiatan penyusunan kajian kependudukan bersama Mitra Perguruan Tinggi Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi Nopember: Telah dilaksanakan Penyusunan Kajian dan Penyusunan Policy Brief bersama Mitra Perguruan Tinggi Desember: -
8	Rekap	<b>PEA</b> Koordinasi (kegiatan)	<b>001</b> Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi dan kab/kota (kegiatan)	<b>791.170.000</b>	<b>6.0000</b>	<b>6.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Kegiatan masih pada proses persiapan dan konsolidasi internal Maret: Telah dilaksanakan Pertemuan Konsolidasi Internal dan Lintas Sektoral April: Telah dilaksanakan Penandatanganan kontrak untuk Satgas Stunting dan Pelaksanaan Pendampingannya di Kab/Kota Mei: Telah dilaksanakan kegiatan pendampingan penurunan stunting oleh Satgas tk Kab/Kota dan Prov Juni: telah dilaksanakan kegiatan pendampingan percepatan penurunan stunting Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan penyelenggaraan fasilitasi sekretariat percepatan penurunan stunting September: Telah dilaksanakan dukungan operasional SATGAS Percepatan Penurunan Stunting Tk Provinsi dan Kab/Kota Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Konsolidasi Perencanaan Program Bangga Kencana dalam Penurunan Stunting Nopember: Telah dilaksanakan fasilitasi Penyelenggaraan koordinasi satgas Percepatan Penurunan Stunting di Tk kab/kota Desember: -
9	Rekap	<b>QAH</b> Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	<b>001</b> Pelaksanaan layanan Audit Stunting, Manajemen Kasus Stunting Kab/Kota, dan koordinasi Intensifikasi pelayanan KB di faskes (kab/kota)	<b>1.198.623.000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan 2 Kegiatan yakni Penguatan Pengelolaan Pelayanan KB dan Dukungan Opr PKBRS Maret: Telah dilaksanakan kegiatan monitoring pembinaan pelayanan KB di Faskes April: Telah dilaksanakan Kegiatan Koordinasi dlm Upaya Intensifikasi Pelayanan KB Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Perluasan Akses Pelayanan KB di Faskes Juni: telah dilaksanakan pertemuan koordinasi fasilitasi pengelolaan program percepatan penurunan stunting bagi mitra Juli: Telah dilaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Intensifikasi Pelayanan KB di Faskes Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan Audit Kasus Stunting di Kab/Kota September: Telah dilaksanakan Kegiatan Audit Kasus Stunting di Tk Kab/Kota Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Pertemuan Identifikasi Kasus AKS bersama TPPS Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Audit Stunting dan Manajemen Kasus Stunting di Kab/Kota Desember: -



10	Rekap	<b>QDD</b> Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	<b>001</b> PIK Remaja dan BKR yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu (Kelompok Masyarakat)	1.210.021.000	443.0000	443.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: Telah dilaksanakan kegiatan pengadaan materi stunting dan Implementasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil April: - Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan Edukasi PKBR Di PIK R&BKR serta Temu Kerja Forum Genre DIY Juni: telah dilaksanakan kegiatan apresiasi pelaksanaan edukasi PKBR di PIK R dan BKR Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja September: Telah dilaksanakan kegiatan Monev Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK Remaja dan BKR Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Promosi dan Pelembagaan GENRE Melalui Berbagai Media Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) Desember: -
11	Rekap	<b>QDD</b> Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	<b>002</b> Kelompok BKL yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pelayanan Ramah Lansia (Kelompok Masyarakat)	301.700.000	143.0000	143.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: Telah dilaksanakan kegiatan Orientasi Pendampingan Jangka Panjang Lansia dan Pembentukan Sekolah Lansia April: - Mei: Telah dilaksanakan Pembentukan Sekolah Lansia di Kelompok BKL Juni: telah dilaksanakan pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan Pembentukan sekolah Lansia di Kelompok BKL September: Telah dilaksanakan Kegiatan Pembentukan sekolah lansia di kelompok BKL Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Wisuda Sekolah Lansia Kelompok BKL Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Kelompok BKL Desember: -
12	Rekap	<b>QDD</b> Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	<b>003</b> Kelompok UPPKA percontohan di Kampung KB yang mendapat fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (Kelompok Masyarakat)	135.940.000	15.0000	15.0000	100.00	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Pengemb Pemberdayaan Eko Klg (PEK) melalui Strategi Jenis Usaha dan Fasilitasi PEK Akseptor KB Maret: Telah dilaksanakan Fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi (PEK) Akseptor KB dan Sosialisasi Materi PEK April: - Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Orientasi PEK Akseptor Juni: Telah dilaksanakan persiapan kegiatan orientasi PEK bagi akseptor Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor September: Telah dilaksanakan kegiatan Monev Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Melalui Daring Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan rapat persiapan Pembinaan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Pemberdayaan ekonomi keluarga akseptor KB lestari MKJP Desember: -
13	Rekap	<b>QDD</b> Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	<b>004</b> Rumah data kependudukan paripurna yang difasilitasi di kampung KB (Kelompok Masyarakat)	622.368.000	62.0000	62.0000	100.00	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan tahap persiapan dan konsolidasi internal pelaksanaan kegiatan Maret: Kegiatan masih pada tahapan konsolidasi internal April: Telah dilaksanakan rapat koordinasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan Mei: Sudah dilaksanakan Perispan Master of Training Pengelola Rumah Data Juni: telah dilaksanakan kegiatan penguatan kapasitas dan kapabilitas pengelola rumah data kependudukan Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas Rumah Data Kependudukan Paripurna September: Telah dilaksanakan kegiatan Fasilitasi Pendataan di Rumah Data Kependudukan Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Dan Kapabilitas Pengelola Rumah Data Kependudukan Desember: -
14	Rekap	<b>QDE</b> Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga (Keluarga)	<b>001</b> Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 HPK (Keluarga)	247.201.000	56722.0000	56722.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan Promosi dan KIE 1000 Hari Pertama Kehidupan September: Telah dilaksanakan kegiatan Internalisasi Pengasuhan balita dalam rangka percepatan penurunan stunting Oktober: Telah tercapai output kegiatan Keluarga dengan baduta yang mendapatkan fasilitasi dan pembinaan 1000 Nopember: Telah terlaksana kegiatan fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama Kelahiran Desember: -
15	Rekap	<b>QEI</b> Bantuan Lembaga (Lembaga)	<b>001</b> Faskes yang terpenuhi ketersediaan Alat/Obat Kontrasepsi (Alokon) (Faskes)	1.798.870.000	377.0000	377.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: Telah dilakukan Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi, akan tetapi distribusi ke faskes dilakukan secara bertahap April: Telah dilaksanakan Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi akan tetapi distribusi ke faskes dilakukan secara periodik Mei: Telah dilaksanakan Pengadaan Alat/Obat Kontrasepsi, meskipun demikian distribusi ke Kab/Kota dilakukan secara periodik Juni: telah dilakukan distribusi alkon ke 42 faskes Juli: 10 faskes telah dikirim alat dan obat kontrasepsi guna memenuhi kebutuhan stock minimal supaya tidak terjadi kekosongan. Agustus: Telah dilaksanakan Distribusi/Hibah Alokon ke Kab/Kota September: Telah dilaksanakan kontrak Pengadaan Suntik dan Distribusi Alat/Obat Kontrasepsi ke Faskes Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Pengadaan Suntik KB dan ADS Suntik Nopember: Telah terlaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB MKJP bagi faskes yang teregister Desember: -
16	Rekap	<b>QMA</b> Data dan Informasi Publik (layanan)	<b>001</b> Pemutakhiran basis data keluarga Indonesia (PBDKI) (layanan)	4.938.399.000	5.0000	5.0000	100.00	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Kegiatan Konsolidasi Internal dan Eksternal Penyiapan Pelaksanaan Kegiatan Maret: Telah dilaksanakan Penyusunan Laporan Statistik dan Pengadaan Formulir Pendataan April: Telah dilaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Data PK New SIGA Tk Kab/Kota Mei: Telah dilaksanakan pelatihan pelaksana pendataan (New Siga) Juni: dilaksanakan kegiatan persiapan operasional pencatatan dan pelaporan PBDKI Juli: Karena Kegiatan masih dalam tahap koordinasi penentuan metode pemutakhiran PK 2022 Agustus: Telah dilaksanakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemutakhiran data keluarga (PBDKI) September: Telah dilaksanakan kegiatan Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (PBDKI) Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Workshop Pelaksanaan PBDKI bagi Kader di 5 Kab/Kota Nopember:

								Telah dilaksanakan Pendataan di 5 Kab/Kota dalam rangka penyediaan basis data keluarga Indonesia Desember: -
17	Rekap	<b>QMA</b> Data dan Informasi Publik (layanan)	<b>003</b> Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi (layanan)	<b>265.006.000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Pelaksanaan kegiatan masih pada tahap persiapan dan konsolidasi internal Maret: Kegiatan masih pada proses konsolidasi internal April: Telah dilaksanakan koordinasi internal dan eksternal penyiapan pengadaan formulir pendataan stunting Mei: Telah dilaksanakan Koordinasi Internal dan Eksternal Persiapan Orientasi Verivali Data Kasus Stunting Juni: telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi panduan verifikasi dan validasi Juli: Kegiatan masih dalam tahap Pengolahan Data hasil Verivali Data Keluarga Beresiko Stunting Agustus: Telah dilaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan validasi data kasus stunting di Kab/Kota September: Sedang dalam proses pelaksanaan kegiatan pengumpulan data kasus stunting Oktober: Sedang dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Keluarga Nopember: Telah dilaksanakan penyediaan Data kasus stunting dan keluarga resiko stunting yang terverifikasi di Provinsi DIY Desember: -
18	Rekap	<b>QMB</b> Komunikasi Publik (layanan)	<b>001</b> Kampanye Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi dan kab/kota (layanan)	<b>230.000.000</b>	<b>1.0000</b>	<b>1.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Pelaksanaan kegiatan masih pada tahap persiapan dan konsolidasi internal Maret: Telah dilaksanakan kegiatan kampanye stunting melalui Baliho dan Media Elektronik (TV) April: Telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Tk Provinsi melalui media luar ruang Mei: Telah dilaksanakan Kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting Juni: telah dilaksanakan kegiatan kampanye percepatan penurunan stunting Juli: Kegiatan masih dalam tahap produksi multimedia pencegahan Stunting Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan dokumentasi program Bangsa Kencana September: Telah dilaksanakan kegiatan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting melalui berbagai media Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Dokumentasi Program Bangsa Kencana Nopember: Telah dilaksanakan Kampanye Percepatan Penurunan Stunting di Berbagai Media Periode November 2022 Desember: -
19	Rekap	<b>SCM</b> Pelatihan Bidang Kesehatan (Orang)	<b>001</b> Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting (Orang)	<b>2.840.054.000</b>	<b>5559.0000</b>	<b>5559.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Penyiapan Materi dan Bahan Pelatihan Stunting Maret: Kegiatan masih pada proses Persiapan dan konsolidasi internal April: Telah dilaksanakan konsolidasi persiapan pelaksanaan kegiatan Mei: Telah dilaksanakan penyiapan media dan materi pelatihan Juni: Telah dilaksanakan kegiatan pelatihan tim pendamping keluarga dan poster pintar Juli: Telah dilaksanakan rapat koordinasi dan penjadwalan Pelatihan Tim Pendamping Keluarga dan Poster Pintar di Tk Desa Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan orientasi Tim Pendamping Keluarga dan Pelatihan CTU September: Telah dilaksanakan orientasi bagi Tim Pendamping Keluarga (TPK) Beresiko Stunting di 5 Kab/Kota Oktober: Telah dilaksanakan rapat koordinasi Pelatihan Contraception Technology Update (CTU) Nopember: Telah dilaksanakan Pelatihan dan Refreshing dalam rangka percepatan penurunan stunting bagi Tenaga Kesehatan Pengelola KB Desember: -
20	Rekap	<b>UBA</b> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>001</b> Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>331.866.000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Koordinasi Persiapan Internal untuk pelaksanaan Kegiatan Maret: Kegiatan masih pada tahapan persiapan dan konsolidasi internal April: Telah dilaksanakan kegiatan Konsolidasi Nasional Pengelolaan Kampung KB Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Penguatan Kampung KB Juni: telah dilaksanakan kegiatan penguatan kemitraan di kampung KB Juli: telah dilaksanakan kegiatan penguatan kemitraan di kampung KB Agustus: Workshop Kampung KB akan dilaksanakan pada Bulan September September: Telah dilaksanakan rapat persiapan Fasilitasi Dan Pembinaan Kampung KB Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Workshop Pengelolaan Kampung KB di Kabupaten dan Kota Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan teknis Intensifikasi dan Ekstentifikasi kegiatan Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) Desember: -
21	Rekap	<b>UBA</b> Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>002</b> Pemberdayaan kampung KB dalam rangka penurunan stunting (Daerah (Prov/Kab/Kota))	<b>318.200.000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>100.00</b>	Januari: - Februari: Telah dilaksanakan Konsolidasi Internal Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Maret: Kegiatan masih pada tahapan persiapan dan konsolidasi internal April: Telah dilaksanakan koordinasi internal dan eksternal persiapan pelaksanaan kegiatan Mei: Telah dilaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Juni: Telah dilaksanakan persiapan/perencanaan kegiatan pemberdayaan kelompok masyarakat di kampung KB Juli: Akan dilaksanakan Pembentukan Dashat Pada Bulan Agustus 2022 Agustus: Telah dilaksanakan kegiatan pemberdayaan percepatan penurunan stunting di Kampung KB September: Telah dilaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Di Kampung KB Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Stunting di Kabupaten dan Kota Nopember: Telah dilaksanakan Kegiatan Pemberdayaan percepatan penurunan stunting di kampung KB Desember: -







### Input RVRO

Entri Data / Input RVRO

Program : WA . Program Dukungan Manajemen  
Kegiatan : 5297 . Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi

Data RVRO secara otomatis sudah terkonfirmasi dan koreksi data RVRO dilakukan atas persetujuan Unit Eselon I, dengan mengubah status dari tanda centang hijau menjadi tanda silang merah  
🟡 : Belum dikonfirmasi oleh Satker atau Unit Eselon I  
🔴 : Dikembalikan oleh Unit Eselon I untuk dikoreksi kembali  
🟢 : Sudah dikonfirmasi oleh Unit Eselon I

Pilih Kegiatan											
Rekap Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des											
No.	Periode	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Pagu RO (Rp.)	TVRO (volume)	RVRO (volume)	Progres (%)	Keterangan			
1	Rekap	<b>CAN</b> Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	<b>001</b> Pengadaan sarana dan prasana TIK Provinsi (Unit)	88.750.000	2.0000	2.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan pengadaan belanja modal Mei: Kegiatan telah terlaksana 100% Juni: - Juli: - Agustus: Output dan pelaksanaan anggaran telah tercapai September: Pengadaan Sarana IT Telah dilaksanakan Oktober: - Nopember: Output pengadaan TIK telah tercapai Desember: -			
2	Rekap	<b>EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	<b>960</b> Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal (layanan)	294.155.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan dukungan manajemen kesekretariatan Mei: Telah dilaksanakan dukungan manajemen internal humas, perencanaan, dan keuangan BMN Juni: telah dilaksanakan kegiatan forum sinkronisasi perencanaan program dan anggaran Juli: - Agustus: - September: Telah dilaksanakan kegiatan dukungan manajemen organisasi Oktober: Telah dilaksanakan dukungan manajemen keuangan bmn, kepegawaian dan perencanaan program dan anggaran Nopember: Telah dilaksanakan kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Periode November 2022 Desember: -			
3	Rekap	<b>EBA</b> Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	<b>994</b> Layanan Perkantoran (Layanan)	45.267.981.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan dukungan operasional perkantoran bulan April 2022 Mei: Telah dilaksanakan dukungan manajemen internal penggajian pegawai dan layanan perkantoran Juni: - Juli: - Agustus: - September: Telah dilaksanakan dukungan operasional organisasi Oktober: Telah dilaksanakan dukungan manajemen kesekretariatan berupa gaji pegawai, dukungan perkantoran dan pemeliharaan kantor Nopember: Telah dilaksanakan Dukungan Manajemen Layanan Perkantoran Peiode November 2022 Desember: -			
4	Rekap	<b>EBA</b> Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit)	<b>951</b> Layanan sarana internal provinsi (Unit)	11.250.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan Serah Terima Barang Mei: Telah dilaksanakan pengadaan dukungan sarana internal 100% Juni: Output dukungan sarana internal perkantoran telah tercapai 100% Juli: Output dan pelaksanaan anggaran telah tercapai Agustus: Output dan pelaksanaan anggaran telah tercapai September: Telah dilaksanakan pengadaan Sarana Internal Organisasi Oktober: Output telah tercapai Nopember: Telah tercapai Output Layanan Sarana Internal Provinsi Desember: -			
5	Rekap	<b>EBC</b> Layanan Manajemen SDM Internal (Orang)	<b>996</b> Layanan Pendidikan dan Pelatihan (orang)	107.000.000	106.0000	106.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan konsolidasi internal persiapan pelaksanaan kegiatan Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Juni: Telah dilaksanakan penyusunan jadwal dan Media pelatihan bagi fungsional tertentu Juli: Telah dilaksanakan persiapan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK bagi PKB Agustus: Telah dilaksanakan Pelatihan Fungsional Dasar Kependudukan bagi PLKB September: Telah dilaksanakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu di Provinsi Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Fungsional Dasar Bidang Pengendalian Penduduk, KB dan PK Nopember: Telah terlaksana Pelatihan bagi Penyuluh KB Berbasis Standar Kompetensi Desember: -			
6	Rekap	<b>EBD</b> Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	<b>965</b> Layanan Audit Internal (dokumen)	120.490.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan kegiatan Pembinaan Monitoring Pengawasan Program Bangga Kencana Mei: Telah dilaksanakan Monitoring Pengawasan Prog Bangga Kencana Juni: telah dilaksanakan pembinaan monitoring pengawasan program bangga kencana Juli: telah dilaksanakan pembinaan monitoring pengawasan program bangga kencana Agustus: - September: Pembinaan Monitoring Pengawasan Program Banggakencana Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan intern dan ekstern Nopember: Telah dilaksanakan Pengawasan Program Bangga Kencana di Provinsi Periode November 2022 Desember: -			
7	Rekap	<b>PEA</b> Koordinasi (kegiatan)	<b>001</b> Kegiatan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi (kegiatan)	366.000.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan Rapat Kerja Daerah & Rapat Koordinasi Program Banggakencana Mei: Telah dilaksanakan Dukungan Operasional Sekretariat Stunting, Monev Stunting dan Konsolidasi Nasional Stunting Juni: Telah dilaksanakan kegiatan monev pembinaan program bangga kencana Juli: - Agustus: - September: Telah dilaksanakan kegiatan Dukungan kesekretariatan bagi Satgas Stunting Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan dukungan penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Nopember: Telah dilaksanakan dukungan Penyelenggaraan Sekretariat Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Periode November 2022 Desember: -			
8	Rekap	<b>QAH</b> Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	<b>001</b> Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi (layanan)	131.250.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan liputan dan publikasi stunting tk provinsi Mei: Telah dilaksanakan kegiatan Liputan Kegiatan Penangan Stunting Juni: Telah dilaksanakan persiapan liputan kegiatan penurunan stunting Juli: - Agustus: - September: Telah dilaksanakan Dukungan Kehumasan Satgas Penurunan Stunting Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Liputan Media dalam rangka Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting Nopember: Telah dilaksanakan Layanan Humas Percepatan Penurunan Stunting tingkat Provinsi Desember: -			
9	Rekap	<b>QUP</b> Pengawasan dan Pengendalian Layanan (Layanan)	<b>001</b> Layanan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi (Layanan)	71.437.000	1.0000	1.0000	100.00	Januari: - Februari: - Maret: - April: Telah dilaksanakan rapat internal persiapan pelaksanaan anggaran Mei: Telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi internal persiapan kegiatan Juni: Telah rapat internal persiapan pengawasan percepatan penurunan stunting Juli: Sesuai Dengan koordinasi dengan Adminwas Pusat, bahwa Kegiatan akan dilakukan pada Triwulan 3 atau Triwulan 4 awal. Kegiatan akan dilakukan oleh BPKP Pusat, yang langsung berkoordinasi dengan BPKP Perwakilan BKKBN DIY. Kegiatan masih berproses Piloting, Agustus: - September: Telah dilaksanakan rapat persiapan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi oleg BPKP Provinsi Oktober: Telah dilaksanakan kegiatan Evaluasi Program Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi dan Kab/Kota oleh BPPK Nopember: Telah dilaksanakan Pengawasan Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting tk provinsi Desember: -			



Perwakilan  
Badan Kependudukan dan  
Keluarga Berencana Nasional  
D.I. Yogyakarta

Alamat: Jl. Kenari No.58, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55165,  
Telp. (0274) 561215, 513422 Fax. (0274) 549225,562938  
e-mail : [yogya@bkkbn.go.id](mailto:yogya@bkkbn.go.id)

